



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
2021



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
40. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Rincian visi, misi dan prioritas program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX : PENUTUP
- (2) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan:
 - a. Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026; dan
 - b. RKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Renja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

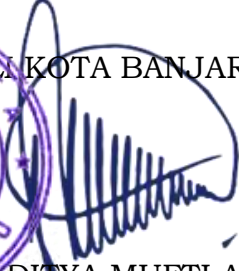
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Agustus 2021

 WALIKOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (... /2021)

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1.
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Dasar Hukum	3.
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4.
1.4 Maksud dan Tujuan	7.
1.5 Sistematika Pembahasan	8.
 BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU	 10.
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	10.
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	10.
2.1.2 Tata Ruang	11.
2.1.3 Demografis	27.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	29.
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	29.
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	27.
2.3 Aspek Pelayanan Umum	37.
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	37.
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	42.
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	48.
2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	50.
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	56.
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	56.
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	56.
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	59.
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	61.
2.5 Capaian Kinerja RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020	63.
 BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	 65.
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020	65.
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2021-2020	65.
3.1.2 Neraca Daerah	71.
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020	76.
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	76.
3.2.2 Analisis Pembiayaan	77.
3.3 Kerangka Pendanaan	78.
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	79.
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	82.
 BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	 84.
4.1 Permasalahan Pembangunan	84.
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85.
4.1.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	86.
4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	89.
4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	90.
4.2 Isu Strategis	91.
4.2.1 Penelaahan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	91.
4.2.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	93.

4.2.3	Penelaahan Terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026	95.
4.2.4	Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025	98.
4.2.5	Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Lain	98.
4.2.6	Penelaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	99.
4.2.7	Isu Strategis RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	99.
BAB V.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	102.
5.1	Visi	102.
5.2	Misi	104.
5.3	Tujuan dan Sasaran	105.
5.4	Prioritas Pembangunan	110.
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	111.
6.1	Strategi	111.
6.2	Arah Kebijakan	113.
6.3	Program Pembangunan Daerah	121.
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	138.
7.1	Alternatif dan Rekomendasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	138.
7.2	Alternatif dan Rekomendasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Tidak Terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	139.
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.
BAB IX	PENUTUP	170.
9.1	Pedoman Transisi	170.
9.2	Kaidah Pelaksanaan	170.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	10.
Tabel 2.2	Perkembangan Penduduk Tahun 2016-2020	27.
Tabel 2.3	Perkembangan Akseptor Keluarga Berencana Aktif Tahun 2016-2020	29.
Tabel 2.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	31.
Tabel 2.5	PDRB per Kapita Tahun 2016-2020	32.
Tabel 2.6	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	37.
Tabel 2.7	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	38.
Tabel 2.8	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	40.
Tabel 2.9	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	40.
Tabel 2.10	Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	41.
Tabel 2.11	Capaian Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2016-2020	41.
Tabel 2.12	Capaian Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	42.
Tabel 2.13	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020	42.
Tabel 2.14	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2016-2020	43.
Tabel 2.15	Capaian Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	43.
Tabel 2.16	Capaian Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020	44.
Tabel 2.17	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	44.
Tabel 2.18	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	44.
Tabel 2.19	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	45.
Tabel 2.20	Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	46.
Tabel 2.21	Capaian Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020	46.
Tabel 2.22	Capaian Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	47.
Tabel 2.23	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	47.
Tabel 2.24	Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2016-2020	47.
Tabel 2.25	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	48.
Tabel 2.26	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	48.
Tabel 2.27	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020	48.
Tabel 2.28	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020	49.
Tabel 2.29	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2016-2020	49.
Tabel 2.30	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	49.
Tabel 2.31	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	50.
Tabel 2.32	Capaian Penyelenggaraan Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2016-2020	50.
Tabel 2.33	Capaian Penyelenggaraan Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020	51.
Tabel 2.34	Capaian Penyelenggaraan Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020	52.
Tabel 2.35	Capaian Penyelenggaraan Bidang Keuangan Tahun 2016-2020	53.
Tabel 2.36	Capaian Penyelenggaraan Bidang Kepegawaian Tahun 2016-2020	54.
Tabel 2.37	Capaian Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020	55.
Tabel 2.38	Capaian Penyelenggaraan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020	55.

Tabel 2.39	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Banjarbaru Tahun 2020	56.
Tabel 2.40	Panjang jalan dan jumlah kendaraan Tahun 2016-2020	57.
Tabel 2.41	Jumlah Penumpang yang Berangkat dan Datang dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Tahun 2016-2020	57.
Tabel 2.42	Jumlah Tindak Pidana yang Masuk pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2016-2020	59.
Tabel 2.43	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan ..	59.
Tabel 2.44	Nilai Investasi Tahun 2017-2020	60.
Tabel 2.45	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	60.
Tabel 2.46	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017-2020	61.
Tabel 2.47	Persentase Penduduk dan Angka Ketergantungan Tahun 2015-2020	61.
Tabel 2.48	Capaian Kinerja RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021	63.
Tabel 3.1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	67.
Tabel 3.2	Hasil Retribusi Daerah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	67.
Tabel 3.3	Rasio Likuiditas pada 31 Desember 2020	72.
Tabel 3.4	Rasio Solvabilitas pada 31 Desember 2020.....	73.
Tabel 3.5	Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2016-2020	74.
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016-2020	76.
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	78.
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) ...	78.
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026	80.
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru	83.
Tabel 4.1	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals/SDGs	92.
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi	102.
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi RPJMD Kota Banjarbaru dengan RPJPD, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN	103.
Tabel 5.3	Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	103.
Tabel 5.4	Perumusan dan Penjelasan Misi	104.
Tabel 5.5	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	105.
Tabel 5.6	Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	106.
Tabel 5.7	Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	107.
Tabel 5.8	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	108.
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	112.
Tabel 6.2	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	114.
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Banjarbaru	121.
Tabel 6.4	Misi, Tujuan, Sasaran serta Program Pembangunan Daerah	122.
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	148.
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banjarbaru	149.
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru	162.
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banjarbaru	163.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru	2.
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah	5.
Gambar 1.3	Keterkaitan RPJMD dan RPJPD	6.
Gambar 1.4	Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	6.
Gambar 1.5	Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program	7.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020	28.
Grafik 2.2	Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020	28.
Grafik 2.3	Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2020	28.
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)	30.
Grafik 2.5	Inflasi Tahunan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020	31.
Grafik 2.6	PDRB per Kapita Kota Banjarbaru 2016-2020	32.
Grafik 2.7	Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 2016-2020 (Ribuan Rupiah)	32.
Grafik 2.8	Indeks Gini Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional Tahun 2016-2019	33.
Grafik 2.9	Perkembangan IPM Tahun 2016-2020	34.
Grafik 2.10	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020	35.
Grafik 2.11	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2016-2020	35.
Grafik 2.12	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Tahun 2016-2020	36.
Grafik 2.13	Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional Tahun 2016-2020	36.
Grafik 2.14	Angka Pengangguran Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional Tahun 2016-2020	37.
Grafik 2.15	Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Tahun 2018-2020	57.
Grafik 2.16	Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukaan Tahun 2018-2020	57.
Grafik 2.17	Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2016-2019	58.
Grafik 2.18	Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2016-2019	58.
Grafik 2.19	Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2016-2019 Berdasarkan Jenis Pelanggan ..	58.
Grafik 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017-2020	62.
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	66.
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	66.
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020 (Milyar)	68.
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 (Milyar)	68.
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	69.
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	69.
Grafik 3.7	Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) ..	70.
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	70.
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	71.
Grafik 3.10	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	71.
Grafik 3.11	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016-2020	71.
Grafik 3.12	Proporsi Mandatory Spending terhadap Belanja Daerah Tahun 2016-2020	71.

BAB 1



PENDAHULUAN

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun oleh Bappeda dengan mensinergikan antara visi dan misi kepala daerah yang terpilih dengan program-program yang telah disusun oleh SKPD hingga lima tahun ke depan. Dalam diktum nomor (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Diktum tersebut sesuai dengan amanat ayat (7) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, sistematika pembahasan, dan metodologi. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga memuat Gambaran Umum Kota Banjarbaru, yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bab selanjutnya memuat tentang Gambaran Keuangan Daerah, yang terdiri dari Kinerja Keuangan Daerah di Masa Lampau, Kebijakan Pengelolaan Keuangan di Masa Lampau, dan Kerangka Pendanaan Daerah. Pada bab kelima, Rancangan Teknokratik ini memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis Daerah yang terdiri dari Permasalahan Pembangunan, serta Isu-isu Strategis Kota Banjarbaru. Bab keenam terdiri dari strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, sedangkan bab ketujuh membahas tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Bab delapan memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang kemudian diikuti oleh bab sembilan sebagai penutup.

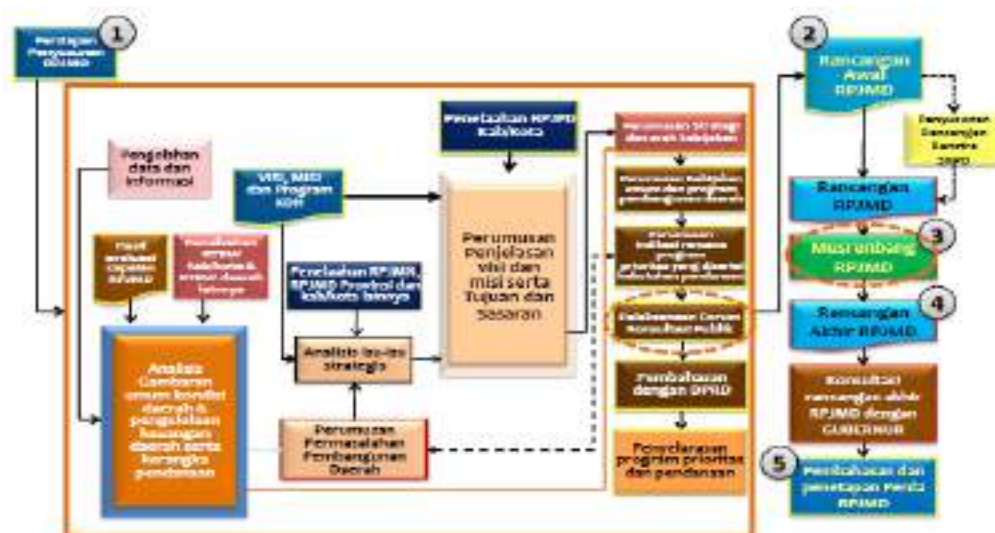
Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005–2025 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dengan terpilihnya Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Wali Kota Banjarbaru masa bakti periode 2021-2024 yang dilantik pada Tanggal 26 Pebruari 2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, Pendekatan Politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Banjarbaru, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu : Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu : Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 Kota Banjarbaru terdiri atas :

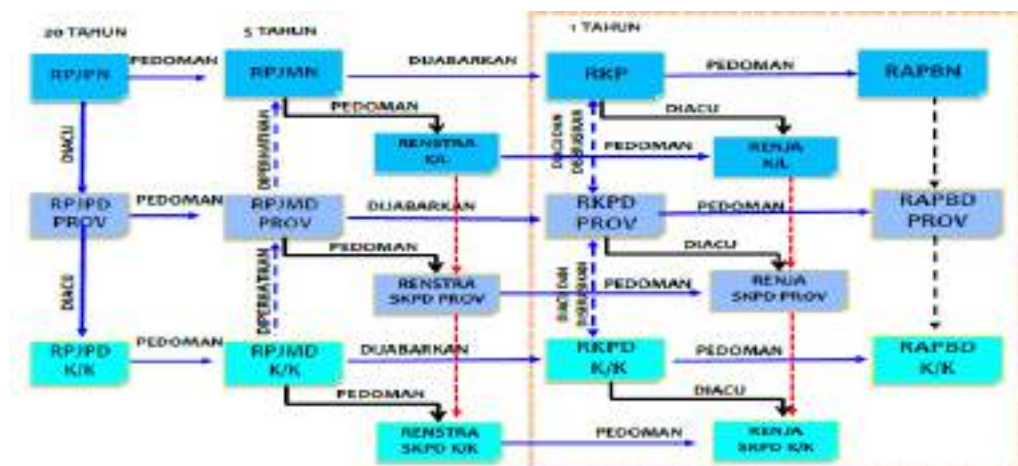
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

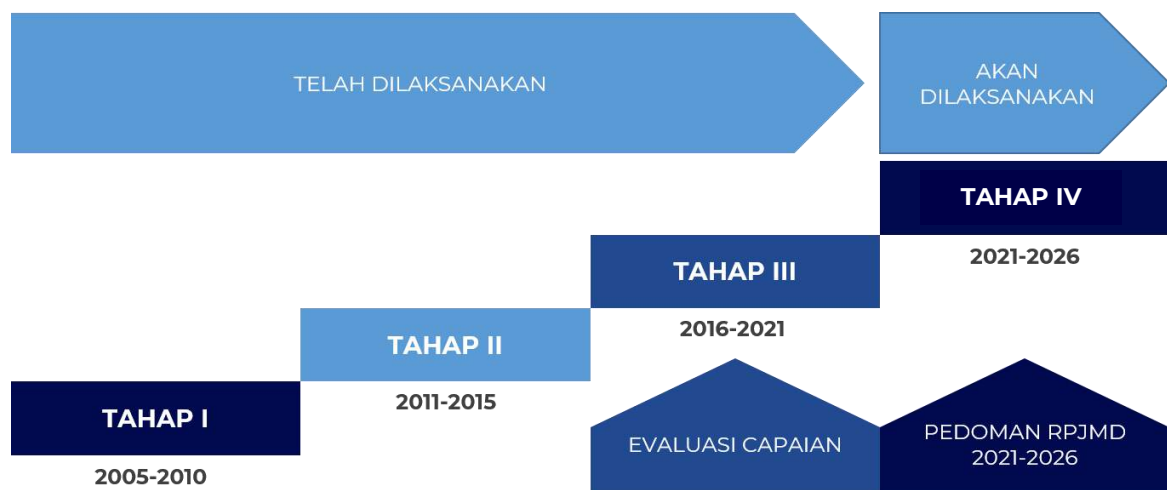


Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

RPJMD Kota Banjarbaru dengan RPJPD Kota Banjarbaru

RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2021-2024. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1. 3
Keterkaitan RPJMD dan RPJPD



RPJMD Kota Banjarbaru dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Gambar 1. 4
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

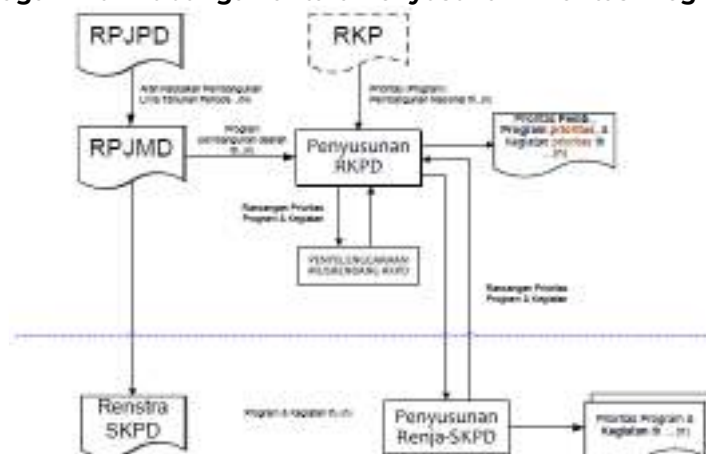


RPJMD Kota Banjarbaru dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, serta RPJMN. Berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1. 5
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

RPJMD Kota Banjarbaru dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten, yaitu :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Banjarbaru (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut);
5. Dokumen terkait lainnya (Dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru berpedoman pada RTRW Kota Banjarbaru yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini dilaksanakan dengan maksud memberikan pandangan kebijakan perencanaan Kota Banjarbaru untuk tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini disusun sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah,

kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Wali Kota Banjarbaru kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Wali Kota Banjarbaru sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru periode 2021-2026.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana dijabarkan berikut ini.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Pembahasan
- 1.5 Metodologi

BAB II Gambaran Umum Kota Banjarbaru

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020
- 3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran



BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan
- 6.3 Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX Penutup

BAB 2



GAMBARAN UMUM DAERAH

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur dengan batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,38 km² yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 20 (duapuluh) Kelurahan. Adapun pembagian berdasarkan luas wilayah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1	Kecamatan Landasan Ulin	92,42	24,89
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	18,76	
	Kelurahan Guntung Payung	15,25	
	Kelurahan Syamsudin Noor	18,67	
	Kelurahan Guntung Manggis	39,74	
2	Kecamatan Liang Anggang	85,86	23,12
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	23,86	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	19,50	
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	16,15	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	26,35	
3	Kecamatan Cempaka	146,7	39,50
	Kelurahan Palam	14,75	
	Kelurahan Bangkal	29,80	
	Kelurahan Sungai Tiung	21,50	
	Kelurahan Cempaka	80,65	
4	Kecamatan Banjarbaru Utara	24,44	6,58
	Kelurahan Loktabat Utara	14,24	
	Kelurahan Mentaos	1,62	
	Kelurahan Komet	2,44	
	Kelurahan Sungai Ulin	6,14	
5	Kecamatan Banjarbaru Selatan	21,96	5,91
	Kelurahan Loktabat Selatan	8,58	
	Kelurahan Kemuning	3,61	
	Kelurahan Guntung Paikat	2,47	
	Kelurahan Sungai Besar	7,30	
Kota Banjarbaru		371,38	100,00

Sumber : KDA, BPS Kota Banjarbaru, 2021

Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian -7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%), dan 250-500 m (0,35%). Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi

kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30cm, 30-60 cm dan >90cm. Kota Banjarbaru memiliki kedalaman efektif lebih dari 90 cm, di mana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan peta geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap 3,47 persen. Berdasarkan skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu podsolik (63,82%), lithosol (6,36%) dan organosol (29,82%).

Suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisar antara 23,3°C sampai dengan 32,7°C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober (35,3°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus (20,8°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 47% sampai dengan 98%. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2005 tercatat 142,7 mm. Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru adalah 22,3 atm.

2.1.2 Tata Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota
 - a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di **kawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat** yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
 - b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu:
 - 1) Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di **Kelurahan Komet**;
 - 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - 3) Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di **Kelurahan Cempaka**
 - c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap **kelurahan**.
2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota:
 - a. Sistem Prasarana Utama
 - 1) Sistem jaringan jalan
 - a) Sistem jaringan jalan
 - (a) Arteri Primer: Jl. A. Yani km 18 – km 37
 - (b) Rencana pengembangan akses bandara: Jl. A. Yani km 29 – Bandar Udara

- (c) Jalan bebas hambatan :
 - (a) Jalan Bebas Hambatan Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura di Kecamatan Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Selatan dan Cempaka3 – 13
 - (b) Jalan Bebas Hambatan Pelaihari – Bati-Bati – Gambut/Liang Anggang – Sungai Tabuk – Alalak – Anjir Pasar (Batas Provinsi Kalimantan Tengah) di Kecamatan Liang Anggang.
- (d) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan pusat kegiatan:
 - (a) Guntung Pinang - Guntung Upih (Balai Banjar) - Kawasan Perkantoran
 - (b) Jln. Trikora - Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel (Aneka Tambang)
 - (c) Jln. Mister Cokrokusumo - Aneka tambang (SMA 3)
 - (d) Jln. Mister Cokrokusumo - Aneka tambang (SMA 3)
 - (e) Banjarbaru - Bati-bati
 - (f) Jl. Cempaka (Banjarbaru)
 - (g) Banjarbaru – Aranio
 - (h) Jl. Trikora
 - (i) Gunung Kupang - Kiram - Tambang Ulang
 - (j) Mataraman - Sungai Ulin
 - (k) Jl. Golf Banjarbaru
 - (l) Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru
 - (m) Jl. Palembang Banjarbaru
 - (n) Jl. Kong Ex Banjarbaru
 - (o) Jl. Dalam Kawasan Perkantoran Prov. Kalsel Banjarbaru
- (e) Jalan Kolektor Primer yang termasuk ke dalam sistem jaringan jalan strategis provinsi
 - (a) Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor
 - (b) Jalan Angkasa - Akses Bandara
 - (c) Jalan Alternatif ke Bandara
 - (d) Jalan Menuju TPA Regional
- (f) Jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar Kabupaten/Kota
 - (a) Jalan lingkaran Banjarbaru
 - (b) Jalan lingkaran dan jalan dalam kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru :
 - Jalan lingkaran selatan yang melalui Jalan Ahmad Yani jurusan Pelaihari-Jalan Trikora-Jalan Mister Cokrokusumo
 - Jalan lingkaran utara melalui Jalan Lin Lingkaran Utara – Jalan Karang Anyar – Jalan Panglima Batur
 - Pengembangan jalan lingkaran timur yang meliputi ruas Jalan Mataraman – Sungai Ulin – Jalan Mister Cokrokusumo (Banjarbaru – Banyu Irang) dan Liang Anggang
- (g) Jalan Arteri Sekunder
 - (a) Jl. Guntung Manggis
 - (b) Jl. Peramuhan Ujung
 - (c) Jl. Peramuhan
 - (d) Jl. Pondok Mangga
 - (e) Jl. Panglima Batur
 - (f) Jl. Basuki Rahmat
 - (g) Jl. Pangeran Antasari
 - (h) Jl. Gotong Royong III
 - (i) Jl. Karang Anyar I
 - (j) Jl. Barjad
 - (k) Jl. Taruna Bhakti
 - (l) Jl. RO. Ulin
 - (m) Jl. Rahayu

- (n) Jl. Pangeran Antasari Minggu Raya
- (o) Jl. Basuki Rahmat Minggu Raya
- (h) Jalan Kolektor Sekunder
 - (a) Jl. Kasturi
 - (b) Jl. Taman Gembira Barat
 - (c) Jl. Karamunting
 - (d) Jl. Garuda
 - (e) Jl. Pondok Kelapa
 - (f) Jl. RT.45 – Gang Sepuluh
 - (g) Jl. Ambulung
 - (h) Jl. Tambak Garunggong (Pandarapan)
 - (i) Jl. Karang Anyar II
 - (j) Jl. Nusantara
 - (k) Jl. Rambai Tengah – Karamunting Ujung
 - (l) Jl. Junjung Buih
 - (m) Jl. Pangeran Hidayatullah
 - (n) Jl. Kelapa Gading
 - (o) Jl. Lanan
 - (p) Jl. Tambak Buluh
 - (q) Jl. Pangeran Suriansyah
 - (r) Jl. K.H. Abdul Choliq
 - (s) Jl. Srikaya
 - (t) Jl. Sirkuit
 - (u) Jl. Taman Gembira Timur
 - (v) Jl. Rambai
 - (w) Jl. Mentaos Raya
 - (x) Jl. Sempati
 - (y) Jl. Darul Hijrah
 - (z) Jl. Guntung Paikat (pandu)
 - (aa) Jl. Dahlina Raya
 - (bb) Jl. Belimbing
 - (cc) Jl. Guntung Harapan
 - (dd) Jl. Kasturi II
 - (ee) Jl. Pangeran Suriansyah Ujung
 - (ff) Jl. Rukun Mufakat
 - (gg) Jl. Beringin
 - (hh) Jl. STM
 - (ii) Jl. Puyau
 - (jj) Jl. Binamarga
 - (kk) Jl. Jend. Sudirman
 - (ll) Jl. Abimanyu
 - (mm) Jl. Gotong Royong
 - (nn) Jl. Seledri
 - (oo) Jl. Sukamara
 - (pp) Jl. Intan Sari Raya
 - (qq) Jl. Veteran/Gotong Royong
 - (rr) Jl. Gotong Royong Raya
 - (ss) Jl. Bina Karya
 - (tt) Jl. Taman Gembira Selatan
 - (uu) Jl. Pangeran Suryanata
 - (vv) Jl. Al Jafri
 - (ww) Jl. Kemuning
 - (xx) Jl. Jafri Zam-zam
 - (yy) Jl. Bina Putra
 - (zz) Jl. Sapta Marga
 - (aaa) Jl. Nangka
 - (bbb) Jl. Baramulti
 - (ccc) Jl. Kasturi I

- (ddd) Jl. Manggis
- (eee) Jl. Kestela
- (fff) Jl. Tembus Gunung Ronggeng
- (ggg) Jl. Bukit Raya
- (hhh) Jl. Sukarelawan
- (iii) Jl. Kasturi – Kemuning
- (jjj) Jl. Pandawa
- (kkk) Jl. Warga Tunggal
- (lll) Jl. Lingkar Utara – Gotong Royong
- (mmm) Jl. Jeruk
- (nnn) Jl. Kenanga
- (ooo) Jl. Griya Utara Trikora
- (ppp) Jl. Karang Anyar 2 menuju Pondok Mangga
- (qqq) Jl. Jafri Zam-zam I
- (i) Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru
- b) Sistem Jaringan Angkutan Umum
 - (1) Sistem koridor/utama :
 - (a) Rute pada jalur Barat-Timur jalan Nasional Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura
 - (b) Rute jalan Lingkar Selatan, berawal dari Terminal Liang Anggang-Jalan Lingkar Selatan/Trikora-Jalan Mistar Cokrokusomo-berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru.
 - (c) Rute Lingkar Utara, berawal dari Terminal Ulin Raya-jalan Lingkar Utara-Jalan Karang Anyar-jalan Panglima Batur-jalan A.Yani-berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru.
 - (2) Sistem sirkulator/pengumpan :
 - (a) Rute Palam-Loktabat Selatan-jalan A. Yani
 - (b) Rute Palam-Cempaka
 - (c) Rute Guntung Manggis- jalan A. Yani-Guntung Payung
 - (d) Rute Landasan Ulin-Lingkar Selatan-jalan A. Yani
 - (e) Rute Martapura-Banjarbaru (via jalan Rahayu-jalan Panglima Batur)
 - (3) Pengembangan Armada Angkutan Umum:
 - (a) Jalur rute Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura, merupakan jalur rute utama sistem koridor melintasi Jalan Ahmad Yani
 - (b) Jalur rute Jalan Lingkar Selatan merupakan jalur rute sistem koridor, dari Terminal Liang Anggang melintasi Jalan Lingkar Selatan/Trikora – Jalan Mistar Cokrokusumo – berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru
 - (c) Jalur rute Lingkar Utara, yang merupakan jalur rute sistem koridor dari Terminal Ulin Raya melintasi Jalan Lingkar Utara – Jalan Karang Anyar - Jalan panglima Batur – Jalan Ahmad Yani – berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru
 - (4) Pengembangan jalur trayek BRT Banjarbakula yang melalui Kota Banjarbaru:
 - (a) Rute 4: dari terminal KM 17 – Bandara Syamsudin Noor
 - (b) Rute 5: dari terminal KM 17 – Jalan Trikora – Jalan Mistar Cokrokusumo – Terminal Simpang Empat
 - (c) Rute 6: dari terminal KM 17 – Jalan A. Yani – Landasan Ulin – Terminal Simpang Empat
 - (5) Pengembangan Terminal Angkutan Umum :
 - (a) Terminal eksisting Liang Anggang, yang merupakan terminal tipe C.

- (b) Terminal eksisting Pasar Bauntung, yang merupakan terminal tipe C.
 - (c) Terminal eksisting Simpang Empat Banjarbaru, merupakan terminal tipe C.
 - (6) Pengembangan halte BRT Banjarbakula di Kota Banjarbaru :
 - (a) Pada rute 4: terletak di KM 17, Liang Anggang Karang Paci, Simpang Herkules, dan Bandara
 - (b) Pada rute 5: terletak di KM 17. Liang Anggang, Palam, Masjid Trikora, Jalan Mistar Cokrokusumo, Terminal Simpang Empat
 - (c) Pada rute 6: terletak di KM 17, Liang Anggang, Karang Paci, Simpang Herkules, Landasan Ulin, Brimob, RO Ulin, SPBU 3 - 30 SMPN 1, Taman Van Der Pijji, Museum Lambung Mangkurat, dan Terminal Simpang Empat
- 2) Sistem Jaringan Kereta Api
 - a) Rencana Jaringan Jalur Kereta Api :

Koridor 2 (segmen Tanjung Banjarmasin) dengan nomor jalur KA 3, melalui Kab. Tabalong, Balangan, HST, HSS, Tapin, Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin
 - b) Rencana Lokasi Stasiun Penumpang dan Barang:
 - (1) Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin
 - (2) Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang (dekat Bundaran Liang Anggang)
- 3) Sistem Transportasi Udara
 - a) Ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah Kota Banjarbaru tepatnya di antara Kelurahan Guntung Payung dan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
 - b) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Bandar udara meliputi ruang untuk kegiatan kebandarudaraan yang fungsinya sebagai bandar penumpang dan cargo dengan luas kawasan kurang lebih 312 Ha di Kecamatan Landasan Ulin.
 - d) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP):
 - (1) Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas
 - (2) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
 - (3) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
 - (4) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
 - (5) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
 - (6) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
 - (7) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan di wilayah Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, dan Kelurahan Landasan Ulin Utara.
- a. Sistem Prasarana Lainnya
 - 1. Jaringan energi/kelistrikan
 - a) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka dengan Kecamatan Liang Anggang.
 - b) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV, yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Kecamatan

- Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin.
- c) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai kepada konsumen. Sebagian besar distribusi akan dikembangkan di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Landasan Ulin.
 - d) Gardu induk terdapat di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, dan di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.
2. Jaringan telekomunikasi
- a) Penyelenggaraan Jaringan Tetap:
 - 1) Sentra Telepon Otomat (STO) Jl. Pangeran Muhammad Noor, Kecamatan Banjarbaru Utara
 - 2) Sentra Telepon Otomat (STO) Jl. A. Yani Km. 23, Kecamatan Landasan Ulin
 - b) Penyelenggaraan Jaringan Bergerak: Eksisting ada 48 unit Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh bagian Kota Banjarbaru
3. Jaringan sumber daya air kota
- a) Wilayah Sungai Kota Banjarbaru berdasarkan lokasinya di tiap kecamatan yaitu:
 - 1) Kecamatan Banjarbaru Utara, meliputi Sungai Besar/Kemuning, Sungai Guntung Jingah, Sungai Komet/Durian, Sungai Gotong Royong, Sungai Gunung Kupang I, Sungai Ulin, dan Sungai Karet
 - 2) Kecamatan Banjarbaru Selatan meliputi Sungai Kemuning, Sungai Ulin, Sungai Lurus, Sungai Guntung Paikat, Sungai Guntung Lua, Sungai Puyau, Sungai Loktabat, Sungai Guntung Papuyu, Sungai Guntung Paring, Sungai Ambulung, dan Sungai Gunung Kupang I
 - 3) Kecamatan Cempaka, meliputi Sungai Batu Licin, Sungai Pinang, Sungai Ujung Murung, Sungai Batu Kapas, Sungai Paring, Sungai 3 - 64 Sambangan, Sungai Ampayo, Sungai Tiung, Sungai Apukah, Sungai Basung, Sungai Mangguruh, Sungai Lukaas, Sungai Banyu Irang, Sungai Cambal, Sungai Mati, Sungai Dadap, Sungai Bangkal Kecil, Sungai Batu Kapur, Sungai Kuranji, dan Sungai Rancah
 - 4) Kecamatan Landasan Ulin, meliputi Sungai Salakm Sungai Guntung Payung, Sungai Lukudat, Sungai Handil Kerokan/Daya Sakti, Sungai Rimba, Sungai Tagumpar, Sungai Sumba, Sungai Sidomulyo, dan Sungai Lu'uk
 - 5) Kecamatan Liang Anggang, meliputi Sungai Handil Berkat Karya, Sungai Handil Papikul, Sungai Handil Hanyar, Sungai Jembatan I, Sungai Jembatan II, Sungai Pembuang Provinsi, Sungai Karya Bakti, dan Sungai Polantan.
 - b) Sistem jaringan air baku untuk air bersih di Kota Banjarbaru meliputi:
 - 1) Untuk kegiatan pertanian, sumber air baku berasal dari Daerah Irigasi:
 - a) DI Sungai Lurus di Kecamatan Banjarbaru Utara
 - b) DI Peramuan di Kecamatan Liang Anggang
 - c) DI Guntung Payung di Kecamatan Landasan Ulin
 - d) DI Bangkal di Kecamatan Cempaka
 - e) DI Palam di Kecamatan Cempaka
 - 2) Sumber alternatif air bersih dengan pembangunan embung. Lokasi-lokasi embung di Kota Banjarbaru meliputi:
 - a) Embung Kelapa Gading
 - b) Embung Cempaka

- c) Embung Liang Anggang
 - d) Embung Sidodadi
 - e) Embung Sei Lurus
 - f) Embung Grha Citra Megah
 - g) Embung Gunung Kapur
 - h) Embung Lukuidat
- 3) Sumber air bersih untuk perumahan yang berada di Kota Banjarbaru berasal dari Sungai Martapura yang diambil melalui intake Banjarbakula dengan kapasitas 1500 liter per detik. Dari sumber tersebut kemudian dialirkan menuju fasilitas pengolahan air di Banjarbaru yaitu IPA Banjarbakula, IPA II Pinus, dan IPA Syarkawi.
- c) Sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Banjarbaru meliputi:
- 1) Penanganan makro genangan banjir:
 - a) Bangunan di areal sempadan sungai yang telah dikembangkan menjadi kawasan kampung tematik atau areal wisata lainnya bisa dipertahankan keberadaannya dengan tetap memberikan elemen-elemen pendukung lingkungan yang tidak merusak kondisi sempadan sungai, seperti penataan di Sungai Kemuning
 - b) Pengendalian permukiman di perkotaan di areal sempadan seperti kampung tematik harus mempertimbangkan:
 - (1) Orientasi kawasan tertuju ke sungai
 - (2) Facade bangunan ke arah sungai
 - (3) Aksesibilitas dua arah, dari sungai ke darat dan dari darat ke sungai
 - (4) Ada hubungan antara jalan darat beserta fasilitas publiknya dengan sungai
 - (5) Tampilan sungai terlihat dari daratan
 - c) Untuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) banjir dilakukan penanganan sebagai berikut:
 - (1) Metode vegetatif dilakukan dengan cara menanam pohon yang cukup kuat untuk menyerap limpasan air pada kawasan terbuka seperti pada kawasan hutan lindung yang ada di Kota Banjarbaru
 - (2) Metode mekanik dilakukan dengan cara membuat lapisan tanah menjadi lebih kuat secara langsung, seperti dengan melakukan penambahan tingkat penyerapan air dan lainnya
 - (3) Metode kimiawi dilakukan dengan bantuan bahan kimia yang disebut dengan soil conditioner³ – 75
 - d) Cara menanam pohon yang cukup kuat untuk menyerap limpasan air pada kawasan terbuka seperti pada kawasan hutan lindung yang ada Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan
 - e) Pengendalian permukiman perkotaan di areal sempadan sungai seperti kampung tematik di sekitar Sungai Kemuning
 - f) Perbaikan bangunan pengendali banjir (pelengsengan/tanggul/pompa) pada sungai yang belum memiliki plengsengan dan sungai yang terpotong akibat tambang di Kecamatan Cempaka
 - 2) Penangan mikro genangan banjir:
 - a) Pelebaran, penyambungan antar saluran drainase, dan perawatan drainase jalan agar tidak tersumbat
 - b) Pemanfaatan swale di sisi jalan

- c) Pemanfaatan embung
- d) Normalisasi sungai di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Landasan Ulin Timur
- e) Perbaikan saluran sekunder dan pembuatan talud-talud sungai di Kelurahan Mentaos dan Kecamatan Cempaka
- f) Pembangunan pintu-pintu air untuk mengalirkan limpasan di Kecamatan Cempaka

4. Infrastruktur perkotaan

a) Penyediaan air minum kota:

Prasarana penyediaan air minum kota adalah sistem penyediaan minum yang selanjutnya disebut SPAM, meliputi:

1) Pengembangan SPAM Sistem Swakelola Masyarakat

Sumber air bersih tersebut dapat berasal dari air tanah maupun air permukaan seperti sungai, mata air, waduk, dan sumber lain. Metode yang kemudian digunakan untuk melakukan pengambilan air adalah dengan menggunakan sumur gali dan/atau sumur pompa. Arah pengelolaan secara swakelola masyarakat yaitu:

- a) Pengembangan sistem pengelolaan jaringan air bersih yang dikelola sendiri oleh masyarakat memerlukan pembinaan teknis dan kelembagaan dari instansi terkait
- b) Masyarakat perlu membentuk kelompok pengelola SPAM untuk melakukan pengelolaan jaringan air yang belum terlayani oleh PDAM

2) Sistem Jaringan Perpipaan (PDAM)

Pelayanan dan pengelolaan sistem jaringan perpipaan di Kota Banjarbaru dilakukan oleh PDAM Intan Banjarbaru.

- a) Penyediaan air minum diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah Kabupaten Banjar

- b) Sistem penyediaan air minum mencakup sistem jaringan perpipaan yang terdiri atas:

- (1) Zona pelayanan tengah, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin. Pengolahan di IPA Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, kapasitas 500 liter per detik
- (2) Zona perkotaan (dengan Kode Zona M) dengan wilayah pelayanan Kecamatan Banjarbaru Utara, Pengolahan di IPA Pinus, Kecamatan Banjarbaru Utara dengan kapasitas produksi 170 liter per detik
- (3) IPA Banjarbakula dengan kapasitas produksi 750 liter per detik yang melayani Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Cempaka. Pada kondisi eksistingnya telah tersedia produksi air dengan kapasitas 250 liter per detik dan akan dilakukan penambahan kapasitas produksi di tahun 2021 sebanyak 500 liter per detik. Dari total jumlah kapasitas tersebut, sebanyak 3 - 85 30 liter per detik air akan dialirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan pada perkotaan Banjarbakula

b) Pengelolaan air limbah:

- 1) Sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- 2) Sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (off site

- sanitation) bagi zona yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan termasuk ke dalam Kawasan komersial (CBD).
- 3) Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.
- c) Sistem persampahan:
- 1) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) direncanakan di setiap kelurahan atau kawasan dengan luasan minimal seluas 300 m² yang 3 - 89 dilengkapi dengan fasilitas pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
 - 2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Hutan Panjang terletak di daerah Gunung Kupang Kecamatan Cempaka dengan luas 31.225 hektar akan menggunakan teknik sanitary landfill dengan cakupan pelayanannya meliputi seluruh wilayah Kota Banjarbaru dan dipersiapkan untuk melayani kawasan Banjarbakula
- d) Jalur evakuasi bencana
- 1) Jalan Mistar Cokrokusumo menuju Kelurahan Sungai Tiung dan Puskesmas Cempaka
 - 2) Jalan Kemuning menuju Masjid Hidayatul Muhajirin
 - 3) Jalan Warga Tunggal – Jalan Rambai menuju Puskesmas Guntung Paikat

1. Rencana Pola Ruang

A. Kawasan Lindung

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terletak di Kecamatan Liang Anggang terbagi Blok I terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan luas 944, 17 Ha, dan Blok II terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan dengan luas 393,33 Ha. Total luas hutan lindung untuk keduanya kurang lebih 1337.5 Ha.
- b. Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan sempadan sungai dan sempadan danau/waduk, meliputi:
 - 1) Sempadan Sungai Handil Kuhiring, dengan panjang 1.334 meter dan lebar sungai 3-4 meter;
 - 2) Sungai Karya Manuntung, dengan panjang 2.985 meter dan lebar sungai 2-4 meter;
 - 3) Sungai Tegal Arum, dengan panjang sungai 3.181 meter dan lebar sungai 2-6 meter;
 - 4) Sungai Guntung Alaban, dengan panjang sungai 1.170 meter dan lebar sungai 1-6 meter;
 - 5) Sungai Guntung Jungah, dengan panjang sungai 1.313 meter dan lebar sungai 1-6 meter;
 - 6) Sungai Guntung Puyau, dengan panjang sungai 409 meter dan lebar sungai 2-4 meter;
 - 7) Sungai Guntung Paikat, dengan panjang sungai 1.682 meter dan lebar sungai 3-5 meter;
 - 8) Sungai Guntung Paring, dengan panjang sungai 2.249 meter dan lebar sungai 3-5 meter;
 - 9) Sungai Kampung Gumpal, dengan panjang sungai 1.696 dan lebar sungai 3-6 meter;
 - 10) Sungai Ambulung, dengan panjang sungai 2.421 meter dan lebar sungai 5-10 meter;

- 11) Sungai Rancah, dengan panjang sungai 5.236 meter dan lebar sungai 3-6 meter;
- 12) Sungai Apukan, dengan panjang sungai 4.4571 meter dan lebar sungai 5-12 meter;
- 13) Sungai Banyu Irang, dengan panjang sungai 32.883 meter dan lebar sungai 5-12 meter;
- 14) Sungai Batu Kapur, dengan panjang sungai 11.545 meter dan lebar sungai 3-12 meter;
- 15) Sungai Kemuning Segmen I, dengan panjang sungai 3.517 meter dan lebar sungai 6-12 meter;
- 16) Sungai Kemuning Segmen II, dengan panjang sungai 1.870 meter dan lebar sungai 6-12 meter;
- 17) Sungai Guntung Lua, dengan panjang sungai 632 meter dan lebar sungai 2-4 meter;
- 18) Sungai Jembatan I, dengan panjang sungai 728 meter dan lebar sungai 4-6 meter;
- 19) Sungai Jembatan II, dengan panjang sungai 4.740 meter dan lebar sungai 4-6 meter;
- 20) Sungai Komet/Sungai Durian, dengan panjang sungai 2.249 meter dan lebar sungai 2-4 meter;
- 21) Sungai Lukudat, dengan panjang sungai 5.374 meter dan lebar sungai 6-10 meter;
- 22) Sungai Mangguruh, dengan panjang sungai 2.690 meter dan lebar sungai 2-4 meter;
- 23) Sungai Abit, dengan panjang sungai 10.661 meter dan lebar sungai 2-6 meter;
- 24) Sungai Sumba, dengan panjang sungai 2.624 meter dan lebar sungai 4-8 meter;
- 25) Sungai Guntung Panggung, dengan panjang sungai 3.090 meter dan lebar sungai 4-7 meter;
- 26) Sungai Surian, dengan panjang sungai 23.230 meter dan lebar sungai 4-7 meter;
- 27) Sungai Basung, dengan panjang sungai 1.592 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
- 28) Sungai Cambai, dengan panjang sungai 1.227 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
- 29) Sungai Dadap, dengan panjang sungai 4.620 meter dan lebar sungai 4-7 meter;
- 30) Sungai Luka'as dengan panjang sungai 1.700 meter dan lebar sungai 2-5 meter;
- 31) Sungai Pembuang Provinsi, dengan panjang sungai 3.365 meter dan lebar sungai 8-10 meter;
- 32) Sungai Rimba, dengan panjang sungai 1.123 meter dan lebar sungai 2-6 meter;
- 33) Sungai Salak, dengan panjang sungai 5.419 meter dan lebar sungai 3-6 meter;
- 34) Sungai Gunung Kupang, dengan panjang sungai 1.651 meter dan lebar sungai 3-6 meter;
- 35) Sungai Guntung Papuyu, dengan panjang sungai 827 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
- 36) Sungai Guntung Payung, dengan panjang sungai 628 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
- 37) Sungai Sidomulyo, dengan panjang sungai 325 meter dan lebar sungai 5-6 meter;
- 38) Sungai Karet, dengan panjang sungai 1.259 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
- 39) Sungai Besar, dengan panjang sungai 2.598 meter dan lebar sungai 3-8 meter;

- 40) Sungai Kuranji, dengan panjang sungai 2.625 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
 - 41) Sungai bangkal, dengan panjang sungai 4.974 mter dan lebar sungai 5-7 meter;
 - 42) Sungai Lurus, dengan panjang sungai 20.201 meter dan lebar sungai 2-6 meter;
 - 43) Sungai Tambak Buluh, dengan panjang sungai 4.405 meter dan lebar sungai 3-6 meter;
 - 44) Sungai Jembatan 3 - Saluran Aria Bima, dengan panjang sungai 10509 meter dan lebar sungai 7-15 meter;
 - 45) Sungai Peramuan, dengan panjang sungai 4.841 meter dan lebar sungai 3-7 meter;
 - 46) Sungai Parit Besar, dengan panjang sungai 1.042 meter dan lebar sungai 3-6 meter;
 - 47) Sungai Pumpung, dengan panjang sungai 778 meter dan lebar sungai 3-7 meter;
 - 48) Sungai Tiung, dengan panjang sungai 1.012 meter dan lebar sungai 2-4 meter;
 - 49) Sungai Sambangan, dengan panjang sungai 6.386 meter dan lebar sungai 3-7 meter;
 - 50) Sungai Ujung Murung, dengan panjang sungai 1.142 mter dan lebar sungai 5-7 meter;
 - 51) Saluran Irigasi, dengan panjang 309.796 meter;
 - 52) Sungai Guntung Manggis, dengan panjang sungai 1.523 meter dan lebar sungai 5-7 meter;
 - 53) Sungai Ulin, dengan panjang sungai 2.707 meter dan lebar sungai 3-7 meter;
 - 54) Sungai Batu Licin, dengan panjang sungai 6.454 meter dan lebar sungai 3-7 meter;
 - 55) Sungai Pulantan, dengan panjang sungai 1.645 meter dan lebar sungai 4-7 meter;
 - 56) Sungai Gotong Royong, dengan panjang sungai 1.687 meter dan lebar sungai 2-3 meter.
 - 57) Sempadan danau/waduk di Danau Seran, Danau Caramin, dan Danau Galuh Cempaka seleber 50 meter.
- c. Ruang terbuka hijau kota
Ruang terbuka hijau publik terdiri dari:
- 1) Ruang terbuka lingkungan perumahan seluas $\pm$ 5,79 hektar
 - 2) Taman seluas $\pm$ 4,44 hektar
 - 3) Sempadan sungai seluas 105 hektar
 - 4) Pemakaman seluas $\pm$ 32,11 hektar
 - 5) Miniatur Hutan Hujan Tropis seluas $\pm$ 78,87 hektar
 - 6) Median perkantoran gubernur seluas $\pm$ 5,16 hektar
 - 7) Kebun raya seluas $\pm$ 100,00 hektar, dan
 - 8) Median jalan seluas $\pm$ 0,26 hektar
- d. Kawasan rawan bencana alam
- a) kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Cempaka.
 - b) kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka.
 - c) kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin
 - d) kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan permukiman;
 - a) Kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru dengan luas total sekitar 8979 Ha
 - b) Kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru dengan luas total sekitar 4126 Ha
 - c) Kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru dengan luas total sekitar 4287 Ha
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - a. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional: Koridor Jl. A. Yani, Jl. Trikora dan Jl. Mistar Cokrokusumo
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa skala local tersebar di tiap-tiap kecamatan dan meliputi seluruh Kawasan perdagangan dan jasa yang tidak termasuk ke dalam kawasan perdagangan dan jasa skala regional
3. Kawasan peruntukan perkantoran;

Kawasan perkantoran di Kota Banjarbaru secara umum tersebar di seluruh kecamatan, dengan pemusatan kawasan perkantoran provinsi di Kecamatan Cempaka, dan perkantoran kota di sekitar Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara.
4. Kawasan peruntukan industri;
 - a) Kawasan peruntukan industri skala rumah kecil tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Cempaka.
 - b) Kawasan peruntukan industri skala sedang tersebar di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang
 - c) Kawasan peruntukan industri skala besar dan memusat berada di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang dengan luas sekitar 1011 Ha
5. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - a. Pariwisata budaya dan Religi
 - (1) Makam Syarifah Badrun di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
 - (2) Masjid Jami Cempaka di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
 - (3) Masjid Agung Al-Munawaroh di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan
 - (4) Museum Lambung Magkuran di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara
 - (5) Mess L di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara
 - (6) Kantor Dinsosnaker di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara
 - (7) Kantor Walikota di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara
 - (8) Kantor BPN di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara
 - (9) Makam Jepang di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
 - (10) Makam Pahlawan di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin
 - (11) Makam Syuhada Haji di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin
 - (12) Makam Brig. Hasan Basry di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang

- (13) Monumen Divisi IV Alri di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang

b. Pariwisata alam

- 1) Rumah Pohon di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
- 2) Danau Biru di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
- 3) Kebun Raya Banua di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka
- 4) Bukit Lentera di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka
- 5) Meek Farm di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
- 6) Danau Seran di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
- 7) Hutan Pinus I di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara
- 8) Embung Sidodadi di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan
- 9) Taman Kehati, di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
- 10) Danau Caramin di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
- 11) Danau Galuh di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka
- 12) Embung Lok Udat di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
- 13) Danau Wisata di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang

c. Pariwisata buatan

- (1) Amanah Borneo Park di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka
- (2) Q Mall Water Park di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara
- (3) Kolam Renang Idaman di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan
- (4) Taman Van Der Pijl di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara
- (5) Minggu Raya dan Air Mancur di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan
- (6) Kolam Renang Antasari di Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara
- (7) Aquatica Water Park di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
- (8) Bekatan Water Park di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin

d. Pariwisata Khusus

- 1) Kampung Penjabat di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan
- 2) Pendulangan Intan Pumpung di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
- 3) Kampung Purun di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka
- 4) Kampung Herbal di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara
- 5) Kampung Pemuda di Kelurahan Sungai Ulin di Kecamatan Banjarbaru Utara
- 6) Kampung Pelangi di Kelurahan Guntung Paikat di Kecamatan Banjarbaru Selatan
- 7) Kampung Iwak di Kelurahan Mentaos di Kecamatan Banjarbaru Utara

- 8) Kampung Silat di Kelurahan Loktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara
 - 9) Kampung Pesona Katsuri di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
 - 10) Kampung Sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kelurahan Landasan Ulin
6. Kawasan Olahraga
- a. Kawasan olahraga skala kecil tersebar di Kelurahan Kemuning dan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan; Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara; dan Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin
 - b. Kawasan olahraga provinsi dalam bentuk Sport City di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka
 - c. Kawasan olahraga kota dalam bentuk Sport Center di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin
7. Kawasan Transportasi
- a. Kawasan dengan peruntukan terminal di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang; Kelurahan Kemuning dan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan
 - b. Kawasan dengan peruntukan bandara di Kelurahan Guntung Payung dan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin
8. Kawasan Energi
- Kawasan energi meliputi dua gardu induk milik PLN, yakni Gardu Induk yang berada di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, dan Gardu Induk Cempaka di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka
9. Kawasan Persampahan
- TPA di Kota Banjarbaru meliputi TPA Gunung Kupang dan TPA Banjarbakula. Kawasan persampahan berlokasi di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka
10. Kawasan Sumberdaya Air
- Kawasan Sumberdaya Air meliputi instalasi pengolahan air minum yang dimiliki oleh PDAM, baik PDAM Intan Banjar maupun PDAM Banjarbakula. Instalasi pengolahan air minum tersebut berada di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara
11. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- a) kawasan ruang terbuka biru meliputi seluruh badan air di wilayah Kota Banjarbaru
 - b) ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer dan kolektor primer
 - c) trotoar (pedestrian way) yang berada di samping kiri kanan jalan
 - d) lapangan parkir, yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa atau fungsi lainnya.
12. Ruang evakuasi bencana;
- a) Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir di Kelurahan Sungai Tiung meliputi Puskesmas Sungai Tiung dan Kantor Kecamatan Cempaka.
 - b) Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir di Kelurahan Kemuning meliputi Puskesmas Kelurahan Guntung Paikat dan Masjid Hidayatul Muhajirin.

13. Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
Pengembangan kawasan sektor informal di Kota Banjarbaru akan diarahkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Banjarbaru
14. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Banjarbaru merupakan lahan kepemilikan TNI dan Kepolisian yang difungsikan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan ini tersebar di seluruh Kota Banjarbaru
15. Rencana Kawasan peruntukan lainnya.
 - a. Kawasan Pertanian
 - 1) Kawasan pertanian lahan basah dengan luas sekitar 1564 Ha terdapat di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang
 - 2) Kawasan pertanian hortikultura dengan luas sekitar 1590 Ha terdapat di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang
 - 3) Kawasan perkebunan dengan luas sekitar 1690 Ha terdapat di Kecamatan Cempaka
 - b. Kawasan Pertambangan di Kota Banjarbaru terdapat di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kelurahan Palam dan Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, sebagai tempat kegiatan pertambangan intan oleh PT. Galuh Cempaka
 - c. Kawasan Perikanan di Kota Banjarbaru berlokasi di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara dengan luas sekitar 47,61 Ha yang berupa Kampung Iwak
 - d. Kawasan pelayanan umum
 - 1) Kawasan Pendidikan
 - a) Kawasan pendidikan dasar (TK, SD) lokasinya diarahkan di pusat lingkungan yang menyebar di seluruh kelurahan Kota Banjarbaru
 - b) Kawasan pendidikan menengah (SLTP, SMU, SMK) diarahkan di pusat kecamatan sesuai dengan standar kebutuhan fasilitas tersebut
 - c) Kawasan pendidikan tinggi (Akademi, PT) tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru
 - 2) Kawasan Kesehatan
 - a) Kawasan kesehatan seperti praktek dokter dan apotek yang diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama dalam kawasan permukiman.
 - b) Puskesmas dan Balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan.
 - c) Kawasan kesehatan skala kota/regional seperti Rumah Sakit Daerah Idaman di Kelurahan Guntung Manggis diarahkan untuk pengembangan dengan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.
 - 3) Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk.
2. Rencana Kawasan Strategis
Adapun Kawasan strategis yang termasuk dalam kawasan wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan Pendukung Kawasan Strategis Nasional Banjarbakula dari Sudut Ekonomi meliputi:
 - 1) Kawasan *Central Business District* (CBD) di Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin
 - 2) Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD)
Di Kota Banjarbaru, pengembangan kawasan dengan konsep TOD ini ada pada 2 titik lokasi, yaitu TOD Terminal Gambut yang mengintegrasikan Terminal Gambut, Stasiun Gambut, dan BRT; dan TOD Syamsudin Noor yang merupakan integrasi antara Stasiun Syamsudin Noor, dan Bandara Syamsudin Noor
 - 3) Kawasan Geowisata Pumpung di Kecamatan Cempaka
 - 4) Kawasan Industri dan Pergudangan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang
 - 5) Kawasan Pendidikan Perguruan Tinggi di sekitar perguruan tinggi yang tersebar di Kota Banjarbaru
 - 6) Kawasan Olahraga berupa Sport City di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka
 - 7) Kawasan Perkantoran Kota di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kawasan Perkantoran Provinsi di Kelurahan Bangkal dan Palam, Kecamatan Cempaka
- b. Kawasan Pendukung Kawasan Strategis Nasional Banjarbakula dari Sudut Pertahanan dan Keamanan
Peruntukkan lahan untuk kegiatan hankam ini merupakan lahan yang digunakan sebagai basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, dan peralatan pertahanan lainnya. Kawasan dengan peruntukkan lahan di Kota Banjarbaru berupa lahan yang dipergunakan sebagai hal-hal tersebut, baik status kepemilikan dan penggunaannya oleh TNI AD, TNI AU, maupun Polri.
- c. Kawasan Pendukung Kawasan Strategis Nasional Banjarbakula dari Sudut Lingkungan Hidup
Berupa Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang terdapat di Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang.

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi.

Dari Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Kota Banjarbaru masuk dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur).

4. Wilayah Rawan Bencana

Pada musim kemarau rawan terjadi kebakaran lahan maupun rumah karena di Kota Banjarbaru lahan yang tidak dirawat oleh pemiliknya menjadi kering sehingga mudah terbakar. Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di Kota Banjarbaru, Unit Pemadam Kebakaran melaksanakan piket 1x24 jam secara bergiliran.

Wilayah rawan bencana terdiri atas kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka dengan total luas terdampak pada tahun 2019 mencapai 764,95 Ha. Di musim kemarau, Kota Banjarbaru juga memiliki tingkat bahaya sedang untuk bencana kekeringan.

Bencana banjir juga terjadi apabila memasuki musim penghujan, terutama di wilayah-wilayah dataran rendah, karena apabila memasuki musim penghujan, Kota Banjarbaru termasuk kategori daerah dengan intensitas curah hujan sedang selain itu faktor alam lainnya yang meningkatkan potensi bencana ini adalah adanya sedimentasi di sepanjang sungai/saluran sesampai dengan menurunkan kapasitas saluran sungai/drainase. Berdasarkan parameter daerah rawan banjir (dengan data kejadian), kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan, Kota Banjarbaru termasuk ke dalam kategori bahaya yang tinggi dengan luasan sebesar 29.447 Ha dari total wilayah kota. Untuk bencana longsor, Kota Banjarbaru termasuk ke dalam kategori bahaya sedang dengan luasan 769 Ha.

2.1.3 Demografis

1. Perkembangan Penduduk

Penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2020 berjumlah 253.442 jiwa, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar 73.385 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar 35.584 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kota Banjarbaru per kecamatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020 terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

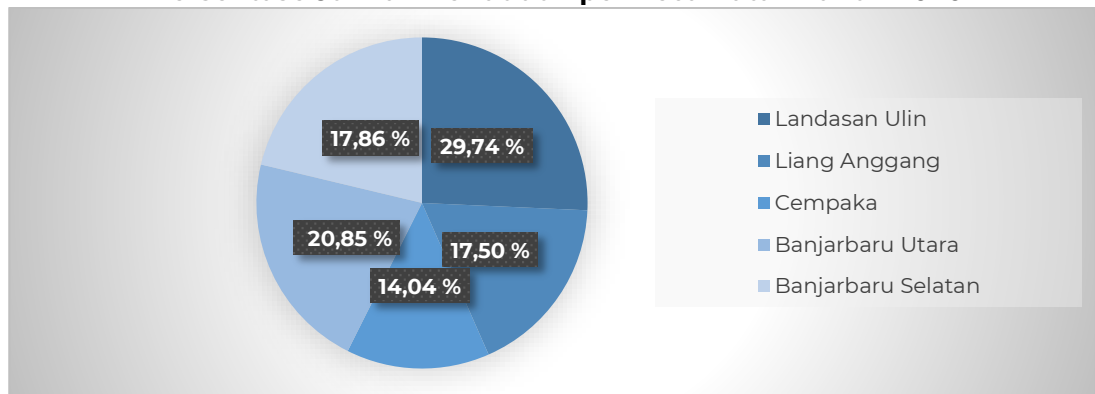
Tabel 2. 2
Perkembangan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Landasan Ulin	62.247	64.006	65.784	67.542	73.385
2	Liang Anggang	42.330	43.695	45.098	46.507	44.358
3	Cempaka	33.921	34.859	35.814	36.762	35.584
4	Banjarbaru Utara	51.577	53.056	54.555	56.039	52.842
3	Banjarbaru Selatan	51.294	52.807	54.346	55.869	45.273
Kota Banjarbaru		234.371	241.369	248.423	255.597	253.443

Sumber : KDA, BPS Kota Banjarbaru, 2021

Distribusi penduduk antar kecamatan tidak merata. Pada tahun 2020, persentase penduduk bervariasi antara tertinggi di Kecamatan Landasan Ulin yaitu 75.385 jiwa atau sekitar 29,74% dari seluruh penduduk Kota Banjarbaru dan terendah di Kecamatan Cempaka yaitu sebanyak 35.584 jiwa atau sekitar 14,04% dari seluruh penduduk di Kota Banjarbaru.

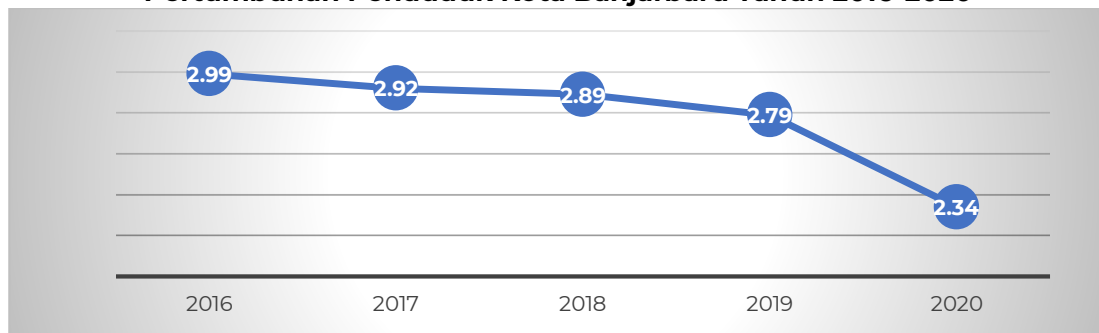
Grafik 2.1
Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020



Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021 diolah

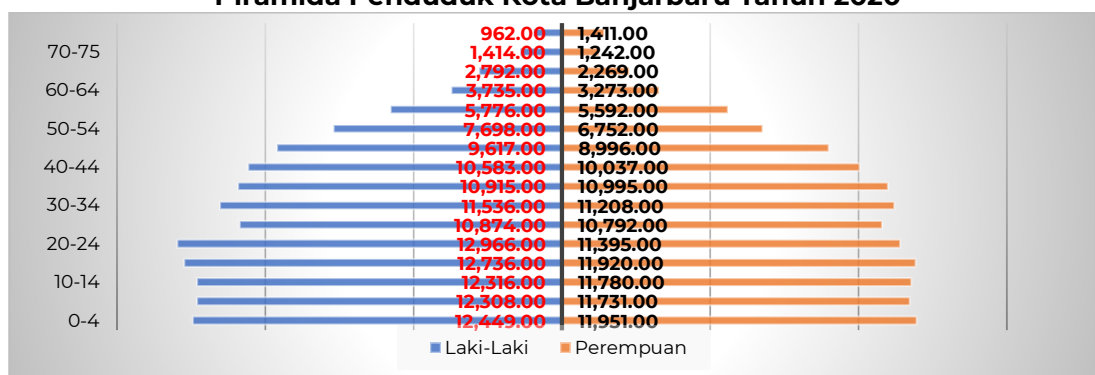
Meskipun jumlah penduduk Kota Banjarbaru semakin bertambah seiring tahun, namun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk ini dapat dilihat dalam gambar 2.2 di bawah ini.

Grafik 2.2
Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020



Sumber: KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021 diolah

Grafik 2.3
Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2021.

Walaupun pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru masih cukup tinggi, namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami penurunan pertumbuhan, dari 2,99% pada tahun 2016 menjadi 2,34% pada tahun 2020. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebagian besar disebabkan oleh tingginya migrasi ke Kota Banjarbaru. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis karena posisinya bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan, tetapi juga SDM akan berperan sebagai perencana dan pelaksana program-program pembangunan itu sendiri.

Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik, namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membuat sebuah kebijakan agar pertumbuhan penduduk menjadi suatu modal yang potensial bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan.

2. Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan bila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karenanya program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan akhir pembangunan manusia itu sendiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 disebutkan bahwa Program KB adalah merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian, kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

Jumlah akseptor Keluarga Berencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2020 tercatat sebanyak 30.318 akseptor KB aktif, sedangkan akseptor Keluarga Berencana baru sebanyak 5.971. Setiap tahunnya, jumlah akseptor Keluarga Berencana aktif di Kota Banjarbaru mengalami fluktuasi, di mana terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan dari 6.623 akseptor pada tahun 2016 menjadi 4.982 akseptor pada tahun 2017. Namun, tahun 2017 hingga tahun 2020, selalu mengalami kenaikan jumlah akseptor Keluarga Berencana. Data jumlah akseptor Keluarga Berencana Aktif menurut jenis kontrasepsi di Kota Banjarbaru disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Perkembangan Akseptor Keluarga Berencana Aktif Tahun 2016-2020

No	Jenis Kontrasepsi	2016	2017	2018	2019	2020
1	IUD	1.188	1.219	1.320	1.469	1.265
2	MOP	78	70	83	84	88
3	MOW	587	551	564	579	647
4	Implan	1.462	1.279	1.519	1.671	2.260
5	Suntikan	13.118	12.840	13.228	13.579	14.172
6	PIL	10.600	10.886	11.085	11.915	10.765
7	Kondom	753	686	776	1.401	1.121
Kota Banjarbaru		6.623	4.982	5.124	5.798	5.971

Sumber : KDA, BPS Kota Banjarbaru, 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa

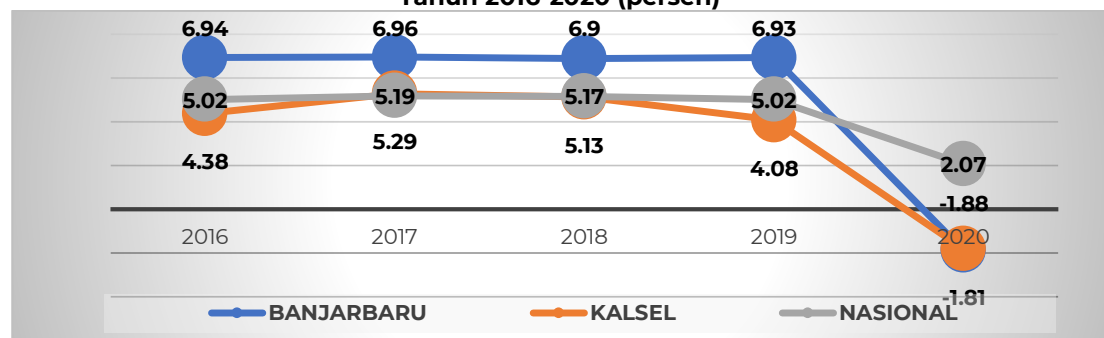
yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2020 adalah sebesar -1,88 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh adanya pandemi global COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dengan tidak adanya aktivitas ekonomi yang terjadi di masa pandemi. Pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi terjadi peningkatan yang positif pada kisaran 3-4 persen, namun pada kuartal kedua dan tiga terjadi kontraksi dibawah minus 4-5 persen yang disebabkan adanya kebijakan masa Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun pada kuartal keempat kembali terjadi peningkatan pertumbuhan dari kuartal sebelumnya dengan di bukanya kembali transportasi udara dan aktivitas perekonomian dengan protokol kesehatan, namun pertumbuhannya masih berada pada kisaran minus 1-2 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi dan nasional sebagaimana tersaji dalam grafik 2.4 di bawah ini.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

Sektor dominan pembentuk perekonomian adalah pada sektor tersier yaitu (1) transportasi & pergudangan, (2) konstruksi, (3) administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib, (4) perdagangan besar & eceran, (5) jasa Pendidikan. Hal ini disebabkan karena Kota Banjarbaru tidak memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, selain itu juga disebabkan karakteristik Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah permukiman dan perkantoran. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan besaran PDRB Kota Banjarbaru menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 4
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Sektoral	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	110,27	116,74	121,89	126,11	124,73
2.	Pertambangan dan Penggalian	204,38	220,75	236,62	250,20	252,99
3.	Industri Pengolahan	411,84	433,19	456,52	476,01	472,77
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,90	12,04	13,13	13,76	14,44
5.	Pengadaan Air	31,79	34,22	36,53	38,99	40,55
6.	Konstruksi	787,14	846,83	904,09	970,21	928,63
7.	Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	553,79	598,23	645,85	695,89	674,41
8.	Transportasi dan Pergudangan	998,96	1078,91	1164,44	1243,44	1105,13
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	141,51	153,45	165,64	178,74	177,79
10.	Informasi dan Komunikasi	279,31	303,70	324,67	347,13	373,23
11.	Jasa Keuangan	91,32	96,81	102,69	107,01	109,34
12.	Real Estate	122,15	130,75	138,16	146,64	154,23
13.	Jasa Perusahaan	21,80	23,46	25,23	26,97	26,46
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	618,09	630,50	654,67	707,29	717,20
15.	Jasa Pendidikan	465,43	504,02	548,52	592,46	615,34
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,26	177,44	191,44	205,78	221,76
17.	Jasa Lainnya	89,01	95,82	103,43	111,36	110,22
PDRB		5101,95	5456,87	5833,52	6238,02	6119,22

Ket: *angka sementara; **angka sangat sementara

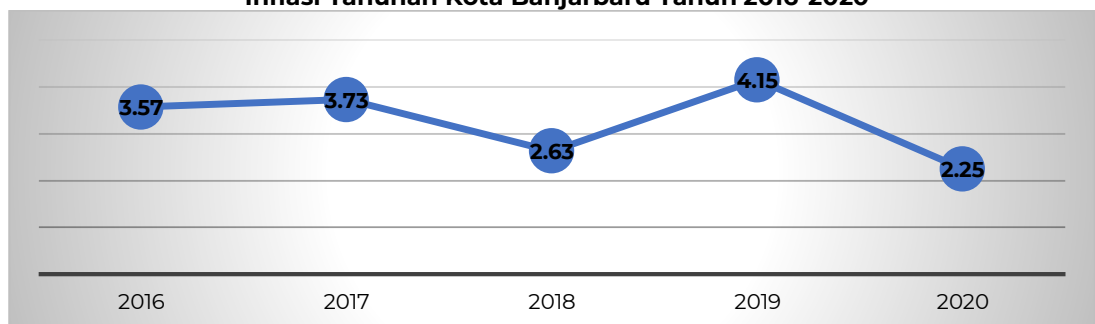
Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continuous) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Inflasi Kota Banjarbaru disejajarkan dengan inflasi Kota Banjarmasin. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tingkat inflasi (tahunan) di Kota Banjarmasin mengalami tren penurunan yang cukup baik. Namun, pada tahun 2019, angka inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Angka inflasi pada tahun 2016 mencapai 3,57%, kemudian naik menjadi 3,73 pada tahun 2017 lalu mengalami penurunan hingga 2,63% pada tahun 2018, namun mengalami kenaikan menjadi 4,15% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, inflasi mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 2,25%, sebagaimana tersaji pada grafik 2.5 di bawah ini.

Grafik 2.5
Inflasi Tahunan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020



Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021; Bank Indonesia, 2021

3. PDRB per Kapita

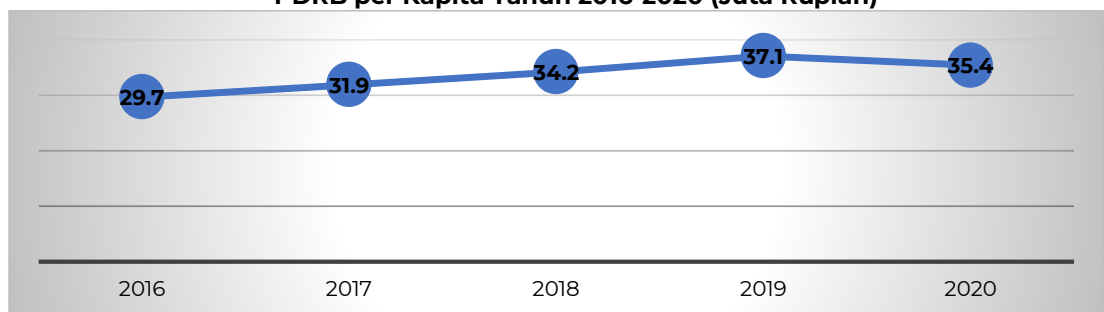
Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019 PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) naik dari Rp 21.138,- pada tahun 2016 menjadi Rp 23.774,- pada tahun 2019. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik dari Rp 29.719,- pada tahun 2015 menjadi Rp 37.087,- pada tahun 2019. Penurunan terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK Kota Banjarbaru Tahun 2016–2020 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2. 5
PDRB per Kapita Tahun 2016-2020

PDRB per Kapita	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Konstan (Rp. 000,-)	21.138	21.966	22.823	23.744	22.660
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. 000,-)	29.719	31.935	34.185	37.087	35.470

Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

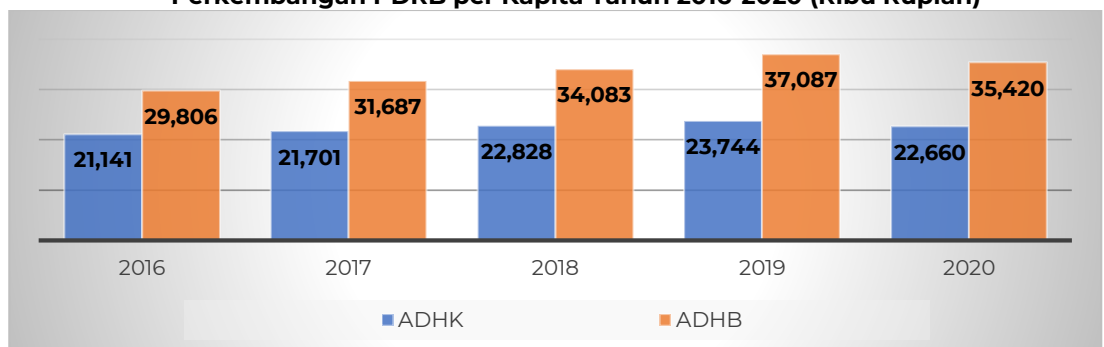
Grafik 2.6
PDRB per Kapita Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : KDA-BPS, 2021

Peningkatan pendapatan per kapita ini diharapkan dapat diikuti dengan pemerataan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian tumbuhnya perekonomian tidak hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru.

Grafik 2. 7
Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

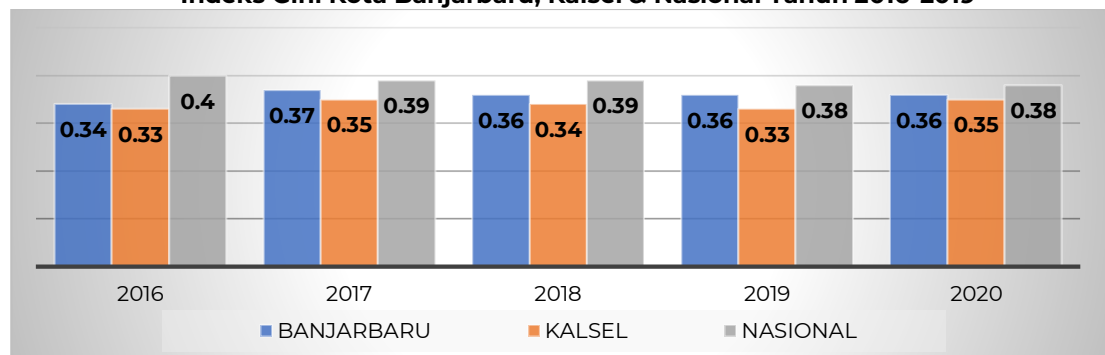


Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

4. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Gini ratio berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan nilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Gini ratio Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir ini relatif stabil walaupun ada sedikit fluktuasi. Pada tahun 2016 gini rasio Kota Banjarbaru sebesar 0,34, dan terjadi fluktuasi pada tahun-tahun selanjutnya, namun pada tahun 2020, gini rasio Kota Banjarbaru bertahan pada angka 0,36 sama seperti tahun 2018 dan 2019. Perubahan indeks gini di Kota Banjarbaru rata-rata hanya pada 0,01 point yang mencerminkan bahwa pemerataan menunjukan pada arah sempurna. Pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh besar terhadap Kota Banjarbaru, hal ini mayoritas penduduk Kota Banjarbaru merupakan pekerja formal yang secara pendapatan tidak berpengaruh terhadap pandemi COVID-19, sedangkan untuk pekerja informal di dominasi oleh jasa perdagangan yang pada saat masa pandemi masih merupakan kebutuhan primer masyarakat dan mekanisme transaksi jual beli dilakukan secara online. Adapun perkembangan data gini rasio sebagaimana disajikan pada grafik 2.8 di bawah ini.

Grafik 2.8
Indeks Gini Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional Tahun 2016-2019



Sumber : KDA-BPS, 2021

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

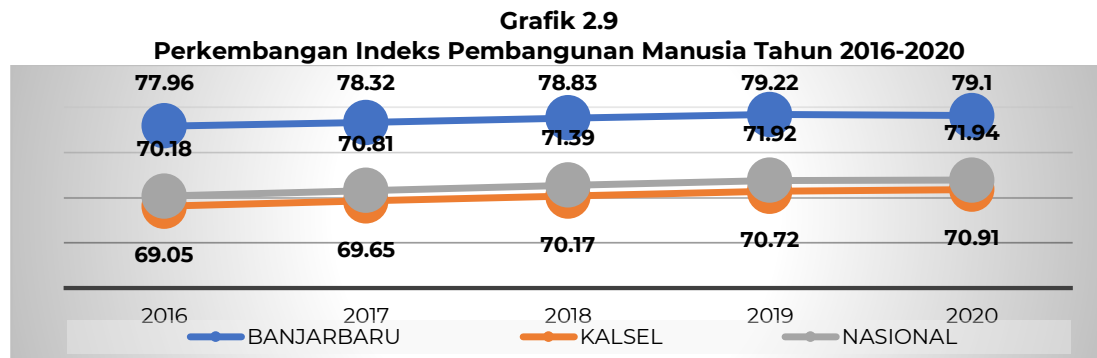
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu kesehatan, yang diukur dengan usia harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat ekonomi dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

IPM Kota Banjarbaru selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun ke tahun angka IPM Kota Banjarbaru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPM kabupaten/kota. Angka IPM Kota Banjarbaru tahun 2020 adalah sebesar 79.10 point dan masih melampaui target yang telah di sesuaikan pada perubahan RKPD 2020 yakni sebesar 79,00.

Pada tahun 2020 IPM Kota Banjarbaru tidak terlalu berpengaruh besar dengan adanya dampak pandemi COVID-19 hal ini disebabkan dari 3 (tiga) variabel pembentuk IPM hanya pada pengeluaran per kapita saja terjadi penurunan,

sedangkan untuk angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masih terjadi peningkatan.



Sumber : KDA-BPS, 2021

2. Pendidikan

Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga penggerak pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil yang dicapai oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas.

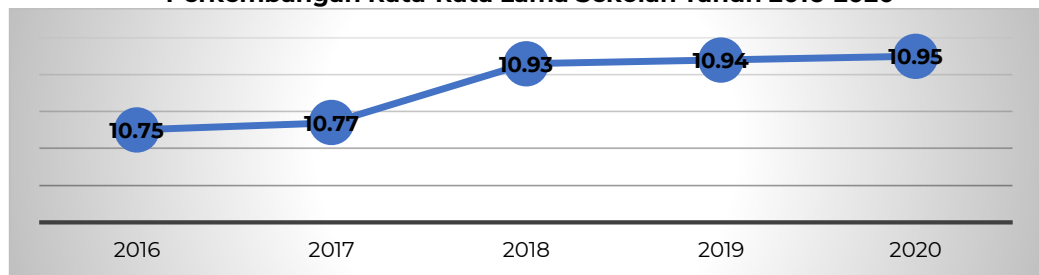
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga penggerak pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil yang dicapai oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas. Pencapaian hasil pembangunan dalam dimensi pendidikan diukur dengan beberapa variabel, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

a. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling/MYS) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang lain dari dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru pada tahun 2020 adalah sebesar 10,95 tahun, meningkat sebesar 0.01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai sebesar 10,94 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru sudah sampai pada tingkatan tahun kedua SMA. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup baik.

Grafik 2.10
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020

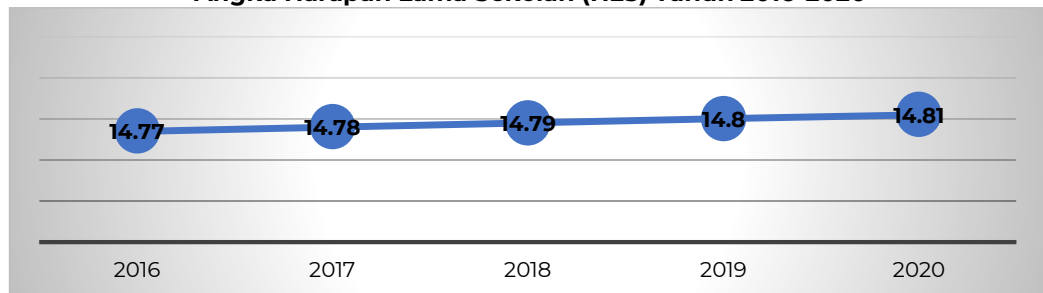


Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2.11
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2016-2020



Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

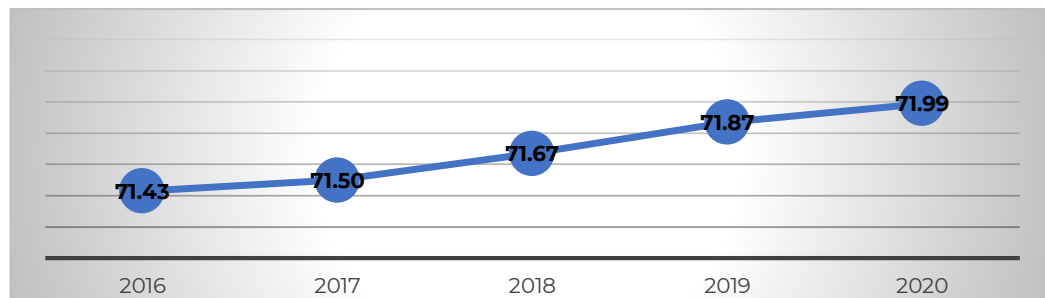
Berdasarkan Gambar 2.11 di atas, angka harapan lama sekolah Kota Banjarbaru pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,04 tahun dari sebesar 14,77 tahun 2016 naik menjadi 14,81 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir pada tahun 2020 memiliki kemungkinan untuk dapat mengenyam Pendidikan selama 14,81 tahun. Angka harapan lama sekolah di Kota Banjarbaru ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya jumlah lanjut usia.

Grafik 2.12
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Tahun 2016-2020



Sumber : KDA-BPS Kota Banjarbaru, 2021

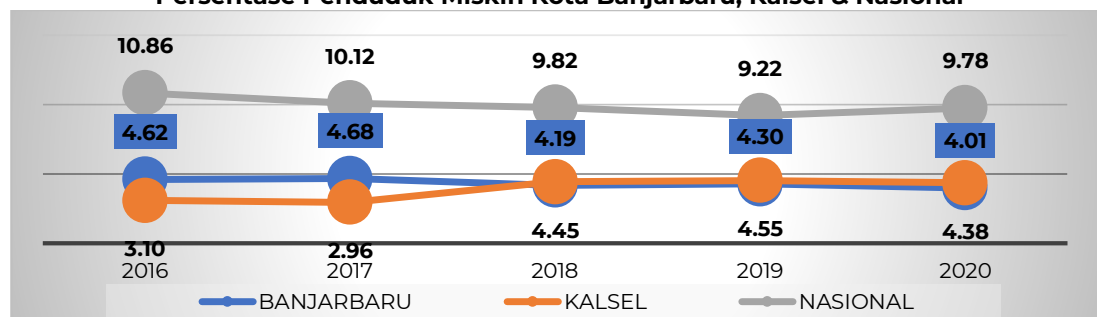
Angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru selama periode tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru adalah 71,43 tahun, meningkat sebesar 0,56 poin menjadi 71,99 tahun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kota Banjarbaru. Angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap tahunnya, karena merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak berdaya, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Angka kemiskinan terutama untuk kemiskinan makro, dihitung berdasarkan garis kemiskinan dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari.

Grafik 2.13
Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional



Sumber : KDA-BPS, 2021

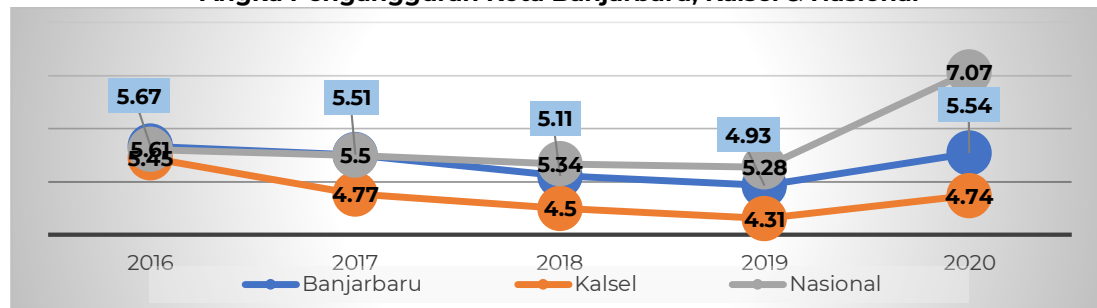
Persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru dalam rentang tahun 2016-2020 selalu terjadi fluktuasi, dari persentase penduduk miskin sebesar 4,90% pada tahun 2016, pada tahun 2017 naik menjadi 4,68% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 yakni menjadi sebesar 4,19%. Namun, persentase ini mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 menjadi 4,30%. Pada tahun 2020, dengan adanya pandemic COVID-19, angka kemiskinan nasional naik. Namun, angka kemiskinan Kota Banjarbaru yang ditargetkan sebesar 4,81% pada Perubahan RKPD untuk mengantisipasi dampak pandemi, ternyata capaiannya adalah sebesar 4,01%.

5. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, sehingga pemerintah di harapkan dapat mengatasi persoalan pengangguran dengan berbagai kebijakan.

Angka pengangguran di Kota Banjarbaru tahun 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dari angka sebesar 5,67% pada tahun 2016 hingga turun menjadi 4,93% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan menjadi 5,54%. Adanya peningkatan pengangguran pada tahun 2020 di sebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja pada sektor jasa dan perdagangan akibat tidak terjadinya aktivitas perekonomian dampak pandemi COVID-19. Adapun data angka pengangguran di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2019 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Grafik 2.14 di bawah ini.

Grafik 2.14
Angka Pengangguran Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional



Sumber : KDA-BPS, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan penyelenggaraan urusan Pendidikan dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga berdaya saing tinggi. Tabel berikut memaparkan capaian penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kota Banjarbaru selama tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 6
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal dan Non Formal	%	69,63	55,72	72,73	74,38	94,52	79,96	Tercapai
2. Rerata Hasil Post Test PKB PAUD	%	67	68	69	70	-	-	Tercapai
3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	111,87	116,54	113,35	113,45	106,37	113,55	Belum Tercapai
4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	105,96	99,08	98	99	107,99	100	Tercapai
5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB/Paket A	%	100,29	97,81	96,56	96,66	95,87	96,76	Belum Tercapai
6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	88,74	81,77	82	83	90,38	84	Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
7. Persentase satuan SD yang terakreditasi	%	91,14	94,94	97,47	100	98,70	100	Belum Tercapai
8. Persentase satuan SMP yang terakreditasi	%	81,82	91,00	100	100	100	100	Belum Tercapai
9. Persentase Sekolah Hijau SD (Adiwiyata)	%	27,85	74,68	87,34	100	77,53	100	Belum Tercapai
10. Persentase Sekolah Hijau SMP (Adiwiyata)	%	45,45	54,55	63,64	69,57	70,83	82,61	Belum Tercapai
11. Persentase Indikator SPM SD	%	68,35	90,00	95	97,00	99,13	99	Tercapai
12. Persentase Indikator SPM SMP	%	68,35	90,00	95	97,00	85,21	99	Belum Tercapai
13. Persentase Satuan Pendidikan/SD yang sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter	%	N/A	6,33	6,33	6,33	6,33	12,66	Belum Tercapai
14. Persentase Satuan Pendidikan/SMP yang sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter	%	N/A	13,64	13,64	13,64	13,64	27,28	Belum Tercapai
15. Angka Putus Sekolah SD	%	0,01	0,00	0	0	0	0	Tercapai
16. Angka Putus Sekolah SMP	%	0,01	0,39	0	0	0	0	Tercapai
17. Angka Kelulusan SD	%	100	100,00	100	100	100	100	Tercapai
18. Angka Kelulusan SMP	%	100	89,69	100	100	100	100	Tercapai
19. Angka Melanjutkan Siswa SD	%	98,87	98,87	99,22	100	100	100	Tercapai
20. Angka Melanjutkan Siswa SMP	%	98,99	92,68	94,68	100	100	100	Tercapai
21. Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,70	99,40	99,55	99,69	99,27	100	Belum Tercapai
22. Persentase satuan PNF yang terakreditasi secara lokal	%	7,27	14,55	21,82	29,09	71	36,36	Tercapai
23. Angka Kelulusan Paket A	%	100	100	100	100	49,74	100	Belum Tercapai
24. Angka Kelulusan Paket B	%	100	100	100	100	86,81	100	Belum Tercapai
25. Angka Kelulusan Paket C	%	100	100	100	100	97	100	Belum Tercapai
26. Rerata Hasil Post Test PKB PAUD	%	67	68	69	70	-	75	Tercapai
27. Rerata Hasil Post Test PKB SD	%	64,49	65,50	67	68	-	70	Tercapai
28. Rerata Hasil Post Test PKB SMP	%	66,31	67	68	69	-	75	Belum Tercapai
29. Persentase keluhan pengaduan layanan pendidikan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
30. Persentase satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi secara lokal	%	7,27	14,55	21,82	29,09	71	36,36	Tercapai

Urusan pendidikan memiliki sebanyak 30 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 46,66 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 53,34 persen belum tercapai target.

2. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2. 7
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	%	81	82	83	84	86	85	Tercapai
2. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	50	55	60	65	100	70	Tercapai
3. Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	%	67	70	73	76	100	79	Tercapai
4. Persentase Instalasi farmasi kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	%	62	64	66	68	62	70	Belum Tercapai
5. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6. Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Pkm	8	9	9	9	10	10	Tercapai
7. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Pkm	8	9	9	9	10	10	Tercapai
8. Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	Pkm	8	9	9	9	10	10	Tercapai
9. Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	Pkm	8	9	9	9	10	10	Tercapai
10. Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indera	Pkm	8	9	9	9	10	10	Tercapai
11. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	%	60	63	66	70	N/A	73	Belum Tercapai
12. Cakupan UKBM yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
13. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
14. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	95	95,5	96	96,5	87,90	97	Belum Tercapai
15. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	55	57,7	60	65	65,24	70	Belum Tercapai
16. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	100	87,99	100	Belum Tercapai
17. Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	50	55	60	65	16,49	70	Belum Tercapai
18. Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	%	20	20	20	20	20	20	Tercapai
19. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	3	8	15	21	96,6	27	Tercapai
20. Persentase tempat umum yang memenuhi syarat Kesehatan	%	86	88	90	92	92,6	95	Belum Tercapai
21. Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Kesehatan	%	86	88	90	92	92,4	95	Belum Tercapai
22. Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan kota sehat	Kec	5	5	5	5	5	5	Tercapai
23. Persentase kasus HIV yang ditemukan dan diobati	%	90	90	90	90	74,19	90	Belum Tercapai
24. Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa)	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,13	0,3	Belum Tercapai
25. Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti-Retroviral Treatment (ART)	%	95	95	95	95	43,61	95	Belum Tercapai
26. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berpengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	%	69	70	71	72	N/A	73	Belum Tercapai
27. Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta yang legal	Buah	232	256	288	316	207	347	Belum Tercapai
28. Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD	Pkm	2	4	6	8	9	9	Tercapai
29. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Pkm	2	4	5	5	5	5	Tercapai
30. Persentase jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang dilayani ditingkat lanjutan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
31. Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	Rasio	1:30.000	1:30.000	1:30.000	1:30.000	1:24.028	1:30.000	Belum Tercapai
32. Cakupan kepesertaan JKN BPJS	%	70	80	90	100	72,32	100	Belum Tercapai
33. Prosentase tenaga medis dan non medis yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan ilmu kesehatan secara berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
34. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	%	45	47,5	50	52,5	76,65	55	Tercapai
35. Persentase kunjungan neonatal pertama (KNI)	%	99,6	99,6	99,6	99,6	93,85	99,6	Belum Tercapai
36. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
37. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
38. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja	%	60	70	80	85	60	90	Belum Tercapai
39. Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
40. Persentase puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
41. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	94	95	96	97	89	98	Belum Tercapai
42. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
43. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I)	%	7	10	20	30	40	40	Tercapai
44. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	91,5	92	92,5	93	81,2	93,5	Belum Tercapai
45. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	%	65	70	75	80	89	85	Tercapai
46. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	85	85	85	85	100	85	Tercapai
47. Persentase kasus HIV yg di temukan dan di obati	%	90	90	90	90	74,19	90	Belum Tercapai
48. Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu	%	20	20	20	20	20	20	Tercapai
49. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) penyakit Tidak Menular	%	20	40	60	70	95	80	Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
50. Angka Bebas Jentik (ABJ $\geq$ 95 %)	%	>95	>95	>95	>95	73,65	>95	Belum Tercapai
51. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (Annual Paracitelen Inciden)	Angka	<1/1.000	<1/1.000	<1/1.000	<1/1.000	0,099	<1/1.000	Tercapai
52. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria yang di laporkan dan ditanggulangi	%	100	100	100	100	N/A	100	Tercapai
53. Angka notifikasi kasus Tuberculosis (Case Notification Rate)	%	5	5	5	5	96/100.000	5	Tercapai
54. Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis	%	90	90	90	90		90	Tercapai
55. Jumlah kasusdiare per 1.000 penduduk	Pddk	<285/1.000	<285/1.000	<285/1.000	<285/1.000	205	<285/1.000	Tercapai
56. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB	%	<1	<1	<1	<1	-	<1	Tercapai
57. Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pneumonia balita	Balita	<10	<10	<10	<10	5.172	<10	Belum Tercapai
58. Angka penemuan kasus baru (New case detection rate / NCDR) kusta per 100.000 penduduk	%	<5	<5	<5	<5	1,1	<5	Tercapai
59. Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI	%	100	100	100	100	85	100	Belum Tercapai
60. Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	%	97	97	97	97	74,19	97	Belum Tercapai
61. Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 tahun	Kasus	2	2	2	2	0	2	Tercapai
62. Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam	%	80	80	80	80	100	80	Tercapai
63. Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	Orang	500	500	500	500	41,380	500	Tercapai
64. Persentase kasus gigitan hewan tersangka rabies yang ditangani	%	100	100	100	100	69	100	Belum Tercapai
65. Cakupan Penyakit Tidak Menular yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
66. Cakupan jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan Olah Raga	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan kesehatan memiliki sebanyak 66 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 62,12 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 37,88 persen belum tercapai target.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase Panjang jalan dalam keadaan baik dan sedang	%	95,33	95,52	96,12	96,94	N/A	97,87	Belum Tercapai
2. Persentase saluran drainase kota yang berfungsi dengan baik	%	87,11	88,63	90,13	91,61	93,06	93,06	Tercapai
3. Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	%	71,51	79,04	76,65	73,56	77,13	73,95	Tercapai
4. Persentase tingkat jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%	81,72	84,68	84,86	85,09	85,13	85,36	Belum Tercapai
5. Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan yang baik dan sedang	%	36,52	49,68	60,38	69,06	76,31	77,73	Belum Tercapai
6. Persentase alat berat dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7. Persentase kinerja sistem irigasi	%	22,89	32,67	41,63	71,94	72,80	74,87	Belum Tercapai
8. Persentase penanganan titik rawan banjir	%	25	35	50	55	60	60	Tercapai
9. Persentase sarana publik dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	99,70	100	Belum Tercapai
10. Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	75,87	79,53	88,95	97,86	95,40	100	Belum Tercapai
11. Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	85,82	84,4	88,06	92,68	100	96,93	Tercapai
12. Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yang bisa diakses public	%	33,33	33,33	41,66	49,99	100	49,99	Tercapai
13. Indeks kepuasan masyarakat di bidang Tata Ruang	Opini	Baik (70)	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik 2	Sangat Baik 2	Tercapai
14. Penurunan ketidaksesuaian/pelanggaran pemanfaatan ruang	%	6	5	4	4			Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
15. Indeks kepuasan masyarakat di bidang Pengembangan Konstruksi	Opini	-	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai
16. Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
17. Persentase paket pekerjaan yang terawasi kualitas dan kuantitas pekerjaannya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
18. Persentase jumlah lokasi RTH publik yang dibangun	%	30	40	55	70	85	85	Tercapai

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sebanyak 18 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 66,67 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 33,33 persen belum tercapai target.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Penurunan rumah tidak layak huni	%	0,5	0,47	0,42	0,37	0,83	0,32	Tercapai
2. Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	5	15	25	35	45	45	Tercapai
3. Penurunan luas kawasan permukiman kumuh	%	0,99	0,89	0,78	0,67	0,25	0,56	Tercapai
4. Cakupan taman dalam kondisi baik	%	10,64	23,4	46,94	65,96	82,98	82,98	Tercapai
5. Cakupan TPU dalam kondisi baik	%	6,78	13,56	20,22	26,97	60	33,52	Tercapai
6. Cakupan PJU dalam kondisi baik	%	46,51	50,58	59,67	68,76	78,97	77,27	Tercapai

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki sebanyak 6 indikator dan telah tercapaian sebesar 100 persen.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Cakupan Potensi Konflik Yang Ditangani	%	0	0	0	0	0	0	Tercapai
2. Cakupan Persentase Pembinaan/Sosialisasi tentang wasbang dan kesadaran bela negara	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Cakupan Potensi Konflik bernuansa SARA yang ditangani	%	100	100	-	-	-	-	Tercapai
4. Cakupan tingkat partisipasi pendidikan politik	%	64	70	70	70	37,50	70	Belum Tercapai
5. Persentase Peningkatan jumlah Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6. Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7. Meningkatnya Jumlah Petugas Linmas Yang Dibina	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8. Persentase Kasus/Pelanggaran Perda Perkada Yang Ditidak Lanjuti	%	100	100	100	100	93	100	Belum Tercapai
9. Meningkatnya Jumlah Pos Kamling	%	34	39	40	48	0	56	Belum Tercapai
10. Meningkatnya Petugas Keamanan Lingkungan	%	12	26	41	58	0	79	Belum Tercapai
11. Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
12. Persentase pelaksanaan pencegahan dini terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

	Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
13.	Persentase Tertanganinya Korban Bencana	%	N/A	N/A	100	100	100	100	Tercapai
14.	Persentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap Darurat Bencana	%	80	82	85	88	100	92	Tercapai
15.	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pasca Bencana	%	N/A	N/A	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki sebanyak 15 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 73,33 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 26,67 persen belum tercapai target.

6. Urusan Sosial

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Sosial Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2. 11
Capaian Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2016-2020

	Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase pemutakhiran data fakir miskin berdasarkan data terpadu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Prosentase tuna sosial	%	41	50	59	64	64	64	Tercapai
3.	yang dibina dan direhabilitasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4.	Prosentase pembinaan dan pelayanan kepada PMKS di rumah singgah	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5.	Persentase Organisasi Sosial yang diberdayakan	%	62,5	70	75	87,5	75	87,5	Belum Tercapai
6.	Persentase Kesejahteraan Sosial bagi para pejuang dan kepahlawanan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7.	Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu	%	56,74	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	Tercapai

Urusan sosial memiliki sebanyak 7 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 85,71 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 85,71 persen belum tercapai target.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2. 12
Capaian Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

	Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	%	9,79	12,93	8,47	8	17,46	7,57	Tercapai
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	50	55	60	100	65	Tercapai
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	4,77	22,26	23,52	25	21,01	26,31	Belum Tercapai
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	88,88	100	100	100	100	100	Tercapai
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	57,14	66,67	66,8	67	57,14	67,5	Belum Tercapai
7.	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	Angka	40,58	26,08	25	24	12,43	23	Tercapai
8.	Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	58,83	68,83	71,5	74,18	78,74	76,86	Tercapai
9.	Persentase Perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP	%	74,78	75	75,78	75,98	48,85	76,19	Belum Tercapai
10.	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	%	9,85	10,34	10,82	11,29	4,62	11,76	Belum Tercapai

Urusan tenaga kerja memiliki sebanyak 10 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 60,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 40,00 persen belum tercapai target.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2. Persentase Kelurahan Yang Layak Anak	%	0	20	40	15	35	15	Tercapai
3. Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	%	3	15	33	57	30	94	Belum Tercapai
4. Meningkatnya Pembinaan terhadap Organisasi Perempuan di Kota Banjarbaru	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase kelompok usaha perempuan P2WKSS di Kelurahan dan Persentase Satgas GSI	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 80,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 20,00 persen belum tercapai target.

3. Urusan Pangan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Ketersediaan Sembilan (9) kelompok bahan pangan	Scoring	73,59	80,09	82	84	80,11	86	Belum Tercapai
2. Persentase sarana media elektronik dan media cetak yang dapat dijangkau oleh penyuluh pertanian dan masyarakat petani	%	46	66	66	88	100	88	Tercapai
3. Persentase kenaikan kelas BPP	%	25	25	25	50	50	50	Tercapai

Urusan Pangan memiliki sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 66,67 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 33,33 persen belum tercapai target.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Tingkat Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014	Indeks	44,66	40,67	41	42	56,67	43	Tercapai
2. Persentase sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Persentase peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4. Tingkat kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu . Indeks Kualitas Udara = Rerata pemantauan (NO2 dan SO2) x Bobot Indeks	Indeks	83,62	82,52	82,72	82,92	86,67	83,12	Tercapai
5. Persentase Sampah yang terangkut dari TPS ke TPA	%	N/A	100	100	100	91	100	Belum Tercapai
6. Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola secara 3R di sumber per tahun	%	N/A	8	8	10	12	12	Tercapai

Urusan Lingkungan Hidup memiliki sebanyak 6 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 83,33 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 16,67 persen belum tercapai target.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2. 16
Capaian Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk	%	100	100	100	100	92,36	100	Belum Tercapai
2. Persentase bayi berakte kelahiran	%	100	100	100	100	77.62	100	Belum Tercapai
3. Persentase pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	53	100	Belum Tercapai
4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	Sudah	sudah	sudah	Sudah	Sudah	Tercapai
5. Cakupan penerbitan KTP Elektronik	%	100	100	100	100	92.36	100	Belum Tercapai
6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	51.61	100	Belum Tercapai

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki sebanyak 6 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 16,67 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 83,33 persen belum tercapai target.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2. 17
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase Peningkatan Kontribusi Masyarakat Dalam Membangun Wilayah Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2. Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Persentase TP. PKK yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase Posyandu yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Tercapainya TTG berprestasi di Tingkat Provinsi	Karya	2	2	2	2	-	2	Tercapai

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen yang telah mencapai sesuai target.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2. 18
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif	%	72,57	73,48	74.43	76	75,65	80	Belum Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2. Total Fertility Rate (TFR)	TFR	1FR2.5	1FR2.5	1FR2.4	1FR2.3	1FR2,68	1FR2,2	Belum Tercapai
3. Rata-Rata Jumlah Anak Per-Keluarga	orang	4	3	3	2	3	2	Belum Tercapai
4. Ratio Akseptor KB	%	71,09	71,19	71,52	71,8	76	72,2	Tercapai
5. Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR	CPR	68,02	68,02	69	70	75,65	70,4	Tercapai
6. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,3	6,3	6	5,9	10,3	5,8	Belum Tercapai
7. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	10,5	11,32	12	12,5	14,49	13	Tercapai
8. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	14,2	15,3	15,6	16,1	12,7	16,5	Belum Tercapai
9. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	orang	21	20	20	20	20	20	Tercapai
10. Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Kelurahan	orang	1	1	1	1	1	1	Tercapai
11. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
12. Cakupan Tri Bina Keluarga yang ber-KB	%	100	100	100	100	80	100	Belum Tercapai
13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kec	1	1	1	2	5	2	Tercapai
14. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	72	73	75	76	78	77	Tercapai
15. Cakupan Keluarga Yang mempunyai Balita dan Anak yang memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	38	40	45	50	75	55	Tercapai
16. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 Perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	WUS	20,59	18,25	17,2	16,5	21,4	16,2	Belum Tercapai
17. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	%	0,03	0,027	0,021	0,019	0,03	0,14	Tercapai
18. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	15	19	19	19	20	20	Tercapai
19. Persentase Rata-Rata Usia Kawin Pertama	%	N/A	94,68	95,15	96,30	96,5	97	Belum Tercapai
20. Cakupan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
21. Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Kota Banjarbaru	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
23. Persentase tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan KB di Kota Banjarbaru	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
24. Persentase tersedianya Operasional KKBPK Lini Lapangan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sebanyak 24 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 66,67 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 33,33 persen belum tercapai target.

8. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2. 19
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	%	85	85	90	90	74	90	Belum Tercapai
2. Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	80	100	Belum Tercapai
3. Persentase beroperasi angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	%	80	80	85	90	18	95	Belum Tercapai
4. Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang laik jalan	%	100	100	90	90	42	90	Belum Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
6. Tingkat alat uji pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar Pengujian	%	N/A	N/A	N/A	100	100	-	Tercapai

Urusan Perhubungan memiliki sebanyak 6 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 33,33 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 66,67 persen belum tercapai target.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2. 20
Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase tindaklanjut pengaduan oleh unit kerja yang berwenang	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
2. Persentase KIM yang dibina	%	N/A	15	40	65	90	90	Tercapai
3. Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media komunikasi public	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase isu public yang ditanggapi oleh masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase PPID Utama dan Pembantu yang aktif	%	N/A	10	80	100	100	100	Tercapai
6. Layanan internet dengan Dedicated terpasang dengan SLA minimal 99% dan Broadband terpasang	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
7. Persentase radio dan fiber optic terpasang dan telah digunakan unit kerja	%	N/A	14	28	36	53	53	Tercapai
8. Persentase pemenuhan indikator SPBE	%	N/A	23	40	50	60	60	Tercapai
9. Persentase unit kerja yang telah menggunakan website dengan domain banjarbaru.go.id yang aktif	%	N/A	29	43	58	80	80	Tercapai
10. Persentase pengadaan barang dan jasa telah menggunakan LPSE	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
11. Persentase SDM TIK yang kompeten	%	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
12. Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	6	15	78	25	Tercapai

Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki sebanyak 12 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen yang telah mencapai sesuai target.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini.

Tabel 2. 21
Capaian Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	%	8,41	24,74	29,98	34,31	23,86	39,14	Belum Tercapai
2. Persentase UMKM yang mendapat perluasan akses pasar	%	2,46	2,92	3,29	3,75	2,26	4,2	Belum Tercapai
3. Jumlah Kelurahan yang memiliki produk unggulan	Kel	5	7	9	11	13	13	Tercapai
4. Jumlah Wirausaha / UMKM Baru	UMKM	43	75	81	89	723	90	Tercapai
5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	100	100	99	99	25,55	99	Belum Tercapai
6. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	LKM	0	2	4	6	8	8	Tercapai
7. Persentase BPR/LKM aktif	%	32,56	32,56	34,88	35,63	36,36	36,36	Tercapai
8. Persentase Koperasi Aktif	%	68,78	69,56	70,18	70,80	76,47	71,42	Tercapai

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki sebanyak 8 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 62,50 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 37,50 persen belum tercapai target.

11. Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini.

Tabel 2. 22
Capaian Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Investor yang menjalin kerjasama investasi (PMA dan PMDN)	Investor	20	20	22	25	18	27	Belum Tercapai
2. Izin Penanaman Modal yang diterbitkan	Pershn/ SK	15/21	20/23	25/25	30/27	18/18	35/29	Belum Tercapai
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	81,35	80	80,5	81	81,1	81,1	Tercapai
4. Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan	SK	3137	3138	3160	3180	8303	3190	Tercapai

Urusan Penanaman Modal memiliki sebanyak 4 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 50,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 50,00 persen belum tercapai target.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2. 23
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	Buah	N/A	32	33	34	3	35	Belum Tercapai
2. Persentase sarana prasarana olahraga yang terpelihara	%	100	100	100	83	100	83	Tercapai
3. Jumlah cabang olahraga yang di bina	Cabor	50	14	16	14	45	16	Tercapai
4. Persentase pelaksanaan event olahraga masyarakat secara rutin	Jumlah Event	8	57	66	80	80	86,5	Belum Tercapai

Urusan Kepemudaan dan Olahraga memiliki sebanyak 4 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 50,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 50,00 persen belum tercapai target.

13. Urusan Statistik

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Statistik Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2. 24
Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase penyajian informasi publik khususnya data statistik sectoral	%	N/A	37,5	50	75	100	100	Tercapai
2. Buku "Statistik Kota Banjarbaru"	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3. Buku "Indikator Makro Kota Banjarbaru"	Ada/Tidak	N/A	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

Urusan statistik memiliki sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen yang telah mencapai sesuai target.

14. Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2. 25
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	Capaian 2018	2019	2020	Target 2020	Interpretasi
1. Organisasi /Grup Kesenian yang dibina	Grup	54	54	54	54	54	54	Tercapai
2. Jumlah Peninggalan sejarah yang dilestarikan	Buah	13	14	15	16	3	17	Belum Tercapai

Urusan Kebudayaan memiliki sebanyak 2 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 50,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 50,00 persen belum tercapai target.

15. Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2. 26
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	Capaian 2018	2019	2020	Target 2020	Interpretasi
1. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Pengunjung	51.00	53.00	66.06	67.06	17.031	68.067	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya Layanan Perpustakaan	%	0	0	7	7	34,06	100	Tidak Tercapai

Urusan Perpustakaan memiliki sebanyak 2 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 0 persen yang telah mencapai sesuai target atau tidak tercapai.

16. Urusan Kearsipan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut ini.

Tabel 2. 27
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	Capaian 2018	2019	2020	Target 2020	Interpretasi
1. Terdata dan tertatanya Arsip In Aktif	SKPD	5	5	7	7	22	7	Tercapai
2. Persentase terpeliharanya dan Tertatanya Arsip	%	-	100	100	100	69	100	Belum Tercapai
3. Persentase terpeliharanya Sarana dan Prasarana Depo Arsip	%	-	-	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase SKPD yang mengikuti Sosialisasi/Pemasyarakatan Kearsipan/Bimtek Kearsipan/Pameran Arsip	%	100	100	100	100	50	100	Belum Tercapai
5. Persentase terselamatkannya Arsip Statis Pemko Banjarbaru	%	N/A	N/A	N/A	100	44	100	Belum Tercapai

Urusan Kearsipan memiliki sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 40,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 60,00 persen belum tercapai target.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2. 28
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Produksi Perikanan Budidaya	ton	5550,65	5828,18	6119,59	6425,57	3120,5	6749,85	Belum Tercapai
2. Produksi Perikanan Tangkap	ton	57,32	58,47	59,84	60,83	36,20	62,05	Belum Tercapai
3. Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton	69,8	78	85,8	94,38	158,82	103,8	Tercapai

Urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 33,33 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 66,67 persen belum tercapai target.

2. Urusan Pertanian

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2. 29
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Total Produksi Tanaman Padi Pertahun	ton	5,70	5,95	6,12	6,30	7108	6,65	Belum Tercapai
2. Total Produksi Tanaman Cabe Pertahun	ton	700	710	731	752	510	773	Belum Tercapai
3. Total Produksi Tanaman Karet Pertahun	ton	900	937	952	967	958	982	Belum Tercapai
4. Populasi Ternak Kambing, Sapi, Ayam Buras, Ayam Ras dan Itik	ekor (ribu)	2,560	2,609	2,660	2,712	2820	2767	Tercapai
5. Jumlah Kasus Zoonosa di kota Banjarbaru	kasus	70	63	60	57	24	54	Tercapai
6. Jumlah ternak yang terserang penyakit	ekor	350	115	110	105	83	100	Tercapai
7. Persentase Produk Pangan segar peternakan yang tercemar	%	6	5	4	3	1	2	Tercapai
8. Persentase tenaga Penyuluh Pertanian PNS yang memiliki sertifikat	%	18,75	18,75	25	31,25	37,5	37,5	Tercapai
9. Persentase tenaga Penyuluh Pertanian Non PNS yang memiliki STTPL	%	18,09	23,08	38,46	53,85	69,23	69,23	Tercapai
10. Persentase tenaga Penyuluh Pertanian yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11. Persentase Penyuluh Pertanian Swadaya yang mengikuti Diklat	%	15	30	50	75	75	75	Tercapai
12. Persentase Kelas Kelompok Tani	%	10,21	18,18	34,55	50,91	67,27	67,27	Tercapai

Urusan Pertanian memiliki sebanyak 12 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 25,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 75,00 persen belum tercapai target.

3. Urusan Perdagangan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2. 30
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase hasil usaha dagang yang memenuhi standar	%	100	100	100	100	N/A	100	Tercapai
2. Persentase usaha dagang yang meningkat klasifikasinya	%	10	10	10	10	N/A	10	Tercapai
3. Persentase usaha dagang yang meningkat pangsa pasarnya	%	20	20	20	20	N/A	20	Tercapai
4. Persentase pedagang kali lima yang ditampung pada Kawasan PKL	%	10	10	10	10	N/A	10	Tercapai
5. Persentase Pedagang Kaki Lima yang patuh pada aturan	%	10	20	30	40	N/A	60	Belum Tercapai
6. Persentase Pedagang Kaki Lima yang meningkat sarana dan prasarana	%	4	4	4	4	N/A	4	Tercapai
7. Persentase pasar yang meningkat klasifikasinya	%	40	40	40	60	N/A	100	Belum Tercapai
8. Persentase pedagang pasar yang mengembangkan usahanya berbasis IT	%	20	20	20	20	N/A	20	Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
9. Persentase pelaku dagang yang taat pada aturan pasar	%	20	20	20	20	N/A	20	Tercapai

Urusan Perdagangan memiliki sebanyak 9 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 77,78 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 22,22 persen belum tercapai target.

4. Urusan Perindustrian

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2. 31
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase IKM yang berkualitas	%	1,5	1,5	1,5	1,75	N/A	2	Belum Tercapai
2. Industri Kecil Menengah yang menggunakan kemasan kreatif	%	50	55	55	65	N/A	75	Belum Tercapai
3. Persentase jenis produk IKM yang telah disertakan dalam Pameran	%	25	25	25	40	N/A	50	Belum Tercapai
4. Persentase Produk makanan yang diawasi dalam penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) yang berbahaya	%	100	100	100	100	N/A	100	Tercapai

Urusan Perindustrian memiliki sebanyak 4 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 25,00 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 75,00 persen belum tercapai target.

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Administrasi Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut ini.

Tabel 2. 32
Capaian Penyelenggaraan Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	BB	Belum Tercapai
2. Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Persentase Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Per-UU dan Kebutuhan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6. Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7. Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8. Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9. Persentase Kinerja Kecamatan dan atau Kelurahan yang mencapai target sesuai dengan indikator yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
10. Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	30	40	50	60	70	70	Tercapai
11. Nilai Indeks Komposit Survei Kepuasan Masyarakat	Mutu	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai
12. Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Kategori	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Tercapai
13. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
14. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP sesuai peraturan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
15. Persentase Penyelenggaraan Acara Keprotokolan Sesuai dengan Standar dan Aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
16. Jumlah kebijakan bidang perekonomian Walikota Banjarbaru	rekam	1	1	1	1	1	1	Tercapai
17. Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota (CSR)	Buah	2	2	2	2	2	2	Tercapai
18. Persentase Fasilitas Pelayanan Santunan dan Bantuan Rukun Kematian	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
19. Persentase Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20. Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
21. Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22. Persentase Naskah Kerjasama Aktif lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan	%	0,25	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5	Tercapai
23. Persentase Penyelesaian Tata Batas Wilayah antar Kelurahan dan Atau Kecamatan	Wilayah	2	3	3	3	3	3	Tercapai
24. Persentase Fasilitas rapat-rapat tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
25. Persentase Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
26. Cakupan Kerjasama Informasi dengan Mass Media	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan memiliki sebanyak 26 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 96,15 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 3,85 persen belum tercapai target.

2. Bidang Pengawasan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2. 33
Capaian Penyelenggaraan Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Nilai Evaluasi AKIP	%	CC	B	B	BB	N/A	BB	Tercapai
2. Persentase rekomendasi unsur penilaian risiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	N/A	100	Tercapai
3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang diproses untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	N/A	100	Tercapai
4. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang selesai ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	81	100	Belum Tercapai
6. Persentase rekomendasi inventarisasi asset yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	0	100	Belum Tercapai
7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang	%	100	100	100	100	94,2	100	Belum Tercapai

Indikator	Satuan	2016	2017	Capaian 2018	2019	2020	Target 2020	Interpretasi
ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan								
8. Persentase rekomendasi ketidaksesuaian dengan SAP yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD	%	100	100	100	100	80	100	Belum Tercapai
11. Jumlah pemenuhan pernyataan-pernyataan elemen kapabilitas APIP	Buah	40/Le vel 3	58/Le vel 3	25/Le vel 3	50/Le vel 3	58/le vel 3	75/Levl 3	Belum Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pengawasan memiliki sebanyak 11 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 54,55 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 45,45 persen belum tercapai target.

3. Bidang Perencanaan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2. 34
Capaian Penyelenggaraan Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	Capaian 2018	2019	2020	Target 2020	Interpretasi
1. Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra seluruh SKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Persentase Keselarasan Program Renstra seluruh SKPD dengan Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase Keselarasan Target Indikator Program Renstra seluruh SKPD dengan Target Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6. Persentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8. Persentase Keselarasan Target Indikator Program RKPD dengan Target Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9. Persentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10. Persentase Keselarasan target indikator Sasaran RPJMD dengan indikator sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11. Persentase Keselarasan program RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
12. Persentase Keselarasan target indikator program RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
13. Persentase keselarasan sasaran RKPD Lingkup Bidang Ekonomi dengan sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
14. Persentase keselarasan target indikator sasaran RKPD Lingkup Bidang Ekonomi dengan target indikator sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
15. Persentase Keselarasan Program RKPD Lingkup Bidang Ekonomi dengan Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
16. Persentase Keselarasan target Program pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
17. Persentase aspirasi masyarakat lingkup bidang ekonomi pada musrenbang yang diakomodir dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
18. Persentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang sosial budaya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
19. Persentase Keselarasan target indikator Sasaran RPJMD dengan indikator sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20. Persentase Keselarasan program RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
21. Persentase Keselarasan target indikator program RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22. Persentase keselarasan sasaran RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
23. Persentase keselarasan target indikator sasaran RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan target indikator sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
24. Persentase Keselarasan Program RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
25. Persentase Keselarasan target Program pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
26. Persentase aspirasi masyarakat lingkup bidang Sosial Budaya pada musrenbang yang diakomodir dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
27. Persentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
28. Persentase Keselarasan target indikator Sasaran RPJMD dengan indikator sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
29. Persentase Keselarasan program RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
30. Persentase Keselarasan target indikator program RPJMD dengan sasaran Renstra SKPD lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
31. Persentase keselarasan sasaran RKPD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
32. Persentase keselarasan target indikator sasaran RKPD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan target indikator sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
33. Persentase Keselarasan Program RKPD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
34. Persentase Keselarasan target Program pada RKPD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
35. Persentase aspirasi masyarakat lingkup bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam pada musrenbang yang diakomodir dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan memiliki sebanyak 35 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen mencapai sesuai target.

4. Bidang Keuangan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini.

Tabel 2. 35
Capaian Penyelenggaraan Bidang Keuangan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase penyajian laporan keuangan SKPD secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2. Persentase realisasi belanja langsung daerah terhadap anggaran belanja langsung daerah yang telah ditetapkan	%	84,2	84,4	84,7	85,2	93,26	85,65	Tercapai
3. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap anggaran belanja tidak langsung daerah yang telah ditetapkan	%	89,9	90	90,3	91,4	89,27	91,75	Belum Tercapai
4. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	BB	Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
5. Waktu penyampaian Rancangan Perda APBD kepada DPRD Kota Banjarbaru	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tercapai
6. Waktu penyampaian Rancangan Perda APBD Perubahan kepada DPRD Kota Banjarbaru	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tercapai
7. Waktu penyampaian Rancangan Perwali Penjabaran APBD kepada DPRD Kota Banjarbaru	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tercapai
8. Waktu penyampaian Rancangan Perwali Penjabaran APBD Perubahan kepada DPRD Kota Banjarbaru	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tercapai
9. Persentase realisasi Dana Perimbangan	%	95	95	95	95	100	100	Tercapai
10. Persentase realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	%	95	95	95	95	100	100	Tercapai
11. Persentase pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang tepat sasaran	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
12. Terakomodirnya barang/jasa yang menjadi standar harga kebutuhan SKPD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
13. Persentase SKPD Yang Menggunakan Aplikasi Persediaan Dalam Penyusunan Inventaris Barang	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
14. Lamanya waktu penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarbaru	hari	30	30	30	30	30	30	Tercapai
15. Persentase realisasi Dana Lain-Lain PAD yang telah diverifikasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
16. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan barang pengguna tahunan dengan lengkap	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
17. Kesesuaian perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan dengan ketersediaan barang	%	71	72	85	100	100	100	Tercapai
18. Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang dikuasi pengelola barang	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
19. Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang dikuasi pengelola barang	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20. Persentase proses pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
21. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan penerbitan SP2D	%	85,75	86,15	88,35	98,15	98,26	86,25	Tercapai
22. Surat Keputusan penetapan ganti rugi	SK	10	15	20	28	43	4	Tercapai
23. Persentase SKPD yang menggunakan teknologi informasi dalam penyusunan APBD dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
24. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp.Milyar)	Rp.	80.427	95.014	104.165	95.584	97.339	110,8	Belum Tercapai
25. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Rp.Milyar)	Rp.	11.236	10.829	10.967	11.625	5.712	12.206	Belum Tercapai
26. Kesesuaian persentase antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan pada periode tertentu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan memiliki sebanyak 26 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 88,46 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 11,54 persen belum tercapai target.

5. Bidang Kepegawaian

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut ini.

Tabel 2. 36
Capaian Penyelenggaraan Bidang Kepegawaian Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase aparatur yang wajib mengikuti ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencatuman gelar akademik	%	61	74	80	80	-	92,5	Belum Tercapai
2. Persentase aparatur yang mengikuti tubel sesuai dengan kebutuhan formasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Persentase pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang memenuhi syarat jabatan	%	92,11	97,32	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase pejabat fungsional yang memenuhi syarat jabatan	%	66,41	75,1	82,52	88,46	N/A	94,39	Belum Tercapai

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
5. Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan formasi	%	53,15	59,66	70,67	81,22	N/A	91	Belum Tercapai
6. Persentase aparatur yang melaksanakan penilaian prestasi kerja	%	N/A	38,19	12,86	15,43	N/A	18	Belum Tercapai
7. Persentase pelayanan administrasi kenaikan pangkat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8. Persentase dokumen penyusunan kebutuhan formasi aparatur	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9. Persentase pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS	%	N/A	N/A	100	100	100	100	Tercapai
10. Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11. Persentase aparatur yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
12. Persentase pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan ceramah agama	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
13. Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
14. Persentase pelayanan administrasi proses kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pembuatan karis karsu karpeg taspen	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian memiliki sebanyak 14 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 71,43 persen yang telah mencapai sesuai target, sedangkan sebesar 28,57 persen belum tercapai target.

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini.

Tabel 2. 37
Capaian Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kelulusan diklat pim II,III dan IV, diklat teknis fungsional dan diklat prajabatan	%	82,5	85	87,5	90	N/A	100	Belum Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan memiliki sebanyak 1 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 0 persen.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2. 38
Capaian Penyelenggaraan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian					Target 2020	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1. Persentase implementasi rencana penelitian	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2. Persentase implementasi rencana pengembangan penelitian	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5. Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen mencapai sesuai target.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan secara tidak langsung. Semakin besar pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita semakin baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Rumah tangga yang mapan pada daerah yang sudah maju mempunyai pola konsumsi yang berbeda rumah tangga dengan tingkat penghasilan yang rendah.

Beberapa kondisi umum yang bisa terjadi adalah rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tinggi, umumnya porsi konsumsi makanan semakin berkurang, seiring dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Hal ini disebabkan konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi non makanan. Dengan demikian pola konsumsi makanan dan non makanan sedikit banyak dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk atau rumah tangga. Tabel 2.39 menunjukkan jumlah rumah tangga di Kota Banjarbaru berdasarkan golongan pengeluaran per kapita sebulan pada tahun 2020.

Tabel 2. 39
Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita /bulan Tahun 2020

Golongan Pengeluaran (Rupiah)	Persentase (%)
>150.000	0,00
150.000-199.999	0,00
200.000-299.999	0,00
300.000-499.999	1,12
500.000-749.999	8,81
750.000-999.999	11,49
1.000.000-1.499.999	24,45
>1.500.000	54,13

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rumah tangga per kapita sebulan Kota Banjarbaru didominasi oleh pengeluaran lebih dari Rp1.500.000,00 per kapita per bulan yang mencakup 54,13% penduduk Kota Banjarbaru.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Banjarbaru meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum dan sanitasi, serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu komponen penting untuk meningkatkan daya saing Kota Banjarbaru.

1. Perhubungan

Transportasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian sangatlah penting bagi perkembangan daerah perkotaan disamping dukungan kualitas jalan yang baik. Bidang transportasi/perhubungan yang ada di Kota Banjarbaru meliputi perhubungan darat dan perhubungan udara. Perhubungan darat yang berupa jalan darat yang ada di Kota Banjarbaru merupakan penghubung yang sangat vital bagi arus lalu lintas antara ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan 13 kabupaten/kota lainnya dan sekaligus penghubung utama antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

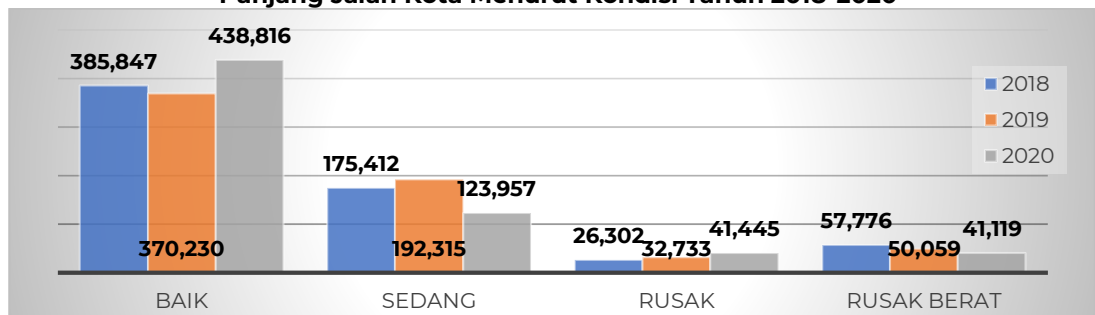
Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Banjarbaru sampai pada tahun 2020 terbilang sangat mencukupi, dimana Panjang jalan jauh melebihi dari kepemilikan kendaraan yang terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemacetan di Kota Banjarbaru pada kondisi normal sangat rendah. Untuk lebih jelasnya perkembangan Panjang jalan dan kepemilikan kendaraan yang terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 2.40 di bawah ini.

Tabel 2. 40
Panjang jalan dan jumlah kendaraan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (Km)	645.337	645.337	645.337	645.337	645.337
2.	Kepemilikan Kendaraan Terdaftar	110.496	118.370	160.787	174.561	118.633

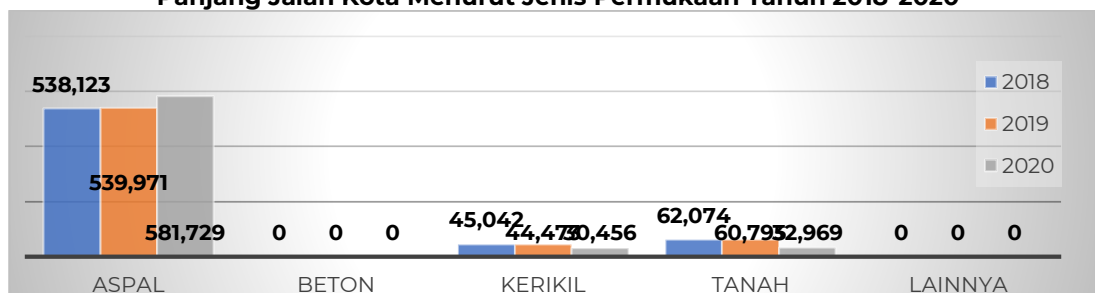
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021

Grafik 2.15
Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021

Grafik 2.16
Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukaan Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021

Untuk transportasi udara, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor pada tahun 2020 sebanyak 714.496 orang sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor berjumlah 751.663 orang. Selama rentang waktu 4 (empat) tahun, sejak tahun 2016-2019 jumlah

penumpang baik yang datang maupun yang berangkat di bandara Syamsudin Noor selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, namun pada tahun 2020, jumlah penumpang yang berangkat dan datang dari Bandara Syamsudin Noor mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya kenaikan harga tiket pesawat pada tahun 2019 dan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Tabel 2. 41
Jumlah Penumpang yang Berangkat dan Datang dari Bandara Syamsudin Noor
Tahun 2016-2020

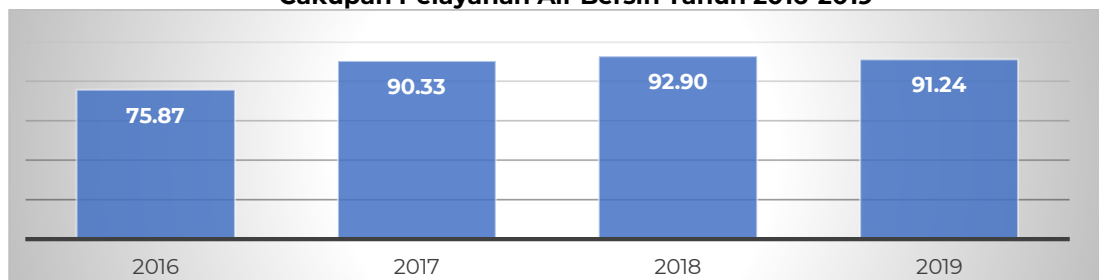
Tahun	Berangkat	Datang
2016	1.757.910	1.764.758
2017	1.780.846	1.807.844
2018	1.879.671	1.962.502
2019	1.569.946	1.634.969
2020	714.496	751.663

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021

2. Air Bersih dan Listrik

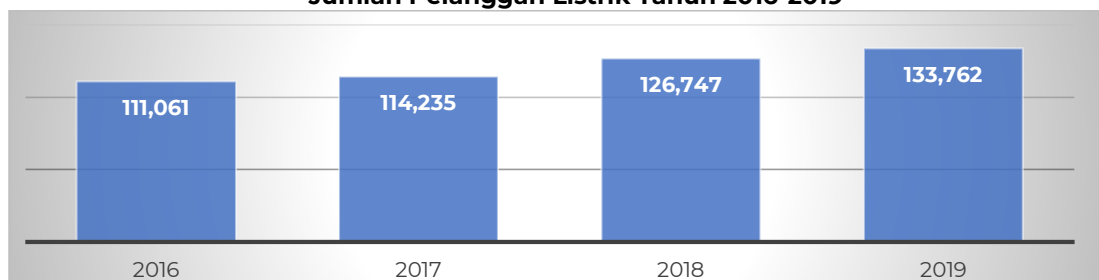
Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : Fasilitas air bersih, Pembuangan air besar/tinja, Pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Untuk pelayanan air bersih di Kota Banjarbaru, dilakukan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan swadaya masyarakat. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, serta sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air. rumah tangga bersanitasi dan air bersih di Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2019 dan cakupan pelayanan listrik, dapat dilihat pada gambar di bawah ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.17
Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2020

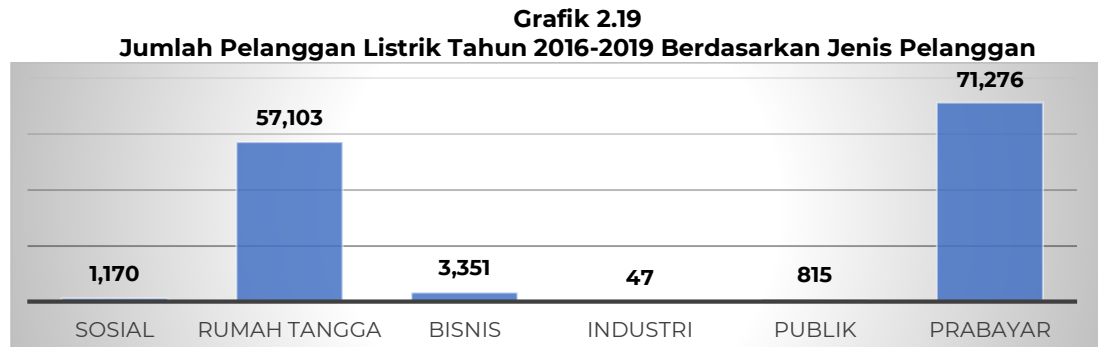
Grafik 2.18
Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2020

Pada gambar tersebut di atas, dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup stabil dalam hal jumlah pelanggan listrik dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun, pelanggan listrik yang mendominasi untuk wilayah Kota Banjarbaru adalah pelanggan rumah tangga dan pelanggan yang menggunakan listrik

prabayar atau voucher. Pelanggan listrik jenis bisnis dan industry hanya berjumlah total 3.398 pelanggan, jauh di bawah pelanggan listrik jenis rumah tangga. Gambar berikut menunjukkan proporsi jenis pelanggan listrik di Kota Banjarbaru.



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2020

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Beberapa indikator yang menggambarkan iklim investasi di Kota Banjarbaru adalah meningkatnya investor yang menanamkan modalnya untuk melakukan kegiatan investasi, hal ini juga didukung oleh regulasi daerah yang mendukung iklim investasi di Kota Banjarbaru.

1. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Banjarbaru relative kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Tabel 2.42 berikut ini menunjukkan jumlah tindak pidana yang masuk pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru menurut jenis tindak pidana.

Tabel 2. 42
Jumlah Tindak Pidana yang Masuk pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2016-2020

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
Tindak Pidana Umum	172	180	198	199	162
Tindak Pidana Ekonomi	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Psicotropika	137	77	142	202	184
Tindak Pidana Senjata Api/Senjata Tajam	30	17	24	17	17
Tindak Pidana Lainnya	138	123	39	46	40
Jumlah Tindak Pidana Total	477	397	403	464	403
Jumlah Tindak Pidana per 100 ribu Penduduk	229,86	185,5	182,6	203,95	159,28

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 2021, diolah

Menurut tabel 2.42 di atas, Kota Banjarbaru sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi dalam jumlah tindak pidana yang masuk pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Namun, jumlah tindak pidana per 100 ribu penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2018, dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi sebanyak 203,95 per 100 ribu penduduk. Namun, angka tersebut turun kembali pada tahun 2020 menjadi 159,28 tindak pidana per 100 ribu penduduk.

2. Perijinan dan Investasi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraannya. Tabel 2.43 di bawah ini

menunjukkan hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di Kota Banjarbaru.

Tabel 2. 43
Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan

Indikator	Satuan	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	80	80,5	81	81,1

Sumber : Badan Penanaman Modal dan PTSP 2021

Dari tabel 45 di atas, dapat terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat dari tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perijinan di Kota Banjarbaru mengalami perbaikan secara terus menerus setiap tahunnya, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan jumlah investasi dan izin usaha di Kota Banjarbaru. Selanjutnya, nilai investasi di Kota Banjarbaru pada tahun 2017 hingga 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2. 44
Nilai Investasi Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyar)	360,0	380,0	2.022	119,5
Nilai Investasi PMA (Rp. Milyar)	12	14	14	0

Sumber : Badan Penanaman Modal dan PTSP, 2021

Dalam tabel di atas, nilai investasi PMDN mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2019 yakni sebesar 432 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang pesat ini mengindikasikan bahwa Kota Banjarbaru sebagai tujuan investasi yang dirasa menguntungkan. Namun, hal ini kemungkinan akan terpengaruh oleh penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi global COVID-19 yang melanda seluruh dunia, utamanya di Indonesia dan Kalimantan Selatan.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru. Pengelolaan pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru. Rincian pajak daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2. 45
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	6.232,24	6.678,98	8.096,93	8.908,15	4.935
Pajak Restoran	11.996,14	19.328,78	25.045,63	27.822,85	18.969
Pajak Hiburan	988,19	1.655,70	3.779,54	6.395,85	2.941
Pajak Reklame	1.802,05	1.910,77	3.203,60	3.241,71	3.253
Pajak Penerangan Jalan	22.132,70	27.677,16	31.541,98	34.910,77	36.160
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	411,53	100,21	212,14	84,52	66
Pajak Parkir	3.289,87	4.651,53	5.543,10	6.148,60	5.873
Pajak Air Bawah Tanah	956,51	684,09	792,51	861,60	626
Pajak Sarang Burung Walet	0	0	12,22	31,33	27
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.617,16	12.892,00	13.623,68	13.243,78	13.203
Pajak BPHTB	14.229,39	31.415,76	39.011,80	40.480,64	30.032
Total	72.655,80	106.995,00	130.862,93	142.129,81	116.088

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan pajak daerah Kota Banjarbaru mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dan oleh karenanya iklim berusaha di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan. Namun, pendapatan dari pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 karena adanya pandemi yang mempengaruhi perekonomian dunia, nasional maupun lokal. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mendorong pemerintah Banjarbaru untuk melakukan relaksasi pajak demi mendorong pemulihan perekonomian.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting karena walau bagaimanapun juga manusia merupakan subyek dari pembangunan yang menentukan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

1. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan suatu pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin besar persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumberdaya manusianya. Berdasarkan tabel di bawah terlihat penduduk Kota Banjarbaru yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2019, didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi SLTA, sebanyak 73.494 orang. Perkembangan penduduk berusia 15 tahun keatas berdasarkan jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2017-2020 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Sumber Daya Manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam daya saing daerah Kota Banjarbaru. Sebagai kota Tabel

Tabel 2. 46
Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tidak/Blm tamat SD	19.118	14.926	18.984	43.355
SD	23.143	26.873	21.953	
SLTP	47.161	43.978	39.918	39.350
SLTA	64.652	70.442	73.494	78.903
DI/DII/DIII	4.126	6.127	6.027	32.762
DIV/S-I+	22.984	24.388	32.122	

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021

2. Rasio Ketergantungan

Bila dilihat dari usia produktif maka penduduk Kota Banjarbaru dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok usia belum produktif (<15 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan usia lanjut (>65 tahun). Berdasarkan kelompok umur ini maka dapat dihitung besarnya Rasio Ketergantungan (*Depedency Ratio*) yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-

64 tahun) terhadap kelompok usia muda (<15 tahun) dan kelompok usia tua (> 65 tahun).Tabel di bawah ini menunjukkan Angka ketergantungan di Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 47
Persentase Penduduk dan Angka Ketergantungan Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk					
0-14 Tahun (Non Produktif)	28,30	28,31	27,31	27,1	27,24
15-64 Tahun (Produktif)	68,92	68,24	69,24	69,31	68,85
64+ (Non Produktif)	2,78	3,45	3,45	3,58	3,89
Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) :					
Angka Ketergantungan	45,10	46,54	44,42	44,26	45,22
Angka Ketergantungan Muda	41,06	41,48	39,44	39,09	39,56
Angka Ketergantungan Tua	4,04	5,06	4,98	5,16	5,65

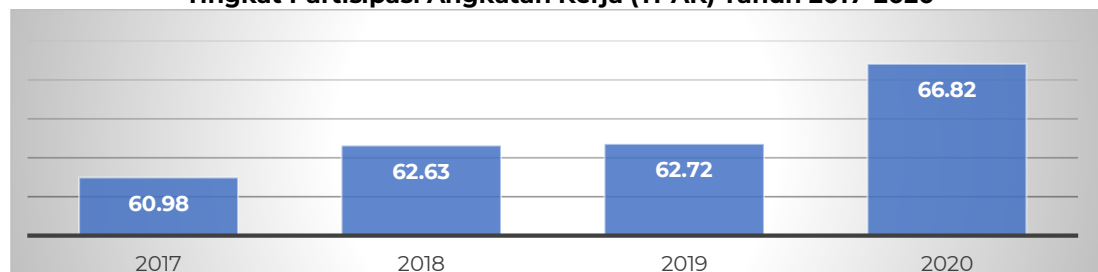
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2021

Angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2020 sebesar 45,22%. Hal ini menjelaskan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 39 orang usia muda dan 5 orang usia tua. Angka ketergantungan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.47 di atas mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2019, angka ketergantungan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali menjadi 45,22%. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila penduduk yang berusia produktif tersebut juga sesungguhnya tidak produktif akibat menganggur meskipun kenyataannya mereka berada pada usia produktif. Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi ini dapat digambarkan secara sederhana bila beban tanggungan dalam satu keluarga tinggi maka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi tiap anggota keluarganya dikhawatirkan tidak dapat tercapai.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Banjarbaru pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.20 di bawah ini.

Grafik 2.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017-2020



Sumber : KDA, BPS Kota Banjarbaru 2021

Dari gambar di atas, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 62,72 menjadi 66,82. TPAK ini melampaui perkiraan untuk tahun 2020, di mana Pemerintah Kota Banjarbaru memperkirakan adanya penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Banjarbaru karena pandemi COVID-19.

2.5 Capaian Kinerja RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

Secara umum capaian kinerja RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 60,71 persen atau dari sejumlah 28 Indikator Kinerja Sasaran terdapat 17 Indikator Sasaran tercapai dan 11 Indikator Kinerja Sasaran tidak tercapai. Hal ini terjadi tentunya dengan adanya kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang mewajibkan semua daerah untuk dilakukan refokusung dan realokasi anggaran yang difokuskan pada penanganan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengaman sosial. Selain itu adanya penyesuaian pengurangan pendapatan daerah yang berujung pada penyesuaian pengurangan belanja program/kegiatan yang tentunya berpengaruh pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

Misi/Sasaran/Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian Kinerja sd Tahun 2020		Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
		Target	Capaian	
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia				
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat				
1. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,80	10,95	Tercapai
2. Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,85	14,81	Belum Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
3. Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	99 / 100.000 KH	172 / 100.000 KH	Belum Tercapai
4. Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	5,30 / 1.000 KH	4,9 / 1.000 KH	Tercapai
Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan				
Sasaran 3 : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah				
5. Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	97,87 %	96,64	Belum Tercapai
Sasaran 4 : Meningkatkan penanganan kawasan rawan banjir				
6. Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	%	60,00 %	59,98 %	Belum Tercapai
Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman				
7. Persentase kawasan perkotaan bebas kumuh	%	99,44 %	99,75 %	Tercapai
8. Persentase rumah layak huni	%	99,68 %	99,17 %	Belum Tercapai
Sasaran 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,84	61,67	Tercapai
Sasaran 7 : Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik				
10. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%	10,28 %	10,28 %	Tercapai
Misi 3 : Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan				
Sasaran 8 : Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah (PDRB)				
11. Persentase wirausaha baru	%	28,91 %	28,15 %	Belum tercapai
12. Jumlah kunjungan wisatawan	orang	98.400 org	34.900 org	Belum tercapai
13. Tingkat pengangguran terbuka	%	6,05	5,54	Tercapai
Sasaran 9 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
14. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	Rp.	223,7	245,8	Tercapai
Sasaran 10 : Meningkatkan Investasi				
15. Nilai Investasi PMA dan PMDN (Milyar)	Rp.	2.453,6	3.786,2	Tercapai
Sasaran 11 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perekonomian				
16. Persentase pasar tradisional yang dikelola secara modern	%	60 %	60 %	Tercapai

Misi/Sasaran/Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian Kinerja sd Tahun 2020		Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
		Target	Capaian	
Sasaran 12 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah				
17. Ketersediaan pangan daerah	Skor PPH	85,00 skor PPH	80,11 skor PPH	Belum tercapai
Misi 4 : Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi				
Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
18. Nilai SAKIP	Nilai	Nilai BB	B	Belum tercapai
19. Nilai LPPD	Nilai	Nilai Tinggi	Sangat Tinggi (3,29)	Tercapai
20. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai
21. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,15	3,14	Belum tercapai
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Sangat Baik	Baik	Belum tercapai
Sasaran 15 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi				
23. Indeks SPBE	%	2,50	2,62	Tercapai
Misi 5 : Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib				
Sasaran 16 : Meningkatnya keamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat				
24. Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	%	90,00	99,00	Tercapai
25. Jumlah kasus konflik	Kasus	0	0	Tercapai
Sasaran 17 : Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana				
26. Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	%	92,00	100	Tercapai
Sasaran 18 : Meningkatnya penanganan PMKS dan penanganan penduduk miskin berdasarkan data terpadu				
27. Cakupan penanganan PMKS	%	64 %	81,8 %	Tercapai
28. Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan data terpadu	%	60,03 %	100 %	Tercapai

BAB 3



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah, dengan mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dengan disusunnya RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini, analisis gambaran umum kinerja keuangan dilakukan terhadap realisasi APBD tahun 2016 hingga 2020, serta proyeksi APBD untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Realisasi APBD Kota Banjarbaru pada tahun 2016-2020 dicantumkan dokumen ini untuk memperkaya analisis keuangan daerah. Data dan informasi yang terkandung di dalamnya digunakan sebagai bahan analisis dan proyeksi untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2021-2026. Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumberdaya di wilayahnya.

Dalam konteks pembangunan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik jika didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui tentang gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan dan dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020

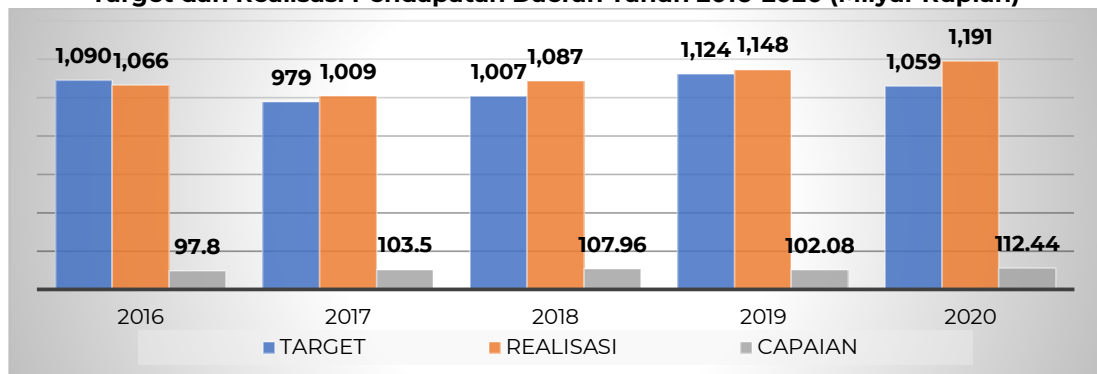
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, dengan mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan, perencanaan dengan penganggaran pada pemerintah daerah. Struktur APBD Kota Banjarbaru terdiri atas (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016=2020

A. Komponen Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Bagian ini akan membahas tentang kinerja keuangan daerah dalam komponen pendapatan daerah. Dalam gambar berikut, dapat dilihat target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 hingga tahun 2020 (dalam Milyar Rupiah).

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)



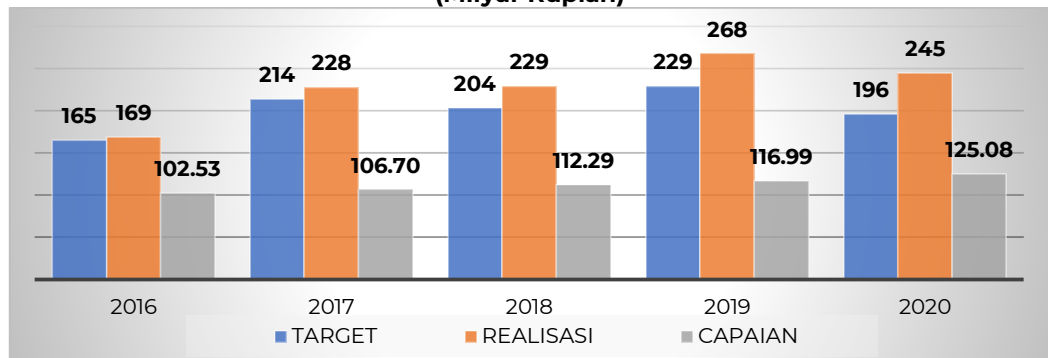
Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021.

Dari data yang tercantum dalam grafik 3.1 di atas, rata-rata realisasi pendapatan daerah Kota Banjarbaru sebesar 104,76 persen per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar **2,94 persen** per tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-Lain PAD yang sah. Gambar berikut menunjukkan grafik target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 (Dalam Milyar Rupiah).

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)



Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam grafik 3.2 di atas, rata-rata capaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 112,72 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 sebesar **19 persen** per tahun.

Dalam komponen Pendapatan Asli Daerah di atas, Pendapatan Pajak Daerah merupakan salah satu Selanjutnya, pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Banjarbaru yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru juga menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan dari pajak daerah Kota Banjarbaru sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 3. 1
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
Pajak Hotel	6.232	6.678	8.096	8.908	4.935
Pajak Restoran	11.996	19.328	25.045	27.822	18.969
Pajak Hiburan	988	1.655	3.779	6.395	2.941
Pajak Reklame	1.802	1.910	3.203	3.241	3.253
Pajak Penerangan Jalan	22.132	27.677	31.541	34.910	36.160
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	411	100	212	84	66
Pajak Parkir	3.289	4.651	5.543	6.148	5.873
Pajak Air Bawah Tanah	956	684	792	861	626
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	12	31	27
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.617	12.892	13.623	13.243	13.203
Pajak BPHTB	14.229	31.415	39.011	40.480	30.032
Total	72.655	106.995	130.862	142.129	116.088

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2021

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan, pendapatan daerah dari pajak terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun, ada beberapa komponen pajak daerah yang mengalami penurunan jika dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun 2019. Komponen pajak yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang mengalami penurunan sebesar 20 persen tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kebijakan untuk meniadakan pajak pengambilan bahan galian gol C karena Pemerintah Kota Banjarbaru tidak mendukung pengambilan bahan galian golongan C yang menyebabkan kerusakan lingkungan, utamanya di daerah Kecamatan Cempaka. Dari tabel tersebut, dapat dilihat juga bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru menerapkan Pajak Sarang Burung Walet sejak tahun 2018 dan mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2019. Namun, total penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Hal ini tercermin dalam penerimaan pajak daerah hotel, restoran, dan hiburan serta pajak BPHTB. Penurunan capaian penerimaan pajak daerah ini juga dikarenakan karena adanya relaksasi pajak daerah untuk mendorong pergerakan roda perekonomian pada masa pandemi.

Tabel 3. 2
Hasil Retribusi Daerah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

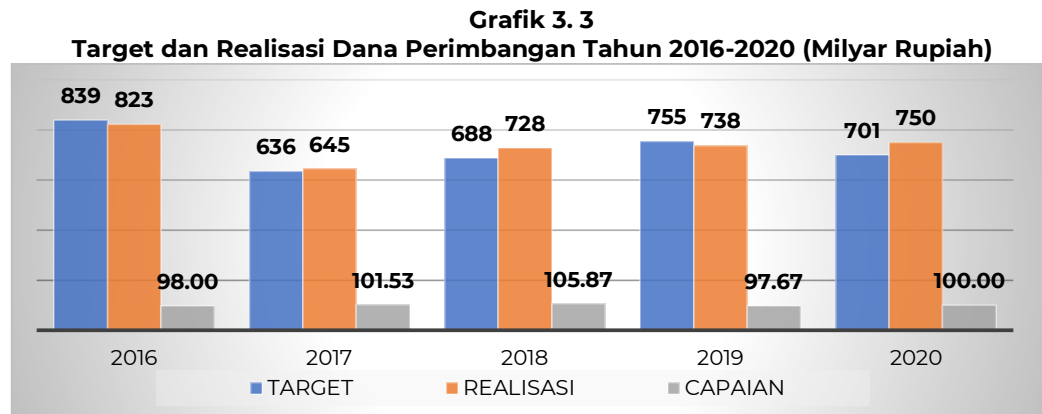
Hasil Retribusi Daerah	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
Dinas Lingkungan Hidup	42	344	250	455	555
Dinas Perdagangan	3.693	2.470	1.995	2.439	1.840
Dinas Pekerjaan Umum & TR	17	76	67	50	50
Dinas Perhubungan	1.395	1.232	1.262	1.237	1.001
Dinas Ketahanan Pangan	26	32	40	50	48
Dinas Pemuda, Olahraga & Budpar	303	942	1.205	1.079	370
Dinas Kesehatan	477	393	189	24	20
Dinas Pendidikan	37	41	54	57	30
Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	336	329	2.906
Setdako	289	395	394	410	67
Kecamatan Banjarbaru Selatan	203	120	104	156	170
Kecamatan Liang Anggang	52	39	33	27	12
Kecamatan Landasan Ulin	124	116	170	84	29
Kecamatan Cempaka	35	47	40	39	2
Kecamatan Banjarbaru Utara	187	168	135	95	108
Total	6.887	6.421	6.280	6.536	7.216

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2021

2. Dana Perimbangan Kota Banjarbaru

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, terdiri atas dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. DAU dan DBH adalah jenis transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* (bantuan umum), sedangkan DAK adalah jenis transfer dana dari Pemerintah Pusat

kepada daerah yang bersifat *specific grant* (bantuan khusus). Dana Perimbangan tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.42 persen per tahun. Gambar di bawah ini menunjukkan target dan realisasi Dana Perimbangan Kota Banjarbaru dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

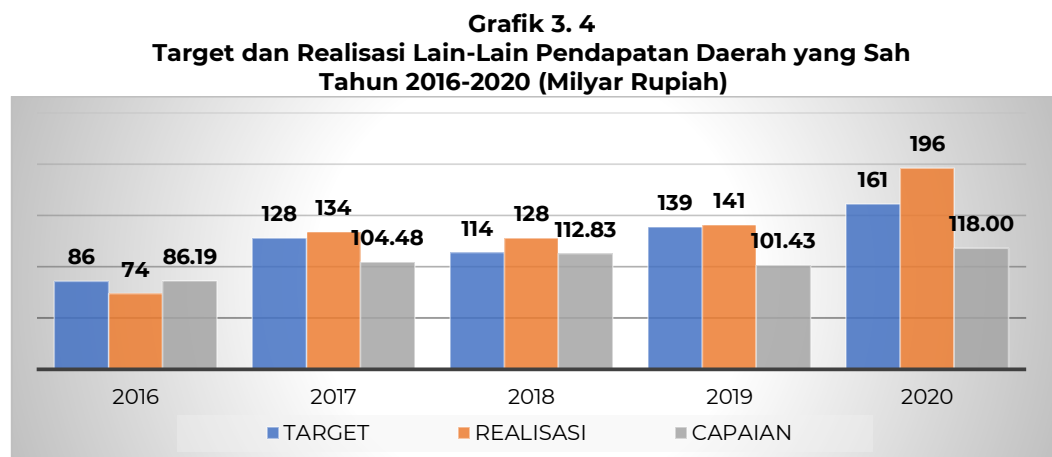


Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2021

Pada grafik 3.3 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2019, rata-rata realisasi Dana Perimbangan Kota Banjarbaru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 100,61 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar **-18 persen** per tahun.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kota Banjarbaru terdiri dari Pendapatan hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020

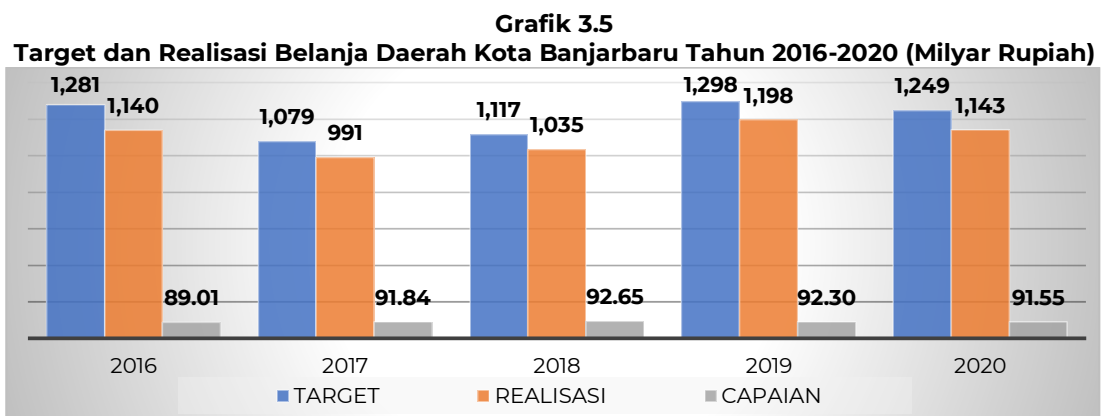


Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik 3.4 di atas, rata-rata peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 104,59 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah sebesar **31 persen** per tahun.

B. Komponen Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut.

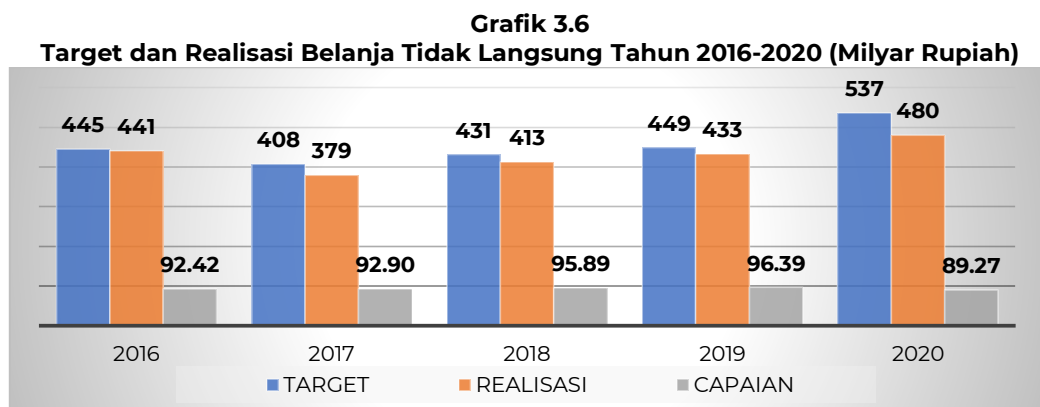


Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Dari data yang tercantum dalam grafik 3.5 di atas, rata-rata realisasi belanja daerah Kota Banjarbaru sebesar 91,47 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar **0,63 persen** per tahun.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Kota Banjarbaru mengalami rata-rata peningkatan pertumbuhan sebesar **2,65 persen** per tahun dengan rata-rata capaian pertahun sebesar 93,37 persen. Grafik 3.6 berikut menunjukkan target dan realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

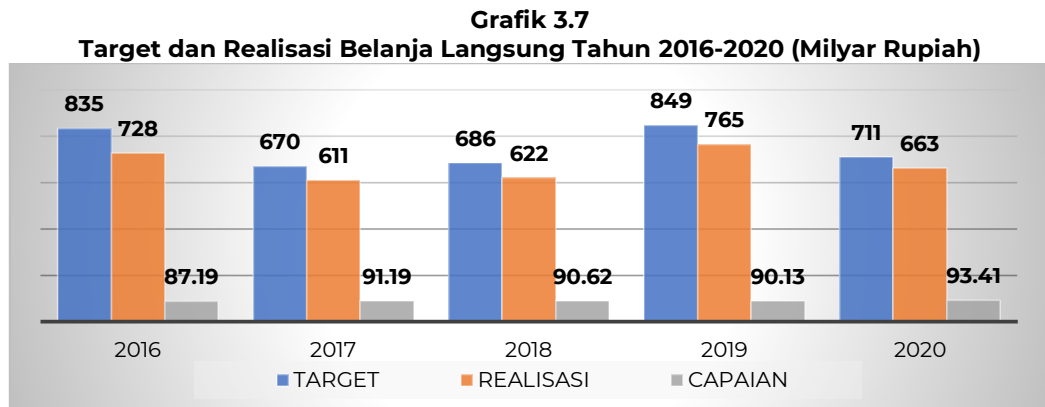


Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami rata-rata penurunan pertumbuhan sebesar **-1,15 persen** setiap tahunnya dengan rata-rata capaian pertahun sebesar 90,51 persen.

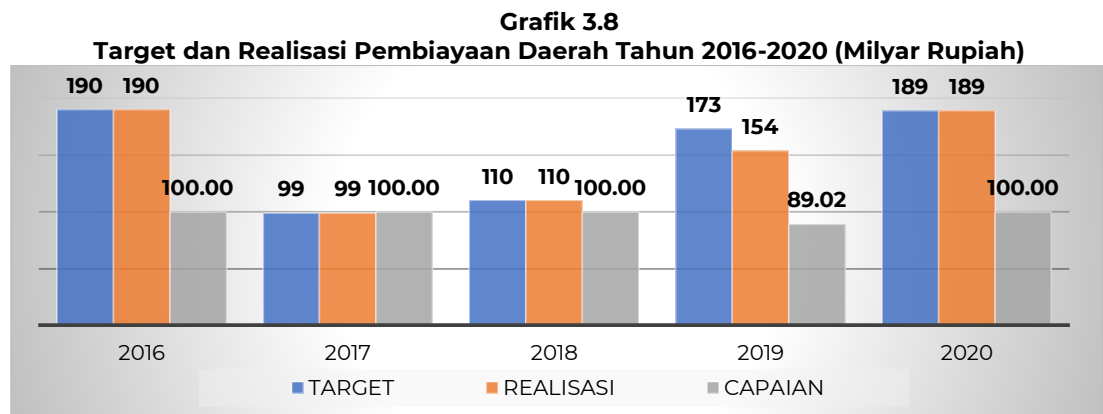
Grafik berikut menunjukkan target dan realisasi belanja langsung Kota Banjarbaru tahun 2016-2020.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah

C. Komponen Pembiayaan Daerah

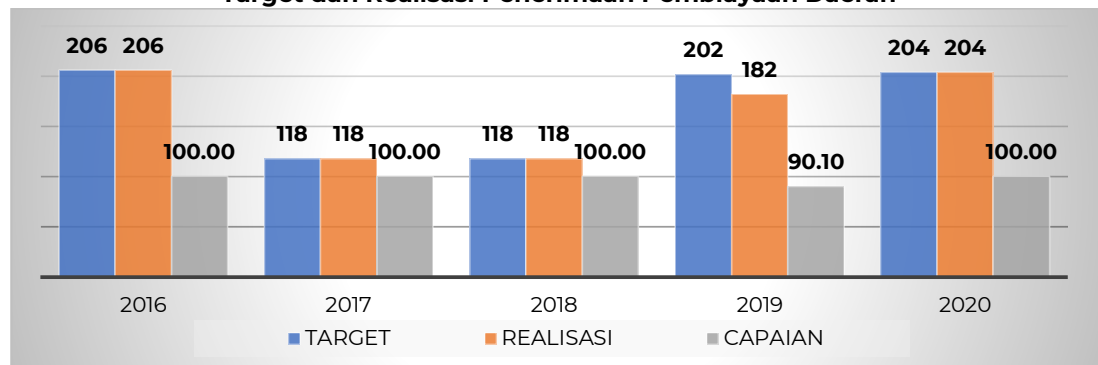
Pembiayaan Daerah merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah (a) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya, (b) Pencairan Dana Cadangan, (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah (a) Pembentukan dana cadangan, (b) Penyertaan modal (investasi) daerah, (c) pembayaran pokok utang, (d) pembayaran kegiatan lanjutan, dan (e) Pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Grafik 3.8 berikut menunjukkan target dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 hingga tahun 2020.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Dari data pada grafik 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian Pembiayaan Daerah pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 97,80 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan sebesar **6,49 persen** pertahun. Grafik 3.9 berikut ini menunjukkan target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

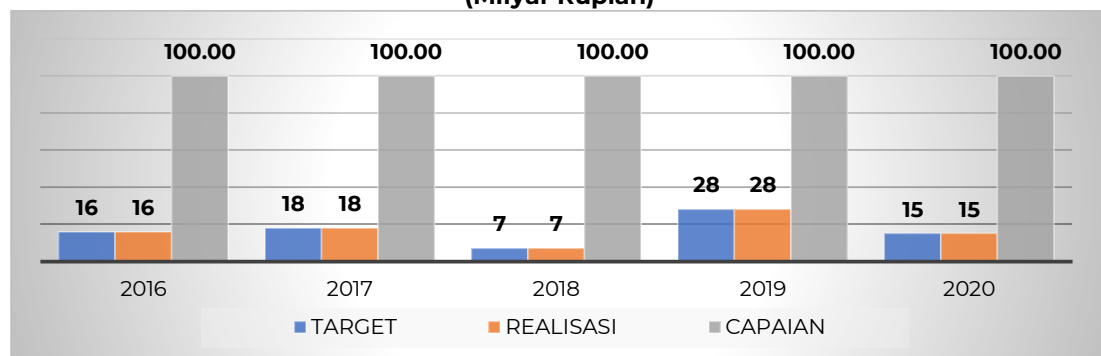
Grafik 3.9
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, 2021

Berdasarkan data di atas, penerimaan pembiayaan Kota Banjarbaru tercapai 100 persen pada tahun 2016 hingga tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019, yakni tercapai hanya sebesar 90,10 persen. Pada tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar 100 persen. Grafik 3.10 berikut ini menunjukkan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Gambar 3. 10
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020
(Milyar Rupiah)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terealisasi sebesar 100 persen setiap tahunnya.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio ekuitas serta kemampuan aset daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Neraca daerah menggambarkan posisi Pemerintah Daerah terkait dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal diterbitkannya neraca tersebut. Sebuah Neraca memiliki beberapa unsur, yaitu Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas.

Aset Pemerintah Kota Banjarbaru selama tahun 2016 sampai dengan 2020 secara rata rata mengalami peningkatan sebesar 52,97%. Aset Daerah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang mampu memberikan manfaat Ekonomi dan Sosial Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Banjarbaru. Pada tahun 2020 nilai Aset Pemerintah Kota Banjarbaru adalah senilai Rp 3.027.860.759.512,78 meningkat sebesar Rp 77.546.319.768,27 bila dibandingkan dengan nilai Aset tahun 2019 sebesar Rp 2.950.314.439.744,51. Di mana sebagian besar nilai peningkatan berasal dari penambahan aset tak berwujud.

Kewajiban daerah menurut Pernyataan Atas Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Secara umum, selama 5 (lima) tahun terakhir kewajiban pemerintah Kota Banjarbaru memiliki rata-rata sebesar 42% dikarenakan pengakuan atas penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang mulai diakui pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017. Kewajiban Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 sebesar Rp 155.604.850.308,30 mengalami peningkatan sebesar Rp 74.531.140.983,49 bila dibandingkan dengan tahun 2019 di mana nilainya adalah sebesar Rp 81.073.709.324,81.

Ekuitas menurut PSAP 01 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal Neraca. Rata-rata pertumbuhan Ekuitas Pemerintah Kota Banjarbaru antara tahun 2016 dan tahun 2020 adalah sebesar 45,1% dengan peningkatan yang cukup stabil setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana nilai Ekuitas pemerintah Kota Banjarbaru adalah senilai Rp 2.869.240.730.419,70 meningkat sebesar 11,05% bila dibandingkan dengan tahun 2018, atau senilai Rp 285.603.544.441,59.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel 3.5 digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan Rasio, di mana terdapat 2 (dua) jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut.

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Data rasio likuiditas Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Rasio Likuiditas pada 31 Desember 2020

Rasio	Rumus	Nilai Rasio
Rasio Lancar (Current Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	
Rasio Cepat (Quick Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$	
Rasio Kas (Cash Ratio)	$\frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga}}{\text{Hutang Lancar}}$	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Dari perhitungan rasio likuiditas pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru pada 31 Desember 2020 memiliki likuiditas yang sangat mencukupi untuk membayar semua kewajiban Jangka Pendeknya, bahkan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat membayar semua Kewajiban Jangka Pendeknya hanya dengan menggunakan kas yang tersedia pada 31 Desember 2020.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas memiliki nama lain *leverage ratio* digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. dengan jaminan berupa aset atau kekayaan daerah. Rasio Solvabilitas membandingkan beban utang Pemerintah Daerah secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset yang dimiliki sendiri oleh Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh Kreditor (pemberi utang). Jika aset daerah lebih

banyak dimiliki oleh kreditor, maka daerah tersebut dianggap kurang *Leverage*. Perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru pada 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4
Rasio Solvabilitas pada 31 Desember 2020

Rasio	Rumus	Nilai Rasio
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (<i>Debt To Equity Ratio</i>)	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$	0,54
Rasio Utang (<i>Debt Ratio</i>)	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$	0,51

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Dari hasil perhitungan perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2020 di atas bisa disimpulkan bahwa kewajiban kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru rasionya masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan Ekuitasnya. Sedangkan bila dilihat dari perhitungan rasio utang, maka dapat disimpulkan bahwa semua nilai kewajiban Pemerintah Banjarbaru dapat dijamin dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan perbandingan setiap Rp 1 Kewajiban hanya perlu dijamin oleh Rp 0,51 Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.



Tabel 3. 5
Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	111.124.229.509,25	110.100.924.672,87	163.435.034.255,98	88.404.491.319,08	212.999.030.260,67
Kas di Bendahara Penerimaan	-	30.935.000,00	5.440.000,00	-	595.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.498.500,00	6.195.000,00	196.667.254,00	-	72.000.100,00
Kas di BLUD	3.685.238.615,00	2.572.281.684,00	2.402.796.070,00	11.337.811.150,91	19.430.842.042,51
Kas di JKN	2.052.925.511,00	1.291.041.782,00	465.394.563,20	-	24.533.409,00
Kas BOS	-	4.393.235.318,19	3.269.642.447,00	3.816.967.183,00	5.081.161.078,00
Kas Lain Lain	2.257.045.065,00	-	-	-	156.099.500,00
Piutang Pajak	32.426.395.670,12	38.969.306.620,12	44.134.564.669,12	79.803.690.226,00	78.152.804.628,00
Penyisihan Piutang Pajak	(9.850.829.758,65)	(11.682.473.295,45)	(14.166.909.022,92)	(48.024.444.588,62)	(48.755.288.928,53)
Piutang Pajak Netto	22.575.565.911,47	27.286.833.324,67	29.967.655.646,20	31.779.245.637,38	29.397.515.699,47
Piutang Retribusi	5.623.209.273,00	6.347.121.908,00	7.251.171.287,96	8.202.773.358,72	9.344.794.238,68
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.518.975.305,50)	(5.245.366.271,50)	(6.141.462.503,20)	(6.968.104.125,76)	(8.127.624.060,72)
Piutang Retribusi Netto	1.104.233.967,50	1.101.755.636,50	1.109.708.784,76	1.234.669.232,96	1.217.170.177,96
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah	7.932.039.837,00	9.145.246.848,00	13.068.854.301,00	11.365.332.859,00	624.151.543,85
Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah	(500.274.847,71)	(3.049.868.272,49)	(1.067.293.286,50)	(537.867.673,79)	(483.483.301,00)
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah Netto	7.431.764.989,29	6.095.378.575,51	12.001.561.014,50	10.827.465.185,21	140.668.242,85
Piutang Dana Transfer	2.994.426.469,00	-	52.281.125.015,00	57.102.000.619,00	1.640.221.794,00
Piutang Bagi Hasil Provinsi	18.130.295.205,37	23.025.440.251,02	39.651.149.229,39	41.474.227.698,03	33.351.797.583,18
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	505.195.800,00	598.198.930,00	542.477.080,00	355.041.900,00	611.150.770,00
PenyisihanBagianLancarTuntutanGantiRugi	(310.734.790,00)	(425.321.212,25)	(542.477.080,00)	(355.041.900,00)	(611.150.770,00)
BagianLancarTuntutanGantiRugiNetto	194.461.010,00	172.877.717,75	-	-	1.969.294.362,00
Persediaan	19.946.730.646,17	18.342.142.925,38	14.874.335.531,00	26.762.624.070,00	27.111.427.104,00
Jumlah Aset Lancar	191.499.415.399,05	194.419.041.887,90	319.660.509.811,03	272.739.502.095,57	332.592.356.353,64
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	117.260.642.043,00	135.760.642.443,00	181.264.411.943,00	222.203.674.543,01	239.736.114.773,42
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	117.260.642.043,00	135.760.642.443,00	181.264.411.943,00	222.203.674.543,01	239.736.114.773,42
Jumlah Investasi jangka Panjang	117.260.642.043,00	135.760.642.443,00	181.264.411.943,00	222.203.674.543,01	239.736.114.773,42
ASET TETAP					
Tanah	687.811.367.939,07	748.341.014.787,27	772.544.218.090,27	926.000.158.260,27	977.748.888.477,27
Peralatan dan Mesin	312.764.676.991,74	353.977.131.419,98	406.317.645.373,44	475.126.770.027,96	541.476.405.093,39
Gedung dan Bangunan	657.662.619.316,70	721.243.693.476,42	763.416.081.575,90	829.532.981.488,75	976.362.664.121,43
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.164.360.183.350,51	1.341.840.376.623,45	1.461.784.907.647,56	1.650.343.539.779,54	1.719.038.501.126,89
Aset Tetap Lainnya	33.712.870.487,48	20.399.815.940,74	24.691.388.757,74	32.220.228.477,74	32.491.704.723,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.352.299.269,00	11.353.529.119,00	7.184.698.175,00	14.890.105.346,00	8.654.237.162,00
Akumulasi Penyusutan	(803.465.112.670,58)	(990.601.710.133,63)	(1.264.062.799.004,59)	(1.512.797.863.658,29)	(1.828.160.906.746,99)
JumlahAsetTetap	2.072.198.904.683,92	2.206.553.851.233,23	2.171.876.140.615,32	2.415.315.919.721,97	2.427.611.493.957,39
JumlahDanaCadangan	-	-	-	18.674.190.608,00	-
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	2.986.577.300,00	2.186.385.000,00	3.657.253.000,00	4.434.990.200,00	4.864.850.200,00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.021.174.300,00)	(1.515.482.050,00)	(1.987.598.500,00)	(2.654.602.850,00)	(3.342.049.800,00)
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	-	18.674.190.608,00	-
Aset Tak Berwujud Netto	965.403.000,00	670.902.950,00	1.669.654.500,00	1.780.387.350,00	1.522.800.400,00
Aset Lain-lain	97.450.996.673,03	25.340.783.697,68	27.823.324.977,66	37.951.461.345,27	52.096.573.628,54
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	(12.800.355.708,82)	(21.324.901.873,20)	(14.433.832.368,80)	(18.350.695.919,31)	(25.698.579.600,21)
Aset Lain Lain Netto	84.650.640.964,21	4.015.881.824,48	13.389.492.608,86	19.600.765.425,96	26.397.994.028,33
Jumlah Aset Lainnya	85.616.043.964,21	4.686.784.774,48	15.059.147.108,86	21.381.152.775,96	27.920.794.428,33
JUMLAH ASET	2.466.575.006.090,18	2.541.420.320.338,60	2.687.860.209.478,21	2.950.314.439.744,51	3.027.860.759.512,78
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	376.453.057,00	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	34.082.075,72	-
Pendapatan Diterima Dimuka	45.140.707.992,22	83.449.438.310,06	1.282.935.995,89	1.344.584.634,32	1.468.798.729,93
Utang Beban	5.928.862.576,86	12.371.652.596,00	19.541.532.271,21	19.784.178.329,77	12.745.166.438,37
Utang Lebih Salur Dana Transfer	-	-	83.398.555.233,00	46.968.303.885,00	46.478.775.550,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	51.069.570.569,08	96.197.543.963,06	104.223.023.500,10	68.131.148.924,81	60.692.740.718,30
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri – Sektor Non Perbankan	-	-	-	12.942.560.400,00	94.912.109.590,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	12.942.560.400,00	94.912.109.590,00
JUMLAH KEWAJIBAN	51.069.570.569,08	96.197.543.963,06	104.223.023.500,10	81.073.709.324,81	155.604.850.308,30
EKUITAS					
JUMLAHEKUITAS	2.415.505.435.521,10	2.445.222.776.375,54	2.583.637.185.978,11	2.869.240.730.419,70	2.872.255.909.204,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.466.575.006.090,18	2.541.420.320.338,60	2.687.860.209.478,21	2.950.314.439.744,51	3.027.860.759.512,78

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020

Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya, yang selanjutnya digunakan untuk bahan menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang. Beberapa hal yang penting untuk dipahami dari analisis ini adalah cakupan proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah Kota Banjarbaru dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung daerah Kota Banjarbaru terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kota Banjarbaru dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

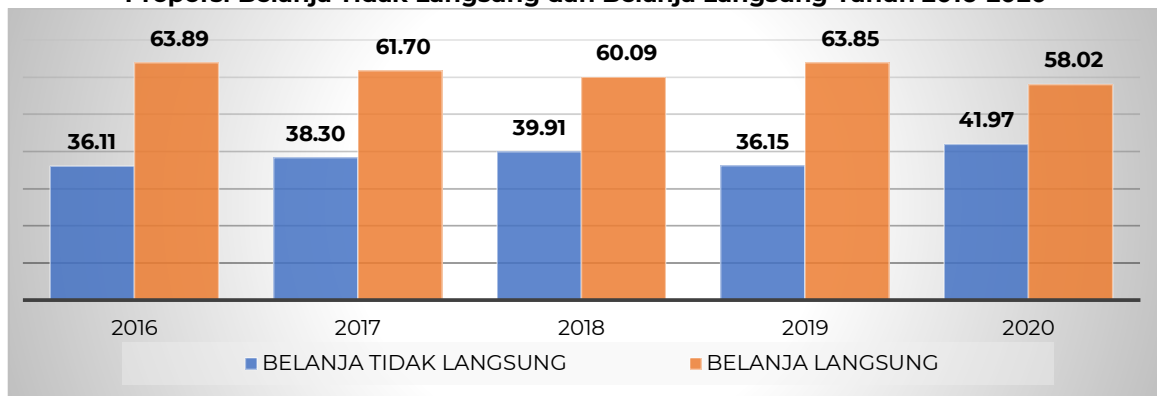
Tabel 3. 6
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun (%)					Proporsi Rata-rata (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Tidak Langsung	36,11	38,30	39,91	36,15	41,97	38,48
Belanja Pegawai	34,63	36,36	38,23	34,56	34,91	35,74
Belanja Subsidi	0,04	0,19	0	0	0	0,046
Belanja Bunga	0	0	0	0,09	0,41	0,1
Belanja Hibah	1,17	1,46	1,45	1,11	3,84	1,80
Belanja Bantuan Sosial	0,12	0,14	0,13	0,28	0,75	0,28
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota & Pem. Desa	0,10	0,12	0,10	0,09	0	0,08
Belanja Tidak Terduga	0,07	0,04	0,005	0,03	2,04	0,43
Belanja Langsung	63,89	61,70	60,09	63,85	58,02	61,51
Belanja Pegawai	3,46	2,99	3,50	3,78	4,68	3,68
Belanja Barang dan Jasa	18,92	27,72	29,41	29,97	26,08	26,42
Belanja Modal	41,51	30,99	27,18	30,10	27,25	31,40

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, diolah

Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sudah memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung. Rata-rata proporsi belanja langsung terhadap total belanja Kota Banjarbaru adalah sebesar 61,51 persen, dan sebaliknya, belanja tidak langsung memiliki rata-rata proporsi sebesar 38,48 persen. Terdapat fluktuasi persentase proporsi belanja langsung terhadap total anggaran belanja Kota Banjarbaru, namun proporsi tersebut tidak pernah kurang dari 50 persen jika dibandingkan dengan total anggaran belanja Kota Banjarbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum dalam 4 tahun terakhir, belanja langsung yang berhubungan dengan program-program pembangunan kota, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik cukup optimal. Sementara itu, komponen belanja tidak langsung dengan proporsi terbesar adalah digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan pada komponen belanja langsung, proporsi terbesar digunakan untuk belanja modal. Proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada grafik 3.11 di bawah ini.

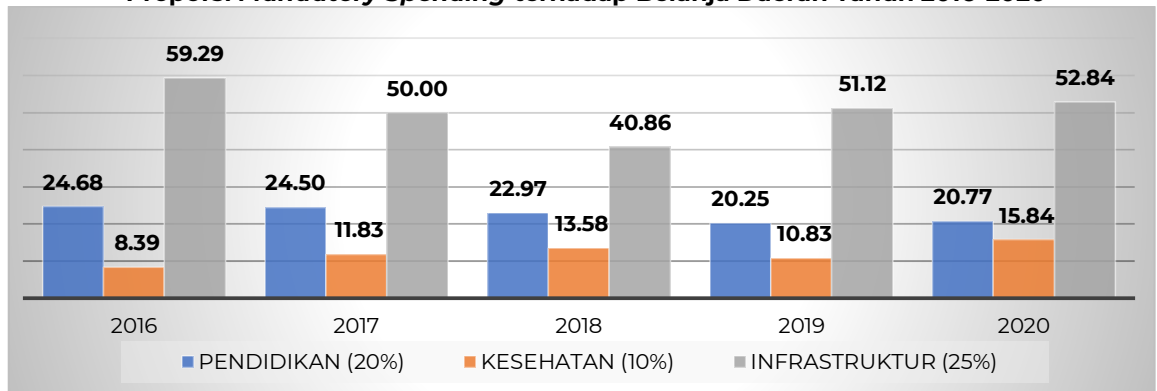
Grafik 3.11
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021 diolah

Untuk komponen belanja daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat juga proporsi *mandatory spending* terhadap belanja daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang disajikan pada grafik 3.12 di bawah ini.

Grafik 3.12
Proporsi *Mandatory Spending* terhadap Belanja Daerah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021 diolah

Berdasarkan data yang dipaparkan pada grafik 3.12 di atas, terlihat bahwa *mandatory spending* untuk bidang Pendidikan dan Infrastruktur sudah memenuhi ketentuan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun, untuk *mandatory spending* bidang Kesehatan, tahun 2016 masih di bawah ketentuan (10 persen), yakni sebesar 8,39 persen. Meskipun demikian, pada tahun-tahun selanjutnya, *mandatory spending* bidang Kesehatan meningkat dan selalu memenuhi ketentuan minimal belanja daerah. Rata-rata proporsi Belanja Pendidikan terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 22,64 persen per tahun. Untuk Belanja Kesehatan, rata-rata memiliki proporsi sebesar 12,09 persen, dengan proporsi terendah pada tahun 2016 dan proporsi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 15,84 persen. Selanjutnya, belanja infrastruktur memiliki rata-rata proporsi sebesar 43,54 persen, yang mengindikasikan bahwa belanja infrastruktur memiliki proporsi yang secara signifikan di atas proporsi *mandatory spending* yakni sebesar 25 persen. Proporsi tertinggi belanja infrastruktur adalah pada tahun 2016, yakni sebesar 59,29 persen. Sedangkan proporsi terendah belanja infrastruktur adalah sebesar 40,86 persen pada tahun 2018.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi deficit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan

maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Tabel 3.7 di bawah ini menyajikan gambaran realisasi defisit anggaran Kota Banjarbaru tahun 2016-2020.

Tabel 3. 7
Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Realisasi Pendapatan Daerah	1.066.849,97	1.009.250,12	1.087.334,00	1.148.124,67	1.191.849,73
	Dikurangi Realisasi Belanja :					
1.	Realisasi Belanja Daerah	1.140.680,60	991.241,80	1.035.577,16	1.198.618,40	1.143.444,58
2.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.000,04	18.500,00	0	28.674,19	15.000,00
B	Surplus/Defisit riil	(89.830,68)	(491,71)	51.756,81	(50.491,71)	33.405,15

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Tabel 3. 8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	203.695,58	118.464,19	118.018,16	169.782,61	103.559,27
2.	Pencairan Dana Cadangan	3.000,00	0	0	0	18.674,19
3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	12.942,56	81.969,55
C	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	206.695,58	118.464,19	118.018,16	182.725,17	204.203,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (B+C)	116.864,90	117.972,48	169.774,97	132.233,46	237.608,16

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, 2021

Berdasarkan tabel 3.7 dan 3.8 di atas, defisit riil anggaran menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, terjadi defisit dimana realisasi pendapatan daerah lebih rendah daripada belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2020, terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih tinggi daripada belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tabel selanjutnya, ditambahkan komposisi penutup defisit riil yang terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi penerimaan daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan bahan untuk memproyeksikan pendapatan dan belanja daerah di masa mendatang yang berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama beberapa tahun ke belakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan, meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan sebagaimana berikut.



Tabel 3. 9
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026

URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	3.01	1,038,107,427,260	1,067,119,125,050	1,097,640,688,731	1,131,752,702,360	1,166,200,756,474	1,203,843,310,910
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.37	239,954,615,915	248,344,928,392	257,821,686,244	270,123,336,832	282,309,706,936	297,115,308,145
PAJAK DAERAH		123,888,000,000	130,000,000,000	135,153,000,000.00	142,456,000,000	150,123,000,000	160,250,000,000
Pajak Daerah		123,888,000,000	130,000,000,000	135,153,000,000	142,456,000,000	150,123,000,000	160,250,000,000
RETRIBUSI DAERAH		11,060,000,000	9,757,000,000	10,500,000,000.00	11,855,000,000	12,900,000,000	14,000,000,000
Retribusi Daerah		11,060,000,000	9,757,000,000	10,500,000,000	11,855,000,000	12,900,000,000	14,000,000,000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		6,956,200,000	7,596,000,000	8,147,000,000.00	8,670,000,000	8,930,100,000	9,198,003,000
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD		6,956,200,000	7,596,000,000	8,147,000,000	8,670,000,000	8,930,100,000	9,198,003,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		98,050,415,915	100,991,928,392	104,021,686,244	107,142,336,832	110,356,606,936	113,667,305,145
Penerimaan Jasa Giro		4,050,000,000	4,171,500,000	4,296,645,000	4,425,544,350	4,558,310,680.50	4,695,060,001
Penerimaan Bunga Deposito		-	-	-	-	-	-
BLUD Rumah Sakit		85,570,780,185	88,137,903,591	90,782,040,698.27	93,505,501,919	96,310,666,976.79	99,199,986,986
BLUD Puskesmas		8,429,635,730	8,682,524,802	8,943,000,545.96	9,211,290,562	9,487,629,279.21	9,772,258,158
PENDAPATAN TRANSFER	2.59	771,430,442,390	791,410,490,848	811,908,022,561	832,936,440,345	854,509,494,150	876,641,290,049
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		680,828,878,000	698,462,345,940	716,552,520,700	735,111,230,986	754,150,611,869	773,683,112,716
Dana Bagi Hasil (DBH)		103,977,386,000	106,670,400,297	109,433,163,665	112,267,482,604	115,175,210,403	118,158,248,353
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambanga		3,588,661,000	3,681,607,320	3,776,960,949	3,874,784,238	3,975,141,150	4,078,097,306
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21		15,051,528,000	15,441,362,575	15,841,293,866	16,251,583,377	16,672,499,386	17,104,317,121
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan		119,433,000	122,526,315	125,699,746	128,955,370	132,295,314	135,721,762
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)		84,030,162,000	86,206,543,196	88,439,292,665	90,729,870,345	93,079,773,987	95,490,540,133
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan		1,128,319,000	1,157,542,462	1,187,522,812	1,218,279,653	1,249,833,096	1,282,203,773
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi		59,283,000	60,818,430	62,393,627	64,009,622	65,667,471	67,368,259
Dana Alokasi Umum (DAU)		425,300,994,000	436,316,289,745	447,616,881,649	459,210,158,884	471,103,701,999	483,305,287,881
Dana Alokasi Umum		425,300,994,000	436,316,289,745	447,616,881,649	459,210,158,884	471,103,701,999	483,305,287,881
Dana Alokasi Khusus (DAK)		135,304,970,000	138,809,368,723	142,404,531,373	146,092,808,735	149,876,612,482	153,758,416,745
DAK Fisik		60,501,829,000	62,068,826,371	63,676,408,974	65,325,627,967	67,017,561,731	68,753,316,580
DAK Non Fisik		74,803,141,000	76,740,542,352	78,728,122,399	80,767,180,769	82,859,050,751	85,005,100,165
Dana Insentif Daerah (DID)		16,245,528,000	16,666,287,175	17,097,944,013	17,540,780,763	17,995,086,985	18,461,159,738
Dana Insentif Daerah		16,245,528,000	16,666,287,175	17,097,944,013	17,540,780,763	17,995,086,985	18,461,159,738
TRANSFER ANTAR DAERAH		90,601,564,390	92,948,144,908	95,355,501,861	97,825,209,359	100,358,882,281	102,958,177,332
Pendapatan Bagi Hasil Provinsi		90,601,564,390	92,948,144,908	95,355,501,861	97,825,209,359	100,358,882,281	102,958,177,332
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor		31,128,594,945	31,934,825,554	32,761,937,536	33,610,471,718	34,480,982,936	35,374,040,394
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		12,277,707,100	12,595,699,714	12,921,928,336	13,256,606,280	13,599,952,383	13,952,191,150
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		39,264,477,215	40,281,427,175	41,324,716,139	42,395,026,287	43,493,057,468	44,619,527,656
Bagi Hasil dari pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		31,850,370	32,675,295	33,521,585	34,389,794	35,280,489	36,194,254
Bagi Hasil Pajak Rokok		7,898,934,760	8,103,517,170	8,313,398,265	8,528,715,280	8,749,609,006	8,976,223,879
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.40	26,722,368,955	27,363,705,810	27,910,979,926.12	28,692,925,183	29,381,555,388	30,086,712,717
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan		26,722,368,955	27,363,705,810	28,020,434,749	28,692,925,183	29,381,555,388	30,086,712,717



RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA	4.00	1,036,289,291,260	1,076,404,626,330	1,153,926,190,011	1,188,038,203,640	1,222,486,257,754	1,260,128,812,191
BELANJA OPERASI	3.73	797,792,592,047	825,465,729,029	880,819,843,962	906,828,796,943	929,727,613,257	957,401,104,735
Belanja Pegawai		430,916,366,071	448,153,020,714	479,523,732,164	493,909,444,129	506,257,180,232	521,444,895,639
Belanja Barang dan Jasa		320,454,721,721	333,272,910,590	356,602,014,331	367,300,074,761	376,482,576,630	387,777,053,929
Belanja Bunga		5,512,137,700	1,903,150,174	-	-	-	-
Belanja Hibah		38,069,457,574	39,211,541,301	41,564,233,779	42,395,518,454.88	43,667,384,009	44,759,068,609
Belanja Bantuan Sosial		2,839,908,981	2,925,106,250	3,129,863,688	3,223,759,599	3,320,472,387	3,420,086,558
BELANJA MODAL	4.74	228,496,699,213	238,938,897,301	259,106,346,049	266,209,406,697	277,758,644,497	287,727,707,456
Belanja Modal Tanah		24,815,810,159	25,560,284,464	27,349,504,376	28,716,979,595	29,865,658,779	31,149,882,106
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		39,911,342,538	41,507,796,240	44,828,419,939	46,173,272,537	48,020,203,438	50,181,112,593
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		44,591,148,339	46,804,553,443	50,606,194,895	52,130,879,790	54,442,075,367	56,841,429,644
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		115,625,651,629	121,406,934,210	132,333,558,289	134,980,229,455	141,054,339,781	145,003,861,295
Belanja Modal Aset tetap Lainnya		3,552,746,548	3,659,328,944	3,988,668,549	4,208,045,320	4,376,367,132	4,551,421,817.74
BELANJA TIDAK TERDUGA	8.76	10,000,000,000	12,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
Belanja Tidak Terduga		10,000,000,000	12,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
PEMBIAYAAN		(1,818,136,000)	9,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280
Penerimaan Pembiayaan Daerah		55,181,864,000	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya		55,181,864,000	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		57,000,000,000	47,000,000,000	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah		10,000,000,000	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		47,000,000,000	47,000,000,000	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah/Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah , 2020

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru sebagaimana tabel di 3.10 bawah ini.



Tabel 3. 10

Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

Uraian	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	1,038,107,427,260	1,067,119,125,050	1,097,640,688,731	1,131,752,702,360	1,166,200,756,474	1,203,843,310,910
PENDAPATAN ASLI DAERAH	239,954,615,915	248,344,928,392	257,821,686,244	270,123,336,832	282,309,706,936	297,115,308,145
PENDAPATAN TRANSFER	771,430,442,390	791,410,490,848	811,908,022,561	832,936,440,345	854,509,494,150	876,641,290,049
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,722,368,955	27,363,705,810	27,910,979,926	28,692,925,183	29,381,555,388	30,086,712,717
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55,181,864,000	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280	56,285,501,280
TOTAL PENERIMAAN	1,093,289,291,260	1,123,404,626,330	1,153,926,190,011	1,188,038,203,640	1,222,486,257,754	1,260,128,812,190
DIKURANGI						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	57,000,000,000	47,000,000,000	-	-	-	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	1,036,289,291,260	1,076,404,626,330	1,153,926,190,011	1,188,038,203,640	1,222,486,257,754	1,260,128,812,190

Sumber : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, di olah

BAB 4



PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Banjarbaru untuk periode 2021-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Banjarbaru. Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Banjarbaru. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan Panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Banjarbaru ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya serta telaahan pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya, sehingga rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah di Kota Banjarbaru.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan Pembangunan secara umum, yaitu : **Pertama, Terbatasnya anggaran pembangunan daerah.** Dalam konteks pembangunan daerah di Kota Banjarbaru, APBD menduduki posisi yang sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kota Banjarbaru. APBD Kota Banjarbaru diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, nilai belanja pegawai sudah ideal dengan persentase sebesar 38% dari keseluruhan belanja. Dalam kondisi ideal, persentase belanja pegawai harus lebih kecil dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan akan terpenuhi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan memiliki kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Untuk itu harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kota Banjarbaru. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih).

APBD Kota Banjarbaru masih ditopang dari sebagian besar Dana Transfer, untuk itu tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga

dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat keterpaduan, saling mendukung dan saling memperkuat dalam rangka mencapai sinergi melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait sampai pada level pemerintah pusat dan provinsi, dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, maka harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah.

Kedua, Ketersediaan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perwujudan Banjarbaru sebagai kota Jasa tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai. Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat ditingkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta diangkat harkat dan daya saing Indonesia dalam tatanan global. Dalam pembangunan infrastruktur ini, tantangan yang dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan kemiskinan ditengah tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pelayanan umum, sementara di sisi lain kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau terkendala oleh keterbatasan anggaran.

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatannya. Pembangunan infrastruktur perlu diorientasikan kepada penanggulangan kemiskinan di daerah, yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerjasama melalui kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Untuk itu, kapasitas masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan infrastruktur fungsi dan peran masing-masing dapat saling melengkapi. Pemerintah, pada khususnya, akan terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan program dan kebijakanyang berpihak kepada masyarakat miskin.

Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa dalam meningkatkan daya saing daerah.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan Pemerintahan daerah di uraikan sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan secara umum dalam urusan Pendidikan adalah **belum tercapainya kualitas pendidikan masyarakat sesuai standar** yang disebabkan oleh :

- Masih adanya sarana prasana dalam kondisi rusak.
- Rasio ketersediaan lanjutan pendidikan dasar di setiap kecamatan belum terpenuhi.
- Pendidikan vokasi belum optimal dalam rangka meningkatkan keterampilan.
- Belum tersedianya Pendidikan inklusi secara merata
- Keterbatasan akses internet bagi masyarakat marginal untuk anaknya yang sekolah daring
- Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
- Belum dicapainya Prestasi Non Akademik Siswa di tingkat Nasional.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan secara umum urusan Kesehatan adalah **belum tercapainya kualitas kesehatan masyarakat sesuai standar** yang disebabkan oleh :

- Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Masih ditemukannya prevalensi stunting
- Masih kurangnya pelayanan kesehatan bagi balita, lansia dan disabilitas.
- Masih cukup tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
- Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis.
- Masih rendahnya perilaku budaya hidup sehat pada masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan secara umum urusan pekerjaan umum adalah **belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang pekerjaan umum** yang disebabkan oleh :

- Masih kurangnya konektivitas menuju kawasan strategis.
- Masih ditemukannya kawasan rawan banjir
- Masih belum terpenuhinya pelayanan air untuk pemenuhan pertanian
- Masih belum tercapainya RTH sesuai ketentuan
- Masih belum terpenuhinya pelayanan air minum dan air limbah

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan secara umum pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah **belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman** yang disebabkan oleh :

- Belum optimalnya penataan bangunan yang terkendali
- Masih adanya kawasan perumahan yang belum didukung PSU yang memadai
- Masih ada kawasan permukiman kumuh.
- Masih kurangnya penataan bangunan akibat bencana dan program pemerintah.
- Belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang perumahan dan permukiman.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan secara umum pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah **masih adanya pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** yang disebabkan oleh :

- Belum optimalnya sosialisasi Perda/Perwali kepada masyarakat
- Masih kurangnya sarana prasarana pendukung tupoksi Satpol PP
- Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran.

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang ada pada urusan sosial adalah **peningkatan angka kemiskinan dan masih belum optimalnya penanganan pasca bencana** yang disebabkan oleh :

- Masih rendahnya kemampuan PSKS.
- Belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin
- Belum terintegrasinya kegiatan penganggulangan kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Belum optimalnya jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin
- Belum optimalnya pemberian bantuan bagi korban pasca bencana.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang ada pada urusan tenaga kerja adalah **peningkatan pengangguran** yang disebabkan oleh :

- Pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pengaruh pandemi COVID-19.

- b. Masih rendah/belum tersedianya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan.
- c. Masih rendahnya minat masyarakat bekerja pada sektor informal.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang ada pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah **masih adanya kesenjangan gender** yang disebabkan oleh :

- a. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan.
- b. Belum terpenuhinya fasilitas publik yang responsif gender.
- c. Masih adanya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Urusan Pangan

Permasalahan yang ada pada urusan Pangan adalah **belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat** yang disebabkan oleh :

- a. Semakin berkurangnya lahan pertanian
- b. Semakin berkurangnya minat masyarakat dalam bidang pertanian.
- c. Masih kurangnya inovasi dalam bidang pertanian.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang ada pada urusan Lingkungan hidup adalah **masih rendahnya kualitas lingkungan hidup** yang disebabkan oleh:

- a. Penurunan kualitas air sungai dan udara yang disebabkan oleh kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
- b. Peningkatan produksi sampah seiring peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah sarana dan prasarana persampahan.
- b. Masih maraknya TPS liar.
- c. Kebijakan pengelolaan limbah belum seluruhnya ditaati oleh para pelaku usaha

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang ditemui pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih **belum optimalnya pelayanan kependudukan** yang disebabkan oleh :

- a. Masih belum validnya data kependudukan untuk digunakan sebagai data organisasi perangkat daerah (OPD)
- b. Masih kurangnya sarana prasarana untuk melayani masyarakat

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang ditemui pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** yang disebabkan oleh :

- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang ditemui pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **masih rendahnya partisipasi akseptor KB** yang disebabkan oleh :

- a. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum ber KB.

8. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang ditemui pada urusan Perhubungan antara lain adalah **belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang perhubungan** yang disebabkan oleh :

- a. Belum terpenuhinya sarana prasarana perhubungan sesuai standarnya.
- b. Masih adanya kemacetan pada kawasan dan waktu tertentu.
- c. Belum terpenuhinya angkutan umum dan pelajar.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang ditemui pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah **Belum optimalnya fasilitas TI dalam mendukung pelayanan informasi publik** yang disebabkan oleh :

- a. Beberapa pejabat penghubung menanggapi laporan masih sekedar formalitas, tidak disertai dengan dokumentasi sebelum atau sesudah laporan ditanggapi.
- b. Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Kelompok Infomrasi Masyarakat masih kurang baik di kalangan remaja maupun golongan masyarakat yang sudah tua.
- c. masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana bagi keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat.
- d. Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran informasi masih kurang baik dan cenderung informasi yang diterima tidak dipilah atau ditelaah dulu kebenarannya.
- e. Dengan sarana komunikasi yang ada masyarakat lebih cepat menerima informasi dari berbagai media yang ada.
- f. Admin SIP-PPID pada unit kerja masih ada yang tidak mengunggah data ke aplikasi sehingga target kinerja 100% tidak dapat tercapai.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang ada pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **Menurunnya pertumbuhan pelaku UMKM** yang disebabkan oleh :

- a. Menurunnya omzet penjualan produk UMKM.
- b. Masih kurangnya inovasi produk UMKM yang bersaing di pasar
- c. Masih rendahnya kualitas keterampilan pelaku UMKM yang memenuhi pangsa pasar.

11. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang ada pada urusan Penanaman Modal adalah **Menurunnya investasi daerah** yang disebabkan oleh :

- a. Menurunnya daya beli (konsumtif) masyarakat akibat penurunan pendapatan per kapita masyarakat.
- b. Masih belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung investasi.
- c. Belum optimalnya ketersediaan data/informasi potensi/ peluang investasi daerah.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang ada pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah **Masih rendahnya daya saing prestasi olahraga** yang disebabkan oleh :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional/internasional.
- b. Masih kurangnya pembinaan olahraga

13. Urusan Statistik

Permasalahan yang ada pada urusan Statistik **Masih belum optimalnya pemanfaatan data statistik oleh masyarakat/instansi pemerintah** yang disebabkan oleh :

- a. Masih belum optimalnya Tim Pengelola Informasi Publik Pemerintah Daerah pada SKPD.
- b. Masih belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi dan data pembangunan.
- c. Masih banyaknya data sektoral yang tidak termutakhirkan.

14. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang ada pada Urusan Kebudayaan adalah menurunnya pertumbuhan sektor pariwisata dampak pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. Masih adanya situs bersejarah yang belum dapat dilestarikan karena tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga/ahli waris.
- b. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan seni budaya.
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peninggalan sejarah.

15. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang ada pada Urusan Perpustakaan adalah **Belum terpenuhinya perpustakaan sesuai standar** yang disebabkan oleh :

- a. Masih kurangnya fungsional pustakawan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan khusus.

16. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang ada pada Urusan Kearsipan adalah **Belum optimalnya pengelolaan arsip** yang disebabkan oleh :

- a. Terbatasnya jumlah arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- b. Tidak adanya pengelola kearsipan di SKPD
- c. Belum semua SKPD mempunyai ruang penyimpanan arsip
- d. Masih belum tertibnya pengelolaan surat mulai tahap penciptaan, penggunaan dan istirahat.
- e. Masih terbatasnya layanan arsip bagi Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

17. Urusan Persandian

Permasalahan yang ada pada urusan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Proses pembahasan dokumen kebijakan belum bisa diterbitkan, karena terkait peraturan turunan dari pusat mengenai keamanan siber yang belum diterbitkan karena pergantian Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang ada pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah **Belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat bidang perikanan** sebagai berikut :

- a. Berkurangnya pelaku usaha penangkapan/nelayan
- b. Berkurangnya lokasi penangkapan karena perubahan fungsi lahan.
- c. Masih kurangnya inovasi perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang muncul pada urusan pariwisata adalah menurunnya **pertumbuhan sektor pariwisata** yang disebabkan oleh :

- a. Kurangnya kegiatan Pembangunan atau pengembangan amenities di Destinasi Wisata.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar Destinasi dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan sekitar Destinasi
- c. Belum optimalnya data kunjungan wisata baik dari kunjungan hotel maupun kunjungan destinasi.

3. Urusan Pertanian dan Peternakan

Permasalahan yang ada pada Urusan Pertanian dan peternakan adalah **Belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat bidang pertanian dan peternakan** yang disebabkan oleh :

- a. Semakin berkurangnya lahan pertanian
- b. Masih kurangnya inovasi bidang pertanian dan peternakan
- c. Berkurangnya pelaku usaha pertanian/peternakan

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang ditemui pada urusan Perdagangan adalah :

- Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pasar.
- Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar.
- Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang ada pada urusan Perindustrian adalah **Menurunnya pertumbuhan pelaku IKM** yang disebabkan oleh :

- Menurunnya omzet penjualan produk IKM.
- Masih kurangnya inovasi produk IKM yang bersaing di pasar
- Masih rendahnya kualitas keterampilan pelaku IKM yang memenuhi pangsa pasar.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang ada pada bidang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama tidak optimal terkendala pandemi.
- Waktu pelaksanaan Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Sadar Hukum harus menyesuaikan jadwal kegiatan pada Kelurahan/Kecamatan yang akan bekerjasama dengan Bagian Hukum.
- Pada kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha memiliki hambatan pada laporan akhir dari masing-masing SKPD yang mendapatkan CSR (menyalurkan CSR tidak terkordinir dengan banyak diberikan BUMD)
- Masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya ijin mendirikan bangunan (IMB)

2. Bidang Pengawasan

Permasalahan yang ditemui pada Bidang Pengawasan adalah **Masih belum optimalnya kapasitas APIP** yang disebabkan oleh :

- SOP kegiatan tidak berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- Tertumpuknya beberapa kegiatan pada, beberapa APIP (melaksanakan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan.
- Indikator kinerja program persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan tidak memenuhi target kinerja.
- Realisasi indikator kinerja menunggu hasil verifikasi oleh Lembaga eksternal (Inspektorat Provinsi Kalsel, BPK, dan BPKP) sehingga terjadi keterlambatan pengukuran kinerja.

3. Bidang Perencanaan

Permasalahan yang ada pada Bidang Perencanaan adalah sebagai berikut :

- Masih perlunya peningkatan SDM aparatur perencanaan
- Masih perlunya peningkatan koordinasi perencanaan lintas bidang/SKPD.
- Masih kurangnya data/informasi yang update untuk bahan penyusunan perencanaan.

4. Bidang Keuangan

Permasalahan yang ditemui pada Bidang Keuangan adalah **Menurunnya Pendapatan Asli Daerah dan Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah** yang disebabkan oleh :

- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak yang menurun akibat dari pandemi Covid-19 dan faktor lainnya, mengakibatkan banyaknya permintaan pengajuan keberatan dan keringanan pembayaran PBB dan BPHTB.
- b. Subjek pajak berdomisili di luar daerah Kota Banjarbaru (luar Provinsi Kalimantan Selatan) sehingga sulit melakukan penagihan/koordinasi dengan Wajib Pajak yang mengakibatkan tidak maksimal.
- c. Masih kurangnya pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- d. Belum dapat di gunakannya SIPD dalam penatausahaan keuangan.
- e. Masih banyaknya aset daerah yang belum tercatat atau belum di laporkan secara berkala.

5. Bidang Kepegawaian

Permasalahan yang ada pada Bidang Kepegawaian adalah **Masih rendahnya profesionalitas ASN** yang disebabkan oleh :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan analisis jabatan
- b. Masih kurangnya peningkatan kompetensi ASN
- c. Belum optimalnya pemberian sanksi dan penghargaan kepada ASN

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang ditemui pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah **Masih rendahnya kompetensi aparatur** yang disebabkan oleh :

- a. Terbatasnya kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM aparatur
- b. Pola karir ASN belum dituangkan dalam kebijakan kepala daerah (perkada).
- c. Belum sinerginya kebutuhan kompetensi SDM aparatur dengan lembaga penyelenggara pendidikan (belum ada link and match).
- d. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi (tugas belajar) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang ada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah **Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan masih kurangnya inovasi daerah** yang disebabkan oleh :

- a. Masih belum di implementasikannya hasil penelitian oleh SKPD terkait.
- b. Masih kurangnya inovasi daerah yang di inisiasi oleh SKPD

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Penelaahan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Perbedaan SDGs dengan MDGs adalah SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target, di mana MDGs hanya memiliki 8 tujuan. Oleh karenanya, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan dapat lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yakni manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, oleh karenanya, disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :

1. Tanpa kemiskinan (*no poverty*);
2. Tanpa Kelaparan (*Zero hunger*);
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*good health and wellbeing*);
4. Pendidikan berkualitas (*Quality Education*);
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*);
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and sanitation*);
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean energy*);
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent work and Economic Growth*);
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*);
10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*);
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable Cities and Communities*);
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible consumption and Production*);
13. Aksi terhadap iklim (*Climate Action*);
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*);
15. Kehidupan di darat (*Life on Land*);
16. Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); dan
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Dengan berlandaskan tujuan tersebut, Kota Banjarbaru berkeinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan TPB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2017 yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah dengan dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) di Banjarbaru terkait pada 28 unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals/SDGs

No.	SKPD	Mencapai target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
1	Bagian Hukum SETDA	-	-	4	-	4
2	Bagian Organisasi SETDA	3	-	-	-	3
3	Bagian Pengadaan barang dan jasa SETDA	1	-	-	-	1
4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA	1	1	3	-	5
5	BPBD	2	1	13	-	16
6	BPDASHL	-	1	-	-	1
7	BPKH	-	1	-	-	1
8	BPS	8	5	1	-	14
9	Dinas Kesehatan	33	6	1	-	40
10	Dinas Lingkungan Hidup	6	-	5	-	11
11	Dinas Pendidikan	11	3	-	-	14
12	Dinas Perhubungan	-	-	2	3	5
13	Dinas PUPR	9	-	3	1	13
14	Dinas Sosial	2	2	2	-	6
15	Inspektorat	1	-	1	-	2
16	Kepolisian	3	1	3	-	7
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	4	4	2	-	10
18	Dinas DISDALDUK KB PMP & PA	18	7	4	-	29
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	2	-	-	-	2
20	BPKAD2	2	1	-	-	3

No.	SKPD	Mencapai target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	3	1	1	-	5
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	6	-	9
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	2	-	3	-	5
24	Dinas Perdagangan	1	-	2	-	3
25	Bappelitbangda	1	-	4	-	5
26	Bappeda Prov	1	-	3	-	4
27	Dinas LH Prov atau Dinas PUPR Prov	-	-	1	-	1
28	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1	2	-	-	3
Total		117	37	64	4	222

Sumber : Bappeda Kota Banjarbaru, 2021.

4.2.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Isu-isu nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Isu-isu yang dirumuskan untuk masa depan berusaha untuk menjawab dan mengantisipasi tantangan dan ancaman dalam jangka Panjang. Dalam pembangunan Kota Banjarbaru, isu-isu nasional berikut menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota Banjarbaru :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, perlu adanya peningkatan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi tersebut akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui hal-hal berikut ini :

- Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertahanan serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, perlu adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kondisi yang berkelanjutan dan inklusif dilakukan melalui Langkah-langkah berikut :

- Pengembangan sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
- Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, negara harus menyadari bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui hal-hal berikut :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
- c. Peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta
- d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas, anak, perempuan, dan pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan yang penting dan berperan utama dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- c. Moderasi beragama
- d. Penguatan budaya dan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui :

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam pembangunan nasional, perlu adanya perhatian terhadap daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui hal-hal berikut :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik, negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Hal ini dapat dicapai melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas
- b. Penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan

- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industry pertahanan.

4.2.3 Penelaahan Terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Pembangunan Kota Banjarbaru tidak hanya memperhatikan isu-isu internasional maupun nasional saja, namun juga memperhatikan isu provinsi. Isu-isu provinsi ini menjadi perhatian dalam pengkajian isu-isu strategis Kota Banjarbaru dalam penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru. Berikut ini isu-isu provinsi yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kota Banjarbaru :

1. Ekonomi Melambat

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berada di kawasan tropis sehingga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi pelaksana pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan baik secara makro maupun mikro. Sumber daya alam tersebut berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomian melalui eksploitasi sumber daya alam baik terbaharui maupun tak terbaharukan.

Seiring berjalannya waktu, eksploitasi sumber daya alam mulai memunculkan sebuah permasalahan terkait lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam memberikan efek negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dimana terjadi degradasi yang mengancam masa depan generasi mendatang. Eksploitasi yang paling mengkhawatirkan adalah eksploitasi sumber daya mineral yang merupakan sumber daya tak terbaharui. Meskipun sudah ada UU minerba, namun perihal pertambangan dan penggalian sumber daya mineral harus tetap mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan pergerakan perekonomian wilayah.

Keterkaitan eksploitasi sumber daya mineral dan perekonomian daerah sangat erat terutama di Provinsi Kalimantan Selatan mengingat dominasi struktur ekonomi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan iklim global akibat degradasi kualitas lingkungan hidup serta menurunnya produksi bahan tambang dan galian, maka perlu perlahan-lahan dilakukan perubahan dominasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan.

Jika melihat salah satu tujuan pembangunan internasional terkait pembangunan berkelanjutan, maka perubahan struktur perekonomian Kalimantan Selatan adalah pergeseran dominasi sector pertambangan dan penggalian menjadi sector pertanian sebagai sector yang memiliki kontribusi terbesar kedua sekaligus sector yang megeksplorasi sumber daya alam terbaharukan. Meskipun kedua sector tersebut memiliki gap yang jauh dalam andil struktur ekonomi, namun jika shifting sector ekonomi dominan ini dilaksanakan dengan kontinu dan komitmen tinggi, maka bukan tidak mungkin pergeseran dominasi struktur akan terjadi dengan dampak positif pada lingkungan hidup.

2. Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

3. Lingkungan Hidup

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Namun Tidak dapat dipungkiri, pertambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dinilai berdasarkan kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan/hutan. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

4. Sarana Prasarana Dan Energi

Pembangunan daerah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu regional wilayah sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun perlu digarisbawahi bahwa salah satu inti dari tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batubara di Indonesia. Namun dalam pemanfaatannya, batubara belum menjadi salah satu sumber energinaturan Selatan. Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Hal ini merupakan amanat menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 disertai Peraturan menteri ESDM No. 25 tahun 2013, tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mickro hidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogass, dan sampah kota.

5. Pandemi Covid 19

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami penyebaran pandemic Novel Corona Virus-2019 (Covid-19). Pandemi ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya pengangguran karena banyak pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan di PHK, meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang

dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian regional melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

7. Ibu Kota Negara Di Kaltim

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemindahan Ibu Kota Negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu yang mendasari pemindahan ibukota negara yaitu mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

4.2.4 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025

Penelaahan terhadap isu strategis RPJPD Kota Banjarbaru juga merupakan perhatian dalam penentuan isu strategis pada RPJMD, karena RPJMD yang disusun merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke-empat atau pencapaian tahap akhir dari perencanaan jangka panjang Kota Banjarbaru. Berikut ini isu-isu strategis RPJPD yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kota Banjarbaru :

1. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah social;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
7. Kualitas pelayanan publik;
8. Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
9. Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

4.2.5 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun letak wilayah Kota Banjarbaru memiliki perbatasan dengan 2 (dua) wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan lintas kabupaten/kota tentunya akan di akselerasikan dalam dokumen perencanaan agar dalam penentuan kebijakan strategis dapat sejalan tanpa ada pertentangan dalam tahap pelaksanaan.

4.2.6 Penelaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026. Isu pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan KLHS RPJMD dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Berdasarkan Pokja

Berdasarkan FGD 1 Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan strategis disepakati pada sebagai berikut : Kemiskinan, Pengangguran, Sumber Daya Manusia, Ketersediaan air Bersih, Infrastruktur, Persampahan, Pola Hidup Bersih dan Sehat, Kebakaran Hutan dan Lahan, Destinasi wisata dan Ruang Terbuka Hijau-Kahati

2. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Berdasarkan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan capaian indikator SDGs/TPB, maka diperoleh isu PB strategis berdasarkan capaian TPB adalah : TPB-1 Kemiskinan, TPB-6 Air Bersih, TPB-9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB-11 Kota dan Pemukiman dan TPB-15 Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat

3. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup

Berdasarkan kondisi 6 muatan terdiri atas DDDT, Jasa Ekosistem (JE) dan lainnya diperoleh isu PB strategis sebagai berikut : Alih fungsi lahan, Pengelolaan Persampahan, Penurunan kualitas udara & kuantitas air, Ketahanan pangan (berkurangnya lahan sawah), Pencemaran dan limbah B3, Kebakaran hutan dan lahan dan Peningkatan lahan kritis.

4. Isu Prioritas

Berdasarkan kondisi umum wilayah Kota Banjarbaru, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup, maka pemangku kepentingan menyepakati isu PB Prioritas sebagai berikut : **Kemiskinan, Infrastruktur, Persampahan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Destinasi wisata dan Alih Fungsi Lahan.**

4.2.7 Isu Strategis RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaah, terdapat 8 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Banjarbaru. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi.

1. Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing

- a. Belum tercapainya kualitas pendidikan masyarakat sesuai standar

Permasalahan belum tercapainya kualitas pendidikan masyarakat sesuai standar adalah banyaknya sarana prasarana dalam kondisi rusak, belum terpenuhinya rasio ketersediaan lanjutan pendidikan dasar di setiap kecamatan, pendidikan vokasi yang belum optimal dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah, belum tersedianya pendidikan inklusi secara merata, belum terpenuhinya angkutan umum untuk memenuhi angkutan pelajar dan belum terpenuhinya perpustakaan sesuai standar.

- b. Belum tercapainya kualitas kesehatan masyarakat sesuai standar

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita, sarana prasarana kesehatan masih belum standar dan masih kurangnya tenaga kesehatan untuk spesialis tertentu, masih belum terpenuhinya peserta jaminan kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan rumah sakit yang sesuai standar, masih rendahnya partisipasi akseptor KB.

- c. Masih tingginya kasus stunting

Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya daya saing prestasi olahraga, belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan belum optimalnya pengelolaan SPAM dan Air Limbah

- d. Masih adanya kesenjangan gender

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, masih kurangnya sarana prasarana publik responsif gender dan belum optimalnya penganggaran responsif gender

- e. Menurunnya daya beli masyarakat dampak pandemi COVID-19

Masih belum optimalnya tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah, belum optimalnya monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

- f. Masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan potensi konflik SARA guna menjaga kondusivitas wilayah

Belum optimalnya pembinaan keagamaan, masih adanya pelanggaran terhadap Perda, belum optimalnya koordinasi penanganan kebencanaan dan pasca bencana.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat yang Belum Merata

- a. Menurunnya pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM dan IKM dampak pandemi COVID-19

Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan, belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Banjarbaru dan kabupaten/kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan kampung tematik.

- b. Menurunnya pendapatan asli daerah dan Investasi dampak pandemi COVID-19
Penanaman Modal

Masih rendahnya investasi dan pendapatan asli daerah jika dilihat dari potensi Kota Banjarbaru menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor dan promosi potensi daerah adalah langkah kedepan.

- c. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran

Meningkatnya pengangguran yang disebabkan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja informal yang menyebabkan juga terjadinya peningkatan kemiskinan.

- d. Belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat

Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan pertanian dan masih belum terpenuhinya penyediaan irigasi untuk pemenuhan pertanian menjadi tantangan bagi Kota Banjarbaru untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan,

3. Belum terpenuhinya Infrastruktur Daerah yang berkualitas dan masih rendahnya kualitas Lingkungan Hidup.

Pembangunan infrastruktur pada daerah strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan. Masih adanya kawasan rawan banjir pada titik tertentu, jalan yang memiliki drainase namun tidak berfungsi baik. Pelayanan angkutan belum melayani disetiap wilayah juga menjadi salah satu penyebab konektifitas antar wilayah. Kualitas lingkungan yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang. Masih adanya kawasan kumuh yang perlu di selesaikan, belum tercapainya luasan minimal Ruang Terbuka Hijau Publik dan perlunya peningkatan pengendalian pembangunan bangunan.

4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional, beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah, masih rendahnya kapasitas APIP, masih rendahnya profesionalisme ASN, belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, belum optimalnya pengelolaan arsip, belum optimalnya pelayanan perizinan, belum optimalnya pelayanan kependudukan, belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan belum optimalnya fasilitas TI dalam mendukung pelayanan informasi publik.

BAB 5



VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Berdasarkan visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah terpilih serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 adalah :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”



Dalam upaya mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Banjarbaru diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Banjarbaru terdepan dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan dan dapat berdaya saing pada tingkat regional dan nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tersaji pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)	MAJU	Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
	AGAMIS	Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025
	SEJAHTERA	SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintah yang baik.

Rumusan Visi RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kota Banjarbaru 2005-2025, visi RPJMD provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, dan visi RPJMN 2019-2024. Dalam upaya menjamin konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD Kota Banjarbaru. Keterkaitan visi Kota Banjarbaru dengan RPJPD Kota Banjarbaru 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi RPJMD Kota Banjarbaru dengan RPJPD,
RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN

Visi RPJMN 2019-2024	Visi RPJMD Kalsel 2021-2026	Visi RPJPD Banjarbaru 2005-2025	Visi RPJMD Banjarbaru 2021-2026
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG	-	TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN	BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)

Visi pembangunan Kota Banjarbaru dirumuskan berdasarkan kerangka logis pencapaian. Setidaknya terdapat tiga pilar untuk mencapai visi Banjarbaru Juara yaitu : (1) Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing berlandaskan nilai agama dan budaya, (2) Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif; dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah. Kerangka logis pencapaian visi tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

BANJARBARU JUARA		
Sumber Daya Manusia Berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif	Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Gini	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) • Angka Harapan Hidup • Angka Prevalensi Stunting • Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Angka Inflasi • Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran perda	• Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota • Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa • Persentase peningkatan PAD • Persentase peningkatan investasi daerah • Angka Kemiskinan • Angka Pengangguran • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan • Indeks Infrastruktur wilayah • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Nilai SAKIP • Nilai LPPD • Opini BPK • Indeks Penerapan Manajemen Resiko (Manajemen Resiko Index) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah • Indeks Kepatuhan • Indeks Profesional Aparatur • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tiga pilar pencapaian visi diharapkan dapat mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (JUARA). Pilar pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing berlandaskan nilai agama dan budaya di indikasikan oleh kondisi masyarakat yang berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Pilar kedua, pembangunan ekonomi berkualitas dan inklusif yaitu pembangunan tidak hanya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga pada aspek pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pilar terakhir adalah tata kelola pemerintahan yang amanah yang diindikasikan oleh indeks reformasi birokrasi.

5.2 Misi

Terdapat tiga misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2021-2026. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 4
Perumusan dan Penjelasan Misi

Visi	Misi	Penjelasan Misi
BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, peningkatan kinerja pembangunan kesehatan dan pembangunan gender. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.
	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Diwujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Diwujudkan dengan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Dalam periode 2021-2026 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi

Visi	Misi	Penjelasan Misi
		birokrasi secara optimal, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan <i>smart government</i>, dimana pelayanan dilaksanakan memanfaatkan TIK dan Pelayanan publik yang partisipatif dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media serta pelayanan publik yang inovatif melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Sesuai dengan visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Tujuan pembangunan ditetapkan pada misi ini adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kesetaraan gender
4. Terjaganya Daya Beli Masyarakat
5. Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatnya penanganan kebencanaan

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis pencapaian Misi-1 disajikan dalam tabel 5.5 berikut :

Tabel 5. 5
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
TUJUAN
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

SASARAN (S)				
S1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	S2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	S3 : Meningkatnya Kesetaraan gender	S4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat	S5 : Meningkatnya toleransi beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat
INDIKATOR SASARAN				
Indikator S1 : Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Indikator S2 : 1. Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Angka Prevalensi Stunting	Indikator S3 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indikator S4 : Angka Inflasi	Indikator S5 : 1. Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda 2. Persentase Penyelesaian Kebencanaan

Misi 2 :

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan pembangunan yang ditetapkan pada misi ini adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusi yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatnya kegiatan perekonomian kota
- Meningkatnya pendapatan asli daerah dan nilai investasi daerah
- Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
- Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan
- Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kerangka logis pencapaian misi kedua sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas dapat diuraikan dalam tabel 5.6 berikut :

Tabel 5. 6

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup					
TUJUAN 1					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan					
INDIKATOR TUJUAN 1					
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini					
SASARAN (S)					
S1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	S2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	S3 : Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	S4 : Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	S5 : Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas.	S6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SASARAN					
Indikator S1 : 1. Persentasi Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata 2. Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil dan ekonomi kreatif	Indikator S2 : 1. Persentase peningkatan PAD 2. Persentase peningkatan investasi daerah	Indikator S3 : 1. Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	Indikator S4 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Indikator S5 : Indeks Infrastruktur Wilayah	Indikator S2 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Misi 3 :**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah**

Tujuan pembangunan ditetapkan untuk misi ini adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi ketiga yang disajikan dalam tabel 5.7 sebagai berikut :

Tabel 5. 7
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
TUJUAN		
Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN		
INDIKATOR TUJUAN		
Indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN (S)		
S1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	S2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN		
Indikator S1 : 1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK 4. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) 5. Indeks Profesionalitas Aparatur	Indikator S2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indikator S3 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam tabel 5.8 berikut ini.



Tabel 5.8
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,10	79,20	79,30	79,40	79,50	79,60	79,70	79,70
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,95	10,96	10,97	10,98	10,99	11,00	11,01	11,01
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,99	72,10	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,60
	3. Angka Prevalensi Stunting	Angka	14,19	14,05	14,00	13,95	13,90	13,85	13,80	13,80
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan gender	4. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	92,80	92,85	92,85
Sasaran 4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat	5. Angka Inflasi	%	2,25	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Sasaran 5 : Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	6. Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	7. Persentase Penyelesaian Kebencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,88	2 - 3	4	4 - 5	5	5 - 6	6,93	6,93
	Indeks Gini	Indeks	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
Sasaran 1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	8. Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PAD Kota	%	-7,22	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50
	9. Pertumbuhan UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	%	-0,67	3,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	6,50
Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	10. Peningkatan PAD (Milyar)	Rp	-	238,7	246,6	254,5	264,3	273,2	300,7	300,7
	11. Peningkatan Investasi Daerah (Milyar)	Rp	-	137	142	147	152	158	163	163
Sasaran 3 : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	12. Angka Kemiskinan	%	4,01	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50	3,50
	13. Angka Pengangguran	%	5,54	5,39	5,24	5,09	4,94	4,79	4,64	4,64
Sasaran 4 : Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	14. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Skor	80,11	80,21	80,45	80,90	81,71	82,10	82,51	82,51



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	15. Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,69	74,28	75,99	77,56	79,26	80,81	82,37	82,37
Sasaran 6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	62,17	62,67	63,17	63,67	64,17	64,67	64,67
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah										
Tujuan : Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	17. Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
	18. Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	19. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	20. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	21. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,67	73	76	79	82	85	88	88
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Nilai	89,23	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	23. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,62	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	2,67

5.4 Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada. Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta juga memperhatikan prioritas nasional dan provisi agar tetap terjaga sinkronisasinya.

Prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Mengacu pada prioritas nasional dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan, maka di tetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah agar pembangunan Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih terarah dan fokus, yaitu :

1. **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing**
2. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat**
3. **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**
4. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**

Prioritas pembangunan daerah Kota Banjarbaru tersebut selanjutnya akan difokuskan pada prioritas tahun rencana yang berisi program-program SKPD yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan.

BAB 6



STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Banjarbaru dan akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan, perlu disusun strategi yang akan menjamin bahwa Misi dapat dilaksanakan dan dapat pula mencapai tujuan dan sasarannya dengan baik. Selanjutnya strategi juga membutuhkan ketetapan arah kebijakan agar tujuan dan sasaran menjadi tepat dan tidak salah arah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan didalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 ini harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatan melalui proses, cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap Misi pembangunan Kota Banjarbaru yang ditetapkan. Strategi yang disusun menunjukkan dan sekaligus mensyaratkan adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memposisikan masyarakat subjek utama dari visi dan misi pembangunan, serta memantapkannya sebagai prinsip dalam pelayanan masyarakat.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan wujud pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Banjarbaru yang dibuat ini mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis (analisa internal dan eksternal) yang ada di Kota Banjarbaru dan berpedoman kepada prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Banjarbaru. Dari proses tersebut diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih dan selaras.

6.1 Strategi

Berikut adalah Tabel yang memperlihatkan konsistensi misi, tujuan dan sasaran yang kemudian di uraikan kedalam strategi :

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia		
Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan 1.2 Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.3 Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan 1.4 Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2.1 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Home Care) 2.2 Meningkatkan Pembinaan KB 2.3 Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang 2.4 Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 2.5 Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2.6 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kesenjangan gender	3.1 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Sasaran 4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat	4.1 Mengendalikan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Sasaran 5 : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal	5.1 Meningkatkan Kewaspadaan, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 5.2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.3 Meningkatkan Penanggulangan Bencana 5.4 Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 5.5 Meningkatkan Penanganan Bencana 5.6 Meningkatkan Pengembangan Perumahan 5.7 Meningkatkan Aktivitas Keagamaan
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup		
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	1.1 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan 1.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.3 Meningkatkan penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspore 1.4 Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.5 Meningkatkan Pemasaran Pariwisata 1.6 Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 1.7 Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.8 Mengembangkan Kebudayaan 1.9 Mengembangkan Prasarana Pertanian
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	2.1 Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.2 Mengembangkan Iklim Penanaman Modal 2.3 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal 2.4 Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal
	Sasaran 3 : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	3.1 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial 3.2 Meningkatkan Rehabilitasi Sosial 3.3 Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.4 Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3.5 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja
	Sasaran 4 : Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	4.1 Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4.2 Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan 4.3 Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya 4.4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
	Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	5.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air 5.2 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5.3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5.4 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5.5 Meningkatkan Pengembangan Permukiman 5.6 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung 5.7 Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 5.8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan 5.9 Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi 5.10 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang 5.11 Meningkatkan Pengembangan Perumahan 5.12 Meningkatkan Kawasan Permukiman 5.13 Menurunkan Kawasan Permukiman Kumuh 5.14 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 5.15 Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Sasaran 6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	6.1 Meningkatkan Perencanaan Lingkungan Hidup 6.2 Meningkatkan Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6.3 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 6.4 Meningkatkan Pengelolaan Sampahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah		
Tujuan : Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.2 Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan 1.4 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.5 Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.6 Meningkatkan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1.7 Meningkatkan pengelolaan kearsipan perangkat daerah 1.8 Meningkatkan Profesionalisme ASN
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.1 Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	3.1 Meningkatkan Informasi dan Komunikasi Publik 3.2 Meningkatkan Aplikasi Informatika 3.3 Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.



Tabel 6. 2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia			
Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	1.1.1 Peningkatan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			1.1.2 Peningkatan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
			1.1.3 Peningkatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			1.1.4 Peningkatan pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		1.2 Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.3.1 Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			1.3.2 Peningkatan Pemerataan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		1.3 Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan	1.4.1 Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan
			1.4.2 Peningkatan budaya Gemar Membaca
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.4 Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.5.1 Peningkatan Penyediaan Angkutan Pelajar
			2.1.1 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			2.1.2 Peningkatan Layanan Kesehatan
			2.1.3 Peningkatan pelayanan Kesehatan untuk ibu, anak dan Lansia (Home Care)
		2.1 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Home Care)	2.1.4 Peningkatan pelayanan keluarga berencana
			2.2.1 Peningkatan jumlah akseptor KB aktif
		2.2 Meningkatkan Pembinaan KB	2.3.1 Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang
			2.4.1 Peningkatan prestasi olahraga
		2.3 Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	2.5.1 Peningkatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			2.4.1 Peningkatan akses air minum yang aman
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan gender	2.4 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah	2.4.2 Peningkatan pelayanan sistem air limbah
			3.1.1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat	4.1 Mengendalikan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.1.1 Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4.1.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4.1.3 Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian pembangunan
	Sasaran 5 : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal	5.1 Meningkatkan Kewaspadaan, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	5.1.1 Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		5.2 Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.2.1 Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.2.2 Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		5.3 Meningkatkan Penanggulangan Bencana	5.1.3 Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 5.1.3 Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5.1.4 Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		5.4 Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.4.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 5.4.2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		5.5 Meningkatkan Penanganan Bencana	5.5.1 Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 5.5.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
		5.6 Meningkatkan Pengembangan Perumahan	5.6.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah 5.6.2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah
		5.7 Meningkatkan Aktivitas Keagamaan	5.7.1 Peningkatan Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	1.1 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	1.1.1 Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan Pemberdayaan Perkoperasian 1.1.2 Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
		1.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.2.1 Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (RT Mandiri)
		1.3 Meningkatkan penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspore	1.3.1 Peningkatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.3.2 Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 1.3.3 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		1.4 Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.4.1 Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 1.4.2 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 1.4.3 Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
		1.5 Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	1.5.1 Peningkatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
		1.6 Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.6.1 Peningkatan Penyediaan Prasarana sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif
		1.7 Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.7.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		1.8 Mengembangkan Kebudayaan	1.8.1 Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya 1.8.2 Peningkatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
		1.9 Mengembangkan Prasarana Pertanian	1.9.1 Pengembangan Prasarana Pertanian (Urban Farming)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	2.1 Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.1.1 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		2.2 Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	2.2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal 2.2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi
		2.3 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	2.3.1 Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
		2.4 Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	2.4.1 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 3 : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	3.1 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	3.1.1 Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
		3.2 Meningkatkan Rehabilitasi Sosial	3.2.1 Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 3.2.2 Peningkatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		3.3 Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin
		3.4 Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.4.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 3.4.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		3.5 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	3.5.1 Pelayanan Antarkerja 3.5.2 Peningkatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Sasaran 4 : Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	4.1 Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.1.1 Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.1.2 Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 4.1.3 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 4.1.4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		4.2 Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	4.2.1 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
		4.3 Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.3.1 Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 4.3.2 Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		4.4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	4.1.1 Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	1.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air 1.2 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.4 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1.5 Meningkatkan Pengembangan Permukiman 1.6 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung 1.7 Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 1.8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan 1.9 Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi 1.10 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.11 Meningkatkan Pengembangan Perumahan 1.12 Meningkatkan Kawasan Permukiman 1.13 Menurunkan Kawasan Permukiman Kumuh 1.14 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.1.1 Peningkatan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) 1.2.1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.3.1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 1.4.1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 1.5.1 Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 1.6.1 Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.7.1 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 1.8.1 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan 1.9.1 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.9.2 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.10.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 1.11.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.11.2 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 1.12.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 1.12.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.12.3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.13.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1.14.1 Peningkatan Penyelenggaraan PSU Perumahan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	1.15 Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	15.1.1 Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan 15.1.2 Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 15.1.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
		2.1 Meningkatkan Perencanaan Lingkungan Hidup	2.1.1 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2.1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		2.2 Meningkatnya Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.2.1 Peningkatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.2.2 Peningkatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.2.3 Peningkatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		2.3 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.3.1 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		2.4 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	2.4.1 Peningkatan Pengelolaan Sampah
	Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah		
	Tujuan : Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			1.1.1 Peningkatan Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.1.2 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.1.3 Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.4 Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			1.2 Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
			1.2.1 Peningkatan penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1.2.2 Peningkatan pengembangan inovasi daerah
		1.3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan	1.3.1 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.3.2 Peningkatan kapasitas aparatur penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.4 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.4.1 Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.4.2 Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.4.3 Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.4.4 Peningkatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1.4.5 Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.5 Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.5.1 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.5.2 Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		1.6 Meningkatkan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.6.1 Penguatan Pendampingan dan Asistensi
		1.7 Meningkatkan pengelolaan kearsipan perangkat daerah	1.7.1 Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis
		1.8 Meningkatkan Profesionalisme ASN	1.8.1 Pengembangan Kompetensi ASN 1.8.2 Peningkatan Administrasi Kepegawaian
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.1 Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	2.1.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.1.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 2.1.3 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 2.1.4 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2.1.5 Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi 2.1.7 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2.1.8 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2.1.9 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 2.1.10 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	3.1 Meningkatkan Informasi dan Komunikasi Publik	3.1.1 Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
		3.2 Meningkatkan Aplikasi Informatika	3.2.1 Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
		3.3 Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.3.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Tabel 6. 3
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Banjarbaru

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat				
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang di dukung penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup				
	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang didukung oleh SDM handal dan Teknologi Informasi				

6.3 Program Pembangunan Daerah

Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut.



Tabel 6. 4
Misi, Tujuan, Sasaran serta Program Pembangunan Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia																		
Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		79,10	79,20	268,979	79,30	343,236	79,40	396,616	79,50	420,984	79,60	434,659	79,70	436,166	79,70	436,166	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah		10,95	10,96	77,490	10,97	98,978	10,98	107,401	10,99	114,635	11,00	117,953	11,01	124,068	11,01	124,068	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	%	65	66	49,834	70	70,580	75	77,220	80	82,555	85	83,848	90	87,848	90	87,848	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang bersertifikasi	%	38	40	19,517	42	20,493	45	21,518	47	22,593	49	23,723	51	24,909	51	24,909	Dinas Pendidikan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	%	42	45	6,576	47	6,919	50	7,611	53	8,352	55	9,166	57	10,061	57	10,061	Dinas Perhubungan
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	24,5	51	71	52	206	53	216	54	227	55	239	56	250	56	250	Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah
	Indeks Pembangunan Literasi	Indeks	3,1	13,25	1,492	13,50	780	13,60	836	13,70	887	13,75	955	14,00	1,000	14,00	1,000	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang ada yang telah dialihmediakan	%	N/A	-	-	-	-	-	-	33	21	33	22	-	-	33	22	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat																		
	Angka Harapan Hidup		71,99	72,10	173,801	72,20	222,996	72,30	266,431	72,40	284,996	72,50	294,135	72,60	288,995	72,60	288,995	
	Angka Prevalensi Stunting		14,19	14,05		14,00		13,95		13,90		13,85		13,80		13,80		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	109	642	90	1,090	87	1,155	85	1,213	84	1,274	82	1,337	82	1,337	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4,5	4,1	308	3,4	437	3	496	2	522	2	548	1,6	575	2	575	
	Angka Kesakitan	%	29	29	17,617	27	17,617	25	25,090	23	33,642	21	36,245	20	38,057	20	38,057	
	Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	1,016	8	1,198	7	1,309	6	1,374	5	1,443	4	1,515	4	1,515	
	Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit	Tingkat	22	22	43,197	22	51,546	22	70,155	22	75,311	22	99,043	22	88,576	22	88,576	RSD Idaman
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (BLUD)	Status Akreditasi	Tingkat	Tingkat 4 (Utama)	Tingkat 4 (Utama)	85,571	Tingkat 4 (Utama)	113,156	Tingkat 5 (Paripurna)	130,774	Tingkat 5 (Paripurna)	133,389	Tingkat 5 (Paripurna)	136,057	Tingkat 5 (Paripurna)	138,778	Tingkat 5 (Paripurna)	138,778	RSD Idaman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	7,059	100	2,547	100	2,757	100	2,895	100	3,039	100	3,191	100	3,191	Dinas Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan	%	97	97	476	98	501	99	526	100	552	100	580	100	609	100	609	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	509	100	926	100	981	100	1,030	100	1,082	100	1,136	100	1,136	Dinas Kesehatan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses yang terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	95,40	96,55	3,669	97,70	11,550	98,75	12,705	100	13,976	100	3,000	100	3,000	100	3,000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	100	100	4,850	100	13,030	100	10,427	100	10,679	100	1,040	100	1,050	100	1,050	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Program Pengendalian Penduduk	Persentase perkawinan usia anak menurun	%	100	100	120	100	150	100	165	100	168	100	172	100	175	100	175	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang ber KB	%	100	100	2,069	100	2,069	100	2,276	100	2,322	100	2,368	100	2,415	100	2,415	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R dalam pembangunan keluarga	%	100	14,19	660	14,17	670	14,14	703	14,10	717	14,05	731	14,00	746	14,00	746	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM, TP-PKK, Posyandu, dan Posyantek yang aktif	%	100	100	1,509	100	1,564	100	1,720	100	1,754	100	1,789	100	1,825	100	1,825	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang di bina	%	N/A	14	4,529	51	4,945	-	5,192	-	5,452	-	5,724	77	6,010	77	6,010	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesenjangan gender	Indeks Pembangunan Gender		92,55	92,60	886	92,65	1,106	92,70	1,393	92,75	1,471	92,80	1,525	92,85	1,593	92,85	1,593	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	66,63	70	334	70	464	70	500	73	540	73	575	73	625	73	625	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	182	100	182	100	200	100	204	100	208	100	212	100	212	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Sekolah inspirasi perempuan tekun (SI PURUN) di Kota Banjarbaru	Buah	N/A	1	60	2	150	3	225	4	250	5	255	6	260	6	260	
	Jumlah kelompok Industri Rumahan Perempuan yang terbentuk di Kota Banjarbaru	Buah		2		4		6		8		10		12		12		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	129	100	129	100	268	100	273	100	279	100	284	100	284	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terselesaikan	%	100	100	181	100	181	100	200	100	204	100	208	100	212	100	212	
Sasaran 4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat	Angka Inflasi	%	2,25	<3	1,365	<3	1,560	<3	1,912	<3	1,925	<3	2,024	<3	1,827	<3	1,827	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai di tindaklanjuti	%	100	100	148	100	156	100	164	100	172	100	180	100	189	100	189	Sekretariat Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai di tindaklanjuti	%	100	100	1,075	100	1,129	100	1,433	100	1,407	100	1,463	100	1,219	100	1,219	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	%	10	10	142	10	275	10	315	10	346	10	381	10	419	10	419	Dinas Perdagangan
Sasaran 5 : Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda		100	100	15,437	100	18,596	100	19,479	100	17,957	100	19,022	100	19,683	100	19,683	
	Persentase Penyelesaian Kebencanaan		100	100	2,164	100	2,429	100	3,497	100	3,820	100	4,174	100	4,564	100	4,564	
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	8,398	100	8,818	100	9,259	100	9,722	100	10,208	100	10,719	100	10,719	Sekretariat Daerah
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	%	100	100	2,730	100	3,072	100	3,082	100	604	100	617	100	629	100	629	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	70	100	1,289	100	2,055	100	2,064	100	2,073	100	2,082	100	2,092	100	2,092	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	%	100	80	41	85	172	90	175	95	179	100	182	100	186	100	186	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100	100	374	100	433	100	442	100	451	100	460	100	469	100	469	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik ipolek sosbud Hankam yang ditangani	%	100	100	230	100	1,020	100	1,040	100	1,061	100	1,082	100	1,104	100	1,104	
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	100	100	1,910	100	2,125	100	2,338	100	2,572	100	2,829	100	3,112	100	3,112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	254	100	304	100	1,159	100	1,248	100	1,345	100	1,452	100	1,452	Dinas Sosial
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	80	1,918	80	2,455	80	2,703	80	2,975	80	3,276	80	3,090	80	3,090	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan kesiagaan, penanggulangan kebakaran serta time respon	%	100	80	457	80	571	80	714	85	892	90	1,115	90	1,394	90	1,394	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup																		
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi		-1,88	2 - 3	200,509	4	324,833	4 - 5	424,044	5	376,002	5 - 6	392,288	6,93	411,265	6,93	411,265	
	Indeks Gini		0,38	0,37		0,36		0,34		0,33		0,32		0,31		0,31		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Kota	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata		-7,22	2,00	2,343	2,50	3,280	3,00	3,549	3,50	3,844	4,00	4,059	4,50	5,326	4,50	5,326	
	Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil, dan ekonomi kreatif		-0,67	3,00	7,948	4,50	6,636	5,00	7,299	5,50	8,044	6,00	8,828	6,50	9,688	6,50	9,688	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase terlestarikannya cagar budaya	%	-	-	306	91,6	320	91,6	336	100	353	100	371	100	390	100	390	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Group	9	9	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Persentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni dan budaya	%	-	-	-	37	791	46	858	65	932	83	994	100	1,058	100	1,058	
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Unggulan	%	30	30	159	33	167	36	175	40	184	43	193	46	203	46	203	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Tingkat hunian akomodasi	%	24,50	26,50	650	30	715	34	787	39	865	44	865	49	1,047	49	1,047	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase destinasi wisata yang memiliki pokdarwis	%	43	43	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	persentase kelompok sadar wisata yang dibina	%	53	61	142	69	217	76	229	84	242	92	255	100	1,123	100	1,123	
	persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	%	N/A	-		2		5		7		10		12		12		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Buah	35	0	214													
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	N/A	-	-	10	1,070	15	1,164	20	1,268	30	1,381	40	1,505	40	1,505	
	Persentase partisipasi pemuda kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha)	%	N/A	-	-	2		4		6		8		10		10		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	%	15.2	17.65	-	19.61	103	22.06	113	24.51	125	26.96	137	29.41	151		151	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat	Koperasi	NA	3	295	4	60	5	66	6	73	7	80	8	88	8.00	88	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan	%	18	19	390	19.5	100	20	110	21	121	23	133	25	146	25.00	146	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n	%	NA	5	-	6	138	8	152	9	167	10	184	10	202	10.00	202	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	%	25.55	26.55	366	27.54	1,148	28.54	1,262	29.53	1,388	30.53	1,527	31.52	1,680	31.52	1,680	
Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	UMKM	NA	10	1,317	20	700	40	770	60	847	80	932	100	1,025	100	1,025	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	Pedagang	1,000	600	4,086	720	2,643	864	2,907	1037	3,198	1244	3,518	1492	3,870	20	3870	Dinas Perdagangan
Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang berizin	%	10	10	32	10	136	10	150	10	165	10	182	10	200	10	200	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTP metrologi legal tertib ukur	%	10	10	154	10	170	10	187	10	205	10	220	10	220	10	220	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	10	10	154	10	169	10	186	10	220	10	225	10	248	10	248	
Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	12	12	960	12	1,056	12	1,162	12	1,278	12	1,406	12	1,546	7	1,546	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase legalitas IKM sesuai ketentuan	%	5	6	76	7	83	8	91	9	100	10	111	11	122	7	122	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang terupdate dalam aplikasi SIINAS	%	5	8	118	10	130	12	143	14	157	14	173	14	190	7	190	
Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	Peningkatan PAD (Milyar)		-	238,7	3,986	246,6	4,140	254,5	4,246	264,3	4,330	273,2	4,417	300,7	4,505	300,7	4,505	
	Peningkatan Investasi Daerah (Milyar)		-	137	743	142	950	147	1,035	152	961	158	967	163	973	163	973	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (Milyar)	Rp	88,71	92,26	-	95,95	-	99,79	-	103,78	-	107,93	-	112,25	-	112,25	-	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Investor	18	20	-	22	400	24	400	26	320	28	320	30	320	30	320	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	%	N/A	75	335	77	335	79	335	81	335	83	335	85	335	85	335	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (Milyar)	Rp	196,53	123,88	3,986	133,88	4,140	135,15	4,246	142,45	4,330	150,12	4,417	160,25	4,505	160,25	4,505	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar)	Rp	5,71	11,06		12,17		10,50		11,85		12,90		14,00		14,00		
	Rasio PAD	Nilai	12507	100		100		100		100		100		100		100		
	Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Apbd	%	0,9156	97,60		116,48		102,38		103,87		103,34		110,08		110,08		
Sasaran 3 : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Angka Kemiskinan		4,01	4,00	10,523	3,90	11,192	3,80	13,478	3,70	14,244	3,60	14,969	3,50	15,739	3,50	15,739	
	Angka Pengangguran		5,54	5,39	802	5,24	988	5,09	1,119	4,94	1,231	4,79	1,355	4,64	1,508	4,64	1,508	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada rencana kerja mikro dan makro	%	100	100	-	100	15	100	-	100	-	100	-	100	18	100	18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,47	0,56	482	0,60	602	0,65	662	0,70	728	0,75	801	0,80	881	0,80	881	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	3,11	3,15	133	3,21	184	3,36	202	3,58	222	3,81	245	4,06	269	4,06	269	
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan	%	3,91	4,0	187	4,2	187	5,0	255	10,0	281	14,0	309	17,0	340	17,0	340	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial tenaga sumber kesejahteraan sosial, kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	%	100	100	350	100	421	100	463	100	472	100	481	100	491	100	491	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	100	771	100	848	100	2,193	100	2,428	100	2,595	100	2,777	100	2,777	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang dipelihara	%	100	100	1,004	100	1,105	100	1,563	100	1,622	100	1,685	100	1,752	100	1,752	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	%	100	100	8,398	100	8,818	100	9,259	100	9,722	100	10,208	100	10,719	100	10,719	Sekretariat Daerah
Sasaran 4 : Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Skor	80,11	80,21	15,662	80,45	29,866	80,90	30,738	81,71	31,769	82,10	32,955	82,51	34,277	82,51	34,277	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Scoring	90,1	90,2	1,532	90,25	1,319	90,30	1,450	90,35	1,598	90,40	1,798	90,45	2,024	90,45	2,024	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota	%	60	65,0	99	70,0	114	70,0	126	75,0	138	75,0	152	80,0	167	80,0	167	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	362,4	380,52	1,441	399,55	1,631	405,54	1,794	411,62	2,043	417,79	2,328	424,06	2,653	424,06	2,653	
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	31,8	33,39	19	35,05	23	35,75	26	36,46	29	37,18	34	37,92	39	37,92	39	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	%	113,15	2,0	179	2,0	223	2,0	245	2,0	269	2,0	296	2,0	326	2,0	326	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60,00	64,09	9,014	69,35	21,142	74,61	21,142	79,88	21,142	85,14	21,142	90,40	21,142	90,40	21,142	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Program penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian	Luas lahan pertanian yang berproduksi	Ha	1,365	1,582	666	1,598	563	1,614	619	1,630	681	1,646	749	1,662	824	1,662	824	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
	Jumlah Populasi ternak (Ribu)	Ekor	2,800	2,823	1,952	2,851	2,647	2,879	2,912	2,905	3,203	2,993	3,523	2,961	3,875	2,961	3,875	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan	%	100	100	175	100	447	100	491	100	540	100	594	100	654	100	654	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	240	250	124	260	164	275	181	290	199	300	219	310	241	310	241	
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase poktan yang naik kelas/score	%	60,15	66	461	67	1,593	68	1,752	69	1,927	70	2,120	71	2,332	71	2,332	
Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Wilayah		78,69	74,28	137,509	75,99	230,285	77,56	324,157	79,26	272,387	80,81	284,763	82,37	298,473	82,37	298,473	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana atau rekolasi program kota yang tertangani	%	0,27	100	209	100	272	100	314	100	320	100	326	100	333	100	333	Dinas Perumahan & Permukiman



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki IMB	%	0	0	-	100	1,030	100	1,035	100	1,060	100	1,084	100	1,107	100	1,107	
Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	%	N/A	4	7,090	8	8,976	12	9,573	16	10,210	20	10,894	24	11,631	24	11,631	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	55	100	1,647	100	19,462	100	22,905	100	26,850	100	30,872	100	35,861	100	35,861	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	%	0	-	-	100	5,053	100	5,154	100	5,257	100	5,362	100	5,470	100	5,470	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	18,83	24,34	7,532	35,24	64,760	41,17	60,000	53,19	36,200	61,89	36,000	70,07	36,200	70,07	36,200	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	79,64	57,87	28,183	59,85	34,957	61,41	38,343	63,51	42,067	65,68	46,164	67,94	50,570	67,94	50,570	
Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	84,06	85,56	28,374	87,06	24,271	88,56	24,271	90,06	24,271	91,56	24,271	93,06	24,271	93,06	24,271	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	18,837	100	7,318	100	91,942	100	54,564	100	54,564	100	54,564	100	54,564	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	100	1,461	100	868	100	868	100	868	100	868	100	868	100	868	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	%	85,13	81,21	40,583	81,32	59,578	81,33	65,447	81,42	65,053	81,60	69,159	81,87	73,596	81,87	73,596	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	144	100	235	100	145	100	163	100	184	100	204	100	204	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	100	66,33	1,819	70,00	1,770	78,00	2,252	90,00	3,424	98,00	2,748	100	1,325	100	1,325	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	%	80	83	270	86	286	87	314	90	342	93	374	96	408	96	408	Dinas Perhubungan
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	%	100	80	245	82,5	1,171	85	1,288	90	1,404	95	1,531	100	1,669	100	1,669	
	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	%	100	100	1,115	100	278	100	306	100	334	100	362	100	396	100	396	
Sasaran 6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		61,67	62,17	20,993	62,67	37,496	63,17	38,423	63,67	39,192	64,17	39,975	64,67	40,776	64,67	40,776	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Indeks	56,56	57,17	2,755	57,67	365	58,17	372	58,67	380	59,17	387	59,67	395	59,67	395	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Indeks	86,91	87,41		87,91		88,41		88,91		89,41		89,91		89,91		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	%	4,1	4,2	2,332	4,4	4,322	4,6	4,754	4,7	4,849	4,9	4,946	5,1	5,045	5,1	5,045	
	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	%	100	100	115	100	325	100	332	100	338	100	345	100	352	100	352	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	100	100	36	100	70	100	71	100	73	100	74	100	76	100	76	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (%)	%	92	93	105	94	170	95	173	96	177	97	180	98	184	98	184	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	150	100	165	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	142	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang diselesaikan	%	100	100	-	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	27	
Program Pengelolaan Persampahan	persentase pengelolaan persampahan	%	100	100	15,358	100	32,054	100	32,695	100	33,349	100	34,016	100	34,697	100	34,697	
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah																		
Tujuan : Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi		B	B	72,900	BB	112,973	BB	101,497	BB	103,546	A	105,437	A	109,348	A	109,348	
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		B	B	3,987	BB	3,127	BB	3,371	BB	3,549	A	4,160	A	4,385	A	4,385	
	Nilai LPPD		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
	Opini BPK		WTP	WTP	19,499	WTP	19,499	WTP	19,499	WTP	19,537	WTP	19,889	WTP	19,889	WTP	19,889	
	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)		Level 3	Level 3	3,015	Level 3	3,316	Level 3	3,647	Level 3	3,720	Level 3	3,795	Level 3	3,871	Level 3	3,871	
	Indeks Profesionalitas ASN		71.67	73	8,353	76	14,955	79	18,748	82	17,712	85	15,059	88	14,728	88	14,728	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.	%	100	100	1,263	100	916	100	973	100	996	100	1,477	100	1,533	100	1,533	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD	%	100	100	2,280	100	1,502	100	1,594	100	1,690	100	1,794	100	1,906	100	1,906	
	Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	315	100	426	100	444	100	470	100	494	100	518	100	518	
	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban Nasional Sesuai Undang-undang Kearsipan	%	28,25	36	129	46	238	51	313	56	313	61	343	71	373	71	373	Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	44,5	-	-	55	45	65	47	75	50	85	52	94	55	94	55	
Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	%	N/A	-	-	-	-	-	-	80	30	-	-	-	-	80	0	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Waktu Penyelesaian Rancangan Perda Apbd Dan Rancangan Perubahan Apbd Yang Ditetapkan	%	100	100	14,516	100	14,516	100	14,516	100	14,516	100	14,806	100	14,806	100	14,806	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Persentase Jumlah Sp2d Yang Terbit Tepat Waktu	%	100	100	674	100	674	100	674	100	688	100	688	100	688	100	688	
	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	1,213	100	1,213	100	1,213	100	1,237	100	1,237	100	1,237	100	1,237	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Nilai Neraca Bmd Sama Dengan Nilai Bmd Dalam Neraca Keuangan	%	100	100	3,096	100	3,096	100	3,096	100	3,096	100	3,158	100	3,158	100	3,158	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Level	Level 3	Level 3	2,137	Level 3	2,350	Level 3	2,585	Level 3	2,637	Level 3	2,690	Level 3	2,744	Level 3	2,744	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level	Level 3	Level 3	878	Level 3	966	Level 3	1,062	Level 3	1,083	Level 3	1,105	Level 3	1,127	Level 3	1,127	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Indeks	274	292	5,532	300	7,158	310	7,507	325	8,107	335	8,789	350	9,001	350	9,001	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase SDM Aparatur Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	N/A	16	2,821	53	7,797	84	11,241	106	9,605	120	6,270	134	5,727	134	5,727	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan		Baik	Baik	31,607	Baik	41,574	Baik	44,720	Baik	47,246	Baik	50,438	Baik	54,001	Baik	54,001	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	%	100	100	23,682	100	25,916	100	27,989	100	29,387	100	31,443	100	33,643	100	33,643	Sekretariat DRRD
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,61	87,75	245	88	114	88,25	125	88,50	139	88,75	152	89	166	89	166	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4	3,97	832	4,00	962	4,02	951	4,05	938	4,07	924	4,10	911	4,10	911	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase data Kependudukan yang valid dan update	%	100	100	344	100	393	100	432	100	453	100	476	100	500	100	500	Dinas Kependudukan Dan Capil
Program Pencatatan Sipil	Persentase data pencatatan sipil yang valid dan update	%	100	100	267	100	535	100	715	100	915	100	1,075	100	1,230	100	1,230	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	82,5	204	83	607	84	607	85	607	86	607	87	607	87	607	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan data profil Kependudukan yang sesuai ketentuan	%	NA	0	-	100	24	100	26	100	27	100	28	100	29	100	29	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86	1,265	86,5	2,638	87	2,901	87,5	3,192	88	3,511	88,5	3,863	88,5	3,863	Kecamatan Banjarbaru Selatan
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81	81		81,5		82		82,5		83		83,5		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan berkembang	Keg	N/A	-	-	4	210	4	231	4	254	4	280	4	307	20	307	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselenggarakan	%	N/A	-	-	100	120	100	132	100	145	100	160	100	176	100	176	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT mandiri	%	N/A	-	-	12	1,100	24	1,120	36	1,142	48	1,166	60	1,193	60	1,193	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85	997	86,5	1,176	87	1,207	87,5	1,327	88	1,367	88,5	1,400	88,5	1,400	Kecamatan Banjarbaru Utara
	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	N/A	0	32	81,5	130	82	181	82,5	203	83	208	83,5	215	83,5	215	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Keg	N/A	-	-	1	97	2	105	3	111	4	113	4	122	4	122	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	100	60	100	63	100	64	100	66	100	67	100	67	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT Mandiri	%	N/A	-	-	12	900	24	900	36	900	48	900	60	900	60	900	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	84	1,173	84,5	1,824	85	2,007	86	2,208	87	2,428	87,5	2,671	87,5	2,671	Kecamatan Cempaka
	Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	81	81	-	81	200	81,5	220	82	242	82,5	266	83	293	83	293	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Keg.	N/A	-	-	1	160	2	176	3	194	4	213	4	234	4	234	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	100	50	100	55	100	61	1	67	100	73	100	73	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT Mandiri	RT	N/A	-	-	12	900	24	900	36	900	48	900	60	900	60	900	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,5	87	1,312	87,5	1,994	87,8	2,073	88	2,078	88,5	2,168	90	2,404	90	2,404	
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	N/A	81	68	81,5	93	82	102	82,5	112	83	118	83,5	124	83,5	124	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Keg	N/A	-	-	1	47	2	49	3	52	4	55	4	59	4	59	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	100	18	100	20	100	22	100	24	100	26	100	26	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT mandiri	RT	N/A	-	-	12	-	24	-	36	-	48	-	60	-	60	-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	87	1,063	87.5	1,169	87.8	1,286	88	1,415	88.5	1,556	90	1,712	100	1,712	Kecamatan Liang Anggang
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	N/A	81		81.5		82		82.5		83		83.5				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya	Keg	N/A	3	46	3	51	3	56	4	61	100	63	5	64	5	64	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	N/A	100	32	100	36	100	36	100	37	100	38	100	39	100	39	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	100	45	100	50	100	55	100	60	100	66	100	73	100	73	
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,62	2,62	6,439	2,63	30,502	2,64	11,512	2,65	11,782	2,66	12,096	2,67	12,474	2,67	12,474	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	%	100	100	2,806	100	2,997	100	3,207	100	3,456	100	3,694	100	3,976	100	3,976	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Aplikasi Informatika	Nilai Aspek SPBE	Nilai	2	2	3,347	2	27,202	2	7,956	2	7,993	2	8,031	2	8,071	2	8,071	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	70	105	70	108	75	130	80	135	85	144	90	166	90	166	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	%	NA	30	181	30	195	35	219	40	198	45	227	50	261	50	261	

BAB 7



KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarbaru berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana material maupun SDM dan teknologi.

Perumusan program perangkat daerah (SKPD) yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.2.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* serta *bottom up*. RPJMD tersebut memuat visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka untuk menjamin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dengan RPJMD tersebut maka dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan FGD dan dihasilkan alternatif dan rekomendasi yang diuraikan dalam indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di dalam program pembangunan RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026. Alternatif dan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan TPB tersebut berdasarkan isu strategis yaitu :

7.1. Alternatif dan Rekomendasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terkait Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup

Uraian skenario dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dijelaskan dalam matriks dibawah :

1. Indikator Kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan

Isu Strategis : Kelaparan dan Kemiskinan

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Mendorong peningkatan produksi pangan
- c. Program :
 - Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Penelitian dan pengembangan daerah
 - Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
 - Program perizinan usaha pertanian
 - Program penyuluhan pertanian
 - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

2. Indikator Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Isu Strategis : Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem, lahan kritis

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatkan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Terlaksananya rehabilitasi dan reboisasi hutan.
- c. Outcome/Program:
 - Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

7.2. Alternatif dan Rekomendasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Tidak Terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Uraian skenario dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang tidak terkait DDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah :

1. Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Isu Strategis : Kemiskinan

Rekomendasi :

- a. Sasaran:
Meningkatkan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan secara bertahap bagi masyarakat Kota Banjarbaru.
- c. Program :
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan**Isu Strategis :** Kemiskinan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi diwilayah Kota Banjarbaru untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
- c. Program :
 - Program Hubungan Industrial

3. Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan**Isu Strategis :** Kemiskinan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Menurunnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Meningkatkan program pengentasan kemiskinan
 - Koordinasi dan sinkronisasi data bagi rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan tunai bersyarat
- c. Program :
 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN**Isu Strategis :** Kemiskinan dan Infrastruktur**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya Persentase penggunaan listrik bagi rumah tangga miskin
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Pemberian subsidi listrik bagi rumah tangga miskin
- c. Program :
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

5. Indikator Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan**Isu Strategis :** Kemiskinan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk pemberantasan kemiskinan.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Meningkatkan program pengentasan kemiskinan
 - Koordinasi dan sinkronisasi data bagi rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan tunai bersyarat
- c. Program:
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

6. Indikator Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)**Isu Strategis :** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya nilai tambah pertanian di Kota Banjarbaru.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada bidang agri Business melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas bagi pelayanan publik.
 - Meningkatkan skill tenaga kerja di sektor pertanian
 - Pengendalian terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka
- c. Program :
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program Perizinan Usaha Pertanian

7. Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun**Isu Strategis :** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Menurunnya Prevalensi tekanan darah tinggi
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan upaya terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit
- c. Program :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

8. Indikator Prevalensi tekanan darah tinggi**Isu Strategis :** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Menurunnya Prevalensi tekanan darah tinggi
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan upaya terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit
- c. Program:
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

9. Indikator Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun**Isu Strategis:** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi:**

- a. Sasaran :
Menurunnya Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 ke atas.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan upaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan olahraga.
- c. Program :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

10. Indikator Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba**Isu Strategis :** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
 - Menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba
 - Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat
 - Melakukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan merata
 - Penegakan hukum bagi pengedar narkoba
- c. Program :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

11. Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern**Isu Strategis :** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Pemberian informasi kepada masyarakat tentang MKJP cara modern
- c. Program :
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

12. Indikator Proporsi Kematian Akibat Keracunan**Isu Strategis :** Kesehatan dan Kesejahteraan**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Menurunkan proporsi kematian akibat keracunan.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan aman konsumsi
- c. Program :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

13. Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B**Isu Strategis :** Pendidikan Berkualitas**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- c. Program :
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

14. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat**Isu Strategis :** Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Peningkatan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- c. Program :
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

15. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**Isu Strategis :** Pendidikan Berkualitas**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan PAUD
- c. Program :
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

16. Indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir**Isu Strategis :** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- c. Program :
Program Perlindungan Perempuan

17. Indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir**Isu Strategis :** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- c. Program :
Program Perlindungan Perempuan

18. Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah**Isu Strategis :** Kesenjangan Gender**Rekomendasi :**

- a. Sasaran :
Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
- b. Strategi dan arah kebijakan :

- Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.
- c. Program :
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

19. Indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Isu Strategis : Pertumbuhan Penduduk

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Menurunkan Unmet need KB.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB
- c. Program :
Program Pembinaan Keluarga Berencana

20. Indikator Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB
- c. Program :
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

21. Indikator PDRB per Kapita

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya PDRB per Kapita
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Mendorong sektor-sektor yang dapat menaikkan PDRB.
- c. Program :
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

22. Indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
- Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada bidang non pertanian melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas bagi pelayanan publik.
 - Meningkatkan skill tenaga kerja di sektor non pertanian
 - pengendalian terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka

- c. Program :
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja

23. Indikator Tingkat setengah pengangguran

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Menurunkan Tingkat setengah pengangguran.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi
 - Meningkatkan skill tenaga kerja
 - pengendalian terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka
- c. Program :
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja

24. Indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkat persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi
 - Meningkatkan skill tenaga kerja
 - Pengendalian terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka
- c. Program :
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja

25. Indikator Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya nilai tambah sektor industri manufaktur
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Mengembangkan sektor industri manufaktur untuk barang ekspor
- c. Program :
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Pengembangan Ekspor

26. Indikator Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya nilai tambah sektor industri manufaktur
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Mengembangkan sektor industri manufaktur untuk barang ekspor
- c. Program :
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Pengembangan Ekspor

27. Indikator Koefisien Gini

Isu Strategis : Kesenjangan

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Menurunnya Koefisien Gini
- b. Strategi dan arah kebijakan :
 - Pemerataan pembangunan di semua wilayah
 - Pemberdayaan masyarakat
 - Menurunkan kesenjangan antar masyarakat
- c. Program :
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

28. Indikator Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Isu Strategis : Hukum & Tata Kelola, Lahan kritis

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatkan rehabilitasi lahan kritis.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Menanamkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tutupan vegetasi.
- c. Program :
Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

29. Indikator Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Isu Strategis : Hukum & Tata Kelola

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Mendorong perangkat daerah untuk memiliki sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- c. Program :
Program Informasi dan Komunikasi Publik

30. Indikator total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Proaktif dalam sosialisasi dan mengidentifikasi objek pajak
- c. Program :
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

31. Indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB

Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Proaktif dalam sosialisasi dan mengidentifikasi objek pajak
- c. Program :
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

32. Indikator Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Isu Strategis : Hukum dan Tata Kelola

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Program dan kegiatan di daerah diupayakan dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- c. Program :
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Adapun program-program rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah termuat dan bersesuaian dengan program-program pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategi maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian target kinerja program (outcome) pada masing-masing urusan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu kebijakan program dan masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026

KAPASITAS RIIL/BELANJA	TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN						
BELANJA	1,036,289,291,260	1,076,404,626,330	1,153,926,190,011	1,188,038,203,640	1,222,486,257,754	1,260,128,812,191
BELANJA OPERASI	797,792,592,047	825,465,729,029	880,819,843,962	906,828,796,943	929,727,613,257	957,401,104,735
Belanja Pegawai	430,916,366,071	448,153,020,714	479,523,732,164	493,909,444,129	506,257,180,232	521,444,895,639
Belanja Barang dan Jasa	320,454,721,721	333,272,910,590	356,602,014,331	367,300,074,761	376,482,576,630	387,777,053,929
Belanja Bunga	5,512,137,700	1,903,150,174	-	-	-	-
Belanja Hibah	38,069,457,574	39,211,541,301	41,564,233,779	42,395,518,454.88	43,667,384,009	44,759,068,609
Belanja Bantuan Sosial	2,839,908,981	2,925,106,250	3,129,863,688	3,223,759,599	3,320,472,387	3,420,086,558
BELANJA MODAL	228,496,699,213	238,938,897,301	259,106,346,049	266,209,406,697	277,758,644,497	287,727,707,456
Belanja Modal Tanah	24,815,810,159	25,560,284,464	27,349,504,376	28,716,979,595	29,865,658,779	31,149,882,106
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,911,342,538	41,507,796,240	44,828,419,939	46,173,272,537	48,020,203,438	50,181,112,593
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,591,148,339	46,804,553,443	50,606,194,895	52,130,879,790	54,442,075,367	56,841,429,644
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	115,625,651,629	121,406,934,210	132,333,558,289	134,980,229,455	141,054,339,781	145,003,861,295
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	3,552,746,548	3,659,328,944	3,988,668,549	4,208,045,320	4,376,367,132	4,551,421,817.74
BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000	12,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	12,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					727,337		924,893		1,086,346		1,091,774		1,139,219		1,181,083		1,181,083
I.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					253,768		276,097		285,907		299,304		311,187		326,455		326,455
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	38,922	BB	38,922	BB	38,922	BB	39,038	A	200,564	A	200,564	A	200,564
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	132	100	1387	100	1422	100	1468	100	1494	100	1531	100	1531
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	%	65	66	49,834	70	70,580	75	77,226	80	82,355	85	83,848	90	87,92	90	87,92
I.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan																	
I.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang bersertifikasi	%	38	40	19,57	42	20,493	45	21,518	47	22,593	49	23,723	51	24,909	51	24,909
	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR					1,183		1,715		1,824		1,676		1,566		1,502		1,502
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	130	BB	130	BB	130	BB	130	A	129	A	129	A	129
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Predikat akreditasi pengelolaan SKB	%	A	A	1,054	A	1,585	A	1,705	A	1,551	A	1,427	A	1,373	A	1,373
I.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					277,938		327,798		383,398		419,181		464,237		475,800		475,800
	DINAS KESEHATAN					96,206		100,833		116,341		133,548		145,648		157,883		157,883
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	67,647	BB	74,412	BB	81,853	BB	90,039	A	99,043	A	108,947	A	108,947
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	93	100	2,103	100	2,773	100	2,28	100	2,35	100	2,35	100	2,35
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	109	642	90	1,090	87	1,153	85	1,113	84	1,274	82	1,337	82	1,337
I.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4,5	4,1	398	3,4	477	3	496	2	523	2	549	16	575	16	575
		Angka Kesakitan	%	29	29	17,677	27	17,677	25	25,090	23	33,642	21	36,243	20	38,097	20	38,097
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	1,018	8	1,08	7	1,309	6	1,374	5	1,443	4	1,512	4	1,512
I.02.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	7,059	100	2,547	100	2,757	100	2,899	100	3,039	100	3,199	100	3,199
I.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFI, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan	%	97	97	476	98	501	99	526	100	552	100	580	100	609	100	609
I.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	529	100	925	100	981	100	1,033	100	1,082	100	1,135	100	1,135
	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA					1,567		1,980		2,180		2,289		2,404		2,483		2,483
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,000	100	1,156	100	1,272	100	1,331	100	1,402	100	1,472	100	1,472
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	109	35	90	35	87	38	85	40	84	42	82	44	82	44
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4,5	4,1	16	3,4	16	3	16	2	17	2	18	16	18	16	18
I.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
		Angka Kesakitan	%	29	29	685	27	685	25	596	23	638	21	645	20	678	20	678
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	28	8	33	7	38	6	38	5	39	4	4	4	4
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	28	8	33	7	38	6	38	5	39	4	4	4	4
I.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	136	100	161	100	177	100	186	100	195	100	205	100	205
I.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	46	100	50	100	52	100	58	100	61	100	64	100	64
	PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN					1,630		2,529		2,797		2,937		3,084		3,238		3,238
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,022	100	1,670	100	1,854	100	1,947	100	2,044	100	2,146	100	2,146
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	109	22	90	58	87	61	85	66	84	70	82	73	82	73
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4,5	4,1	37	3,4	65	3	77	2	75	2	79	16	83	16	83
I.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
		Angka Kesakitan	%	29	29	450	27	450	25	496	23	540	21	544	20	574	20	574
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	66	8	66	7	78	6	78	5	78	4	78	4	78
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	66	8	66	7	78	6	78	5	78	4	78	4	78
I.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	95	100	120	100	131	100	139	100	146	100	153	100	153
I.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	29	100	59	100	62	100	65	100	68	100	72	100	72
	PUSKESMAS SUNGAI BESAR					932		1,346		1,475		1,549		1,626		1,707		1,707
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	696	100	1,016	100	1,118	100	1,174	100	1,232	100	1,294	100	1,294
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	109	10	90	10	87	11	85	12	84	12	82	13	82	13
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4,5	4,1	3	3,4	3	3	3	2	3	2	3	16	3	16	3
I.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
		Angka Kesakitan	%	29	29	236	27	236	25	238	23	250	21	250	20	272	20	272
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	7	8	7	7	8	6	8	5	8	4	8	4	8
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	7	8	7	7	8	6	8	5	8	4	8	4	8
I.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	54	100	61	100	61	100	64	100	68	100	71	100	71
I.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	33	100	33	100	36	100	38	100	40	100	42	100	42
	PUSKESMAS CEMPAKA					2,101		3,113		3,447		3,621		3,803		3,999		3,999
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,234	100	2,055	100	2,263	100	2,376	100	2,495	100	2,620	100	2,620
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	109	80	90	100	87	100	85	102	84	110	82	116	82	116
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4,5	4,1	32	3,4	45	3	49	2	51	2	54	16	58	16	58
I.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
		Angka Kesakitan	%	29	29	543	27	608	25	656	23	689	21	723	20	760	20	760
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	139	8	139	7	140	6	156	5	164	4	173	4	173
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	139	8	139	7	140	6	156	5	164	4	173	4	173

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)																	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	144	100	204	100	261	100	274	100	287	100	302	100	302				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	60	100	60	100	70	100	75	100	80	100	90	100	90				
PUSKESMAS ULIN TIMUR					369	1.145	1.276	1.339	1.406	1.477	1.477											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	588	100	676	100	744	100	788	100	820	100	868	100	868				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	172	109	6	90	11	87	12	85	13	84	14	82	14	82	14	82				
		Angka Kematian Bayi /1000 KH	4,5	4,1	12	3,4	21	3	25	2	26	2	27	16	28	16	28					
		Angka Kesakitan	%	29	29	140	27	240	25	300	23	339	21	347	20	347	20	347				
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	10	8	33	6	34	5	34	5	36	4	36	4	36				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	101	100	143	100	157	100	165	100	173	100	182	100	182				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	1	100	4	100	5	100	5	100	5	100	6	100	6				
PUSKESMAS GUNTING PAYUNG					1.024	1.578	1.759	3.355	3.530	3.702	3.702											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	675	100	990	100	1.084	100	2.639	100	2.771	100	2.915	100	2.915				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	172	109	38	90	36	87	42	85	44	84	46	82	46	82	48	82				
		Angka Kematian Bayi /1000 KH	4,5	4,1	9	3,4	19	3	22	2	23	2	24	16	25	16	25					
		Angka Kesakitan	%	29	29	287	27	335	25	385	23	404	21	424	20	446	20	446				
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	10	8	21	7	24	6	25	5	28	4	28	4	28				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	102	100	127	100	143	100	150	100	158	100	165	100	165				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	40	100	50	100	60	100	70	100	80	100	80	100	80				
PUSKESMAS LANDASAN ULIN					1.470	1.831	2.011	2.312	2.277	2.328	2.328											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	891	100	1.057	100	1.163	100	1.221	100	1.282	100	1.344	100	1.344				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	172	109	12	90	14	87	16	85	16	84	16	82	17	82	17	82				
		Angka Kematian Bayi /1000 KH	4,5	4,1	23	3,4	26	3	29	2	30	2	31	16	33	16	33					
		Angka Kesakitan	%	29	29	512	27	543	25	597	23	627	21	659	20	692	20	692				
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	9	8	34	7	37	6	39	5	41	4	43	4	43				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	84	100	97	100	104	100	109	100	115	100	121	100	121				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	55	100	60	100	66	100	69	100	73	100	77	100	77				
PUSKESMAS LIANG ANGGANG					829	1.176	1.262	1.325	1.391	1.460	1.460											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	524	100	749	100	794	100	834	100	876	100	988	100	988				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	172	109	22	90	32	87	35	85	37	84	39	82	41	82	43	82				
		Angka Kematian Bayi /1000 KH	4,5	4,1	16	3,4	9	3	10	2	10	2	11	16	11	16	11	16				
		Angka Kesakitan	%	29	29	240	27	296	25	320	23	341	21	358	20	370	20	370				
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	28	8	39	7	43	6	44	5	46	4	50	4	50				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	36	100	45	100	48	100	49	100	51	100	54	100	54				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	4	100	7	100	7	100	8	100	8	100	8	100	8				
PUSKESMAS SUNGAI ULIN					1.079	1.411	1.592	2.961	3.116	3.247	3.247											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	604	100	753	100	837	100	2.161	100	2.269	100	2.382	100	2.382				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	172	109	10	90	17	87	20	85	21	84	22	82	23	82	23	82				
		Angka Kematian Bayi /1000 KH	4,5	4,1	41	3,4	61	3	70	2	74	2	78	16	83	16	83					
		Angka Kesakitan	%	29	29	388	27	438	25	481	23	505	21	531	20	567	20	567				
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	35	8	41	6	43	5	43	5	45	4	47	4	47				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	59	100	76	100	84	100	88	100	92	100	97	100	97				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	50	100	50	100	60	100	70	100	80	100	90	100	90				
PUSKESMAS GUNTING MANGGIS					1.172	1.284	1.420	1.499	1.571	1.647	1.647											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	759	100	795	100	874	100	998	100	964	100	1.012	100	1.012				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	172	109	24	90	34	87	37	85	39	84	41	82	43	82	43	82				
		Angka Kematian Bayi /1000 KH	4,5	4,1	18	3,4	18	3	19	2	19	2	20	16	21	16	21	16				
		Angka Kesakitan	%	29	29	364	27	393	25	424	23	454	21	483	20	513	20	423				
		Prevalensi Gizi Kurang	%	10,02	9	31	8	31	7	34	6	35	5	37	4	39	4	39				
102.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	90	90	53	100	53	100	58	100	61	100	64	100	67	100	67				
102.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	%	100	100	30	100	30	100	40	100	50	100	50	100	50	100	50				
RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN					169.559	209.572	247.839	262.646	294.441	292.629	292.629											
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B		BB		BB		BB		A		A		A					
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	40.791	100	44.870	100	46.910	100	53.946	100	59.341	100	65.275	100	65.275				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit	Tingkat	22	22	43.197	22	51.546	22	70.155	22	75.311	22	99.043	22	88.576	22	88.576				
102.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (BLUD)	Status Akreditasi	Tingkat	Tingkat 4 (Utama)	Tingkat 4 (Utama)	85,571	Tingkat 4 (Utama)	113,261	Tingkat 5 (Paripurna)	130,774	Tingkat 5 (Paripurna)	133,389	Tingkat 5 (Paripurna)	136,057	Tingkat 5 (Paripurna)	138,778	Tingkat 5 (Paripurna)	138,778				
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	82,01	82,5		83		83,5		84		85		86,057	87	87					

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
I.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Rumah Sakit)	Orang	116	150	0	150	8,541	150	8,541	150	8,541	150	8,541	150	8,541
I.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					152,075		246,681		334,868		279,754		266,512		274,189
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					152,075		246,681		334,868		279,754		266,512		274,189
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	4,936	BB	5,170	BB	5,171	BB	5,171	A	5,171	A	5,171
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	2,675	100	2,033	100	2,156	100	2,177	100	2,201	100	2,229
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	18.83	24.34	7,532	35.24	64,760	44.77	60,000	53.19	36,200	61.89	36,000	70.07	36,200
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60.00	64.09	9,014	68.35	21,142	74.61	21,142	79.88	21,142	85.14	21,142	90.40	21,142
I.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kota	%	95.40	96.55	3,669	97.70	11,550	98.75	12,705	100	13,976	100	13,000	100	13,000
I.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	100	100	4,850	100	13,030	100	10,427	100	10,679	100	10,440	100	10,550
I.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	79.64	57.87	28,183	59.85	34,957	61.41	38,343	63.51	42,067	65.68	46,164	67.94	50,570
I.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	84.06	85.56	28,374	87.06	24,271	88.56	24,271	90.06	24,271	91.56	24,271	93.06	24,271
I.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	18,837	100	7,318	100	91,942	100	54,564	100	54,564	100	54,564
I.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	1,461	100	868	100	868	100	868	100	868	100	868
I.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kelayakan jalan kota	%	85.13	81.21	40,583	81.32	59,578	81.33	65,447	81.42	65,003	81.60	69,559	81.87	73,586
I.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Layanan informasi dan rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	144	100	235	100	145	100	163	100	184	100	204
I.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	100	66.33	1,819	70.00	1,770	78.00	2,252	90.00	3,424	98.00	2,748	100	1,305
I.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					23,508		51,744		57,628		65,597		67,939		74,190
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					23,508		51,744		57,628		65,597		67,939		74,190
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	3,813	BB	4,194	BB	4,613	BB	4,706	A	4,800	A	4,896
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	10,750	100	12,758	100	14,033	100	14,314	100	14,600	100	14,890
I.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani	%	0.27	100	209	100	272	100	314	100	3,200	100	326	100	333
		Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki ijin	%	0	0	0	100	1,030	100	1,030	100	1,060	100	1,084	100	1,107
I.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	%	N/A	3.92	7,090	7.84	8,976	11.76	9,573	15.68	10,270	19.60	10,894	24	11,631
I.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	55	100	1,647	100	19,462	100	22,905	100	26,850	100	30,872	100	35,861
I.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh	%	0	0	-	100	5,053	100	5,154	100	5,257	100	5,362	100	5,470
I.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELEINDUNGAN MASYARAKAT					13,222		14,946		15,738		16,631		17,640		18,267
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					9,453		10,885		11,381		11,949		12,600		12,834
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Belayan Internal	%	100	100	7,077	80	7,859	90	7,965	80	8,081	90	8,209	90	8,350
I.05.02	Program Peningkatan Ketenraman dan Kertetiban Umum	Persentase Patroli Siaga Kertetiban Umum dan Ketenraman Masyarakat	%	100	80	1,919	80	2,455	80	2,703	80	2,975	80	3,276	90	3,090
I.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran serta Time Respon	%	100	80	457	80	571	80	714	85	892	90	1,115	90	1,394
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					3,769		4,061		4,356		4,682		5,039		5,433

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Jula)															
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	1,073	BB	1,075	BB	1,077	BB	1,080	A	1,082	A	1,085	A	1,085		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	787	100	860	100	944	100	1,030	100	1,128	100	1,230	100	1,230		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	100	100	1,990	100	2,125	100	2,338	100	2,572	100	2,829	100	3,112	100	3,112		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6,825		7,628		10,808		11,308		11,704		12,182		12,182		
	DINAS SOSIAL					6,825		7,628		10,808		11,308		11,704		12,182		12,182		
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	3,194	BB	3,514	BB	3,865	BB	3,942	A	4,001	A	4,102	A	4,102		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,252	100	1,437	100	1,565	100	1,595	100	1,576	100	1,608	100	1,608		
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial tenaga kesejahteraan sosial tenaga sumber kesejahteraan sosial, kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	%	100	100	350	100	421	100	463	100	472	100	481	100	481	100	481		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	100	771	100	848	100	2,393	100	2,428	100	2,596	100	2,777	100	2,777		
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang dipelihara	%	100	100	1,004	100	1,105	100	1,563	100	1,623	100	1,685	100	1,752	100	1,752		
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	254	100	304	100	1,159	100	1,248	100	1,345	100	1,452	100	1,452		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					120,987		169,574		160,733		169,326		178,993		189,390		189,390		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					802		988		1,120		1,232		1,355		1,508		1,508		
	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA					802		988		1,120		1,232		1,355		1,508		1,508		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase informasi kebijakan strategi rencana tenaga kerja 5 tahunan	%	100	100	0	100	15	100	0	100	0	100	0	100	18	100	18		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	%	0,47	0,56	482	0,60	602	0,65	662	0,70	728	0,75	801	0,80	881	0,80	881		
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	3,11	3,15	133	3,21	184	3,36	202	3,58	222	3,81	245	4,06	289	4,06	289		
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan	%	3,91	4	187	4,2	187	5	255	10	281	14	309	17	340	17	340		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					887		1,107		1,393		1,472		1,525		1,594		1,594		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					887		1,107		1,393		1,472		1,525		1,594		1,594		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	66,63	70	334	70	464	70	500	73	540	73	575	73	625	73	625		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	182	100	182	100	200	100	204	100	208	100	212	100	212		
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Sekolah inspirasi perempuan tekun (SI DURI) di Kota Banjarbaru	Unit	N/A	1	60	2	150	3	225	4	250	5	255	6	260	6	260		
		Jumlah kelompok Industri Bumahan Perempuan yang terbentuk di Kota Banjarbaru	Unit	N/A	2		4		6		8		10		12		12			
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	129	100	129	100	268	100	274	100	279	100	285	100	285		
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Terealisasi	%	100	100	182	100	182	100	200	100	204	100	208	100	212	100	212		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DANGAN					12,512		13,036		14,339		15,776		17,283		18,779		19,179		
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					12,512		13,036		14,339		15,776		17,283		18,779		19,179		
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	9,625	BB	9,630	BB	10,593	BB	10,653	A	12,819	A	14,100	A	14,100		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,255	100	1,972	100	2,170	100	2,387	100	2,625	100	2,888	100	2,888		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Scoring	90,1	90,2	1,532	90,25	1,319	90,30	1,450	90,35	1,598	90,40	1,798	90,45	2,024	90,45	2,024		
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota	%	60	65	99	70	114	70	126	75	138	75	152	80	167	80	167		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10,040		44,432		45,525		46,433		47,360		48,304		48,304		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					27,171		43,953		45,009		45,909		46,828		47,764		47,764		
XXX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	5,376	BB	5,444	BB	5,553	BB	5,664	A	5,777	A	5,893	A	5,893		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	802	100	1,013	100	1,033	100	1,053	100	1,074	100	1,096	100	1,096		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Indeks	56,56	57,17	2,755	57,67	365	58,17	372	58,67	380	59,17	387	59,67	395	59,67	395		
		Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Indeks	86,91	87,41		87,91		88,41		88,91		89,41		89,91		89,91			

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)															
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	%	4,1	4,2	2,332	4,4	4,322	4,6	4,754	4,7	4,849	4,9	4,946	5,1	5,045	5,1	5,045		
		Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	%	100	100	105	100	325	100	332	100	338	100	345	100	352	100	352		
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	100	100	36	100	70	100	71	100	73	100	74	100	76	100	76		
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPLH)	Persentase ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	%	92	93	105	94	170	95	173	96	177	97	180	98	184	98	184		
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase sekolah yang melaksanakan program adiwiyata/ berwawasan lingkungan	%	100	100	150	100	165	100		100		100		100		100			
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	142	100		100		100		100		100		100			
2.10.09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang diselesaikan	%	100	100	0	100	25	100	26	100	26	100	27	100		100			
2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	persentase pengelolaan sampah	%	100	100	15,358	100	32,054	100	32,695	100	33,349	100	34,016	100	34,697	100	34,697		
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						2,869		479		918		824		832		840		840		
XXX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	104	100	104	100	104	100	104	100	104	100	104	100	104		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Indeks	56,56	57,17	2,755	57,67	365	58,17	402	58,67	410	59,17	418	59,67	426	59,67	426		
		Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Indeks	86,91	87,41		87,91		88,41		88,91		89,41		89,91		89,91			
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8,302		11,068		15,262		14,120		14,464		15,186		15,186		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL						6,733		9,402		11,430		12,252		12,558		13,242		13,242		
XXX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	4,006	BB	5,377	BB	6,642	BB	6,813	A	7,029	A	7,368	A	7,368		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1192	100	2,526	100	3,009	100	3,437	100	3,544	100	3,503	100	3,500		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase data Kependudukan yang valid dan update	%	100	100	344	100	393	100	432	100	453	100	476	100	500	100	500		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase data pencatatan sipil yang valid dan update	%	100	100	267	100	535	100	718	100	915	100	1,075	100	1,230	100	1,230		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	82,5	204	83	607	84	607	85	607	86	607	87	607	87	607		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan data profil Kependudukan yang sesuai ketentuan	%	NA	0	0	100	24	100	26	100	27	100	28	100	29	100	29		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1,569		1,666		1,832		1,869		1,906		1,944		1,944		
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase keluhan cepat berkembang	%	100	100	60	100	102	100	102	100	104	100	107	100	109	100	109		
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM, TP-PKK, Proyodu yang aktif dan sosialisai TIG	%	100	100	1,509	100	1,564	100	1,720	100	1,754	100	1,789	100	1,825	100	1,825		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6,810		6,976		7,436		7,628		7,824		8,026		8,026		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						6,810		6,976		7,436		7,628		7,824		8,026		8,026		
XXX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	3,587	BB	3,612	BB	3,793	BB	3,907	A	4,024	A	4,145	A	4,145		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	575	100	475	100	499	100	514	100	529	100	545	100	545		
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase perkawinan usia anak menurun	%	100	100	120	100	150	100	165	100	168	100	172	100	175	100	175		
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang ber KB	%	100	100	2,069	100	2,069	100	2,276	100	2,322	100	2,368	100	2,415	100	2,415		
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R dalam pembangunan keluarga	%	100	14,19	660	14,17	670	14,14	703	14,10	717	14,05	728	14	748	14	748		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						16,909		18,422		19,977		21,838		23,820		25,987		26,987		
DINAS PERHUBUNGAN						13,701		14,536		15,857		17,340		18,964		20,746		22,740		
XXX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	4,037	BB	4,324	BB	4,624	BB	5,040	A	5,618	A	6,024	A	6,024		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,458	100	1,558	100	1,714	100	1,868	100	1,912	100	2,082	100	2,082		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	%	30	32	6,578	34	6,919	36	7,618	38	8,352	40	9,106	42	10,068	42	10,068		

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Jula)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	%	42	45		47		50		53		55		57		57	
		Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	%	80	83	270	86	286	87	314	90	342	93	374	96	408	96	408
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	%	100	80	245	82,5	1,07	85	1,288	90	1,404	95	1,53	100	1,669	100	1,669
		Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	%	100	100	1,18	100	278	100	306	100	334	100	362	100	398	100	398
	UPT. PENGUNJIAN KENDARAAN BERMOTOR						1,552		1,899		2,089		2,264		2,446		2,546	
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,552	100	234	100	258	100	274	100	291	100	315	100	330
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	%	NA	0	0	25	1,664	30	1,831	30	1,996	35	2,160	35	2,326	35	2,491
	UPT. PERPAKIRAN						1,656		1,987		2,234		2,466		2,700		2,900	
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	85	100	141	100	150	100	164	100	180	100	197	100	197
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	NA	100	1,571	100	1,846	100	1,881	100	2,069	100	2,276	100	2,504	100	2,504
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11,201		36,038		17,877		20,604		22,258		22,258	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11,201		36,038		17,877		20,604		22,258		22,258	
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	83	BB	95	BB	109	BB	126	A	145	A	166	A	166
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	4,965	100	5,743	100	6,605	100	7,598	100	8,735	100	10,045	100	10,045
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	%	100	100	2,806	100	2,997	100	3,207	100	3,456	100	3,694	100	3,976	100	3,976
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Nilai Aspek SPBE	Nilai	2	2	2,347	2	27,202	2	2,956	2	7,993	2	8,021	2	8,071	2	8,071
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						8,054		8,173		9,157		10,073		12,189		12,189	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA						8,054		8,173		9,157		10,073		12,189		12,189	
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	5,051	BB	5,053	BB	5,598	BB	6,114	BB	6,725	A	7,398	A	7,398
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	634	100	872	100	1,126	100	1,239	100	1,363	100	1,499	100	1,499
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	%	15,2	17,65	0	19,61	103	22,06	113	24,51	125	26,96	137	29,41	151	29,41	151
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat	Koperasi	NA	3	295	4	60	5	66	6	73	7	80	8	88	8	88
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya	%	18	19	390	19,5	100	20	110	21	121	23	133	25	146	25	148
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun	%	NA	5	0	6	138	8	152	9	167	10	184	10	202	10	202
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitas program pemberdayaan	%	25,55	26,55	366	28,54	1,148	30,53	1,262	35,50	1,388	40,48	1,527	45,45	1,680	45,45	1,680
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Usaha Mikro	NA	10	1,371	20	700	40	770	60	847	80	932	100	1,025	100	1,025
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						9,461		9,461		9,457		9,722		10,623		11,220	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						9,461		9,461		9,457		9,722		10,623		11,220	
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB/76,8	4,025	BB/77	4,187	BB/78	4,218	BB/79	4,640	A/80	5,104	A/80,1	5,614	A/80,1	5,614
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	2,490	100	3,084	100	3,127	100	3,045	100	3,475	100	3,598	100	3,598
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi	MtRp	88,716,485,000	92,265,139,200	26	95,955,744,768	310	99,793,974,509	300	103,785,733,541	590	107,937,362,883	550	112,254,649,398	600	112,254,649,398	600
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Investor	18	20	342	22	400	24	400	26	320	28	320	30	320	30	320
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,61	87,75	245	88	114	88,25	125	88,5	139	88,75	152	89	166	89	166
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	4	3,97	832	4,00	962	4,02	951	4,05	938	4,07	924	4,10	911	4,10	911
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	%	N/A	75	335	77	335	79	335	81	335	83	335	85	335	85	335
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	%	N/A	100	408	100	215	100	300	100	306	100	312	100	318	100	318
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						9,461		11,094		11,724		12,074		12,722		13,169	
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA						9,461		11,094		11,724		12,074		12,722		13,169	
2.19.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja skpd	Kategori	B	B	4,791	BB	5,080	BB	5,367	BB	5,654	A	5,947	A	6,233	A	6,403
		Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	35	35	214												
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%				10	1,070	15	1,164	20	1,268	30	1,381	40	1,505	40	1,505
		Persentase partisipasi pemuda kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha)	%	-	-	-	2		4		6		8		10		10	

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Jula)															
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kedahragaan	Jumlah cabang olah raga yang dibina	Jumlah	45	34	4,529	-	-	-	-	-	-	-	-	5,724	77	6,003	77	6,003	6,003
		Persentase cabang olahraga yang dibina	%	-	-	-	51	4,945	-	5,192	-	5,432	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					105		108		130		136		144		166		166		166
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					105		108		130		136		144		166		166		166
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	70	105	70	108	75	130	80	136	85	144	90	166	90	166	166	166
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					181		195		219		198		227		261		261		261
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					181		195		219		198		227		261		261		261
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	%	NA	30	181	30	195	35	219	40	198	45	227	50	261	50	261	261	261
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1,035		1,112		1,195		1,286		1,366		1,448		1,448		1,448
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					1,035		1,112		1,195		1,286		1,366		1,448		1,448		1,448
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	group	9	9	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni budaya	%	-	-	-	37	791	46	858	65	932	83	994	100	1,058	100	1,058	1,058	1,058
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	3	3	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.04	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase terlestarikannya cagar budaya	%	-	-	-	91,6	320,950,350	91,6	336,997,868	100	353,847,761	100	371,540,348	100	390,177,356	100	390,177,356	390,177,356	390,177,356
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6,223		7,245		7,561		7,774		8,089		8,465		8,465		8,465
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					6,223		7,245		7,561		7,774		8,089		8,465		8,465		8,465
2.24.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	960	BB	1,623	BB	1,620	BB	1,421	A	1,482	A	1,587	A	1,587	1,587	1,587
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	WTP	WTP	3,701	WTP	4,436	WTP	4,889	WTP	5,239	WTP	5,390	WTP	5,698	WTP	5,698	5,698	5,698
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kepuasan Membaca Masyarakat	Nilai	24,5	51	71	52	206	53	216	54	227	55	239	56	250	56	250	250	250
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	3,10	13,25	1,492	13,50	780	13,60	836	13,70	887	13,75	955	14	10,000	14	10,000	10,000	10,000
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang ada yang telah di digitalmedikan	%	N/A	-	-	-	-	-	-	33	21	33	22	-	-	-	-	-	-
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					129		283		360		392		395		428		428		428
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					129		283		360		392		395		428		428		428
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban Nasional Sesuai Undang-undang Kearsipan	%	28,25	36	129	46	238	51	313	56	313	61	343	71	373	71	373	373	373
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	44,5	-	-	50	45	65	47	75	50	85	52	94	55	94	94	94	94
2.24.04	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSDK	%	N/A	-	-	-	-	-	-	80	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					21,482		23,922		26,389		29,325		32,011		36,248		36,248		36,248
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2,748		3,191		3,466		3,554		4,302		5,150		5,150		5,150
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					1,876		2,064		2,342		2,468		2,908		3,018		3,018		3,018
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	362,4	380,52	1,441	399,55	1,631	405,54	1,794	411,62	2,043	417,79	2,338	424,06	2,633	424,06	2,633	2,633	2,633
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	318	33,39	19	35,05	23	35,75	26	36,46	29	37,18	34	37,92	39	37,92	39	39	39
3.25.06	Program Pengalihan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	%	113,15	2	779	2	223	2	245	2	269	2	296	2	326	2	326	326	326
UPT. BALAI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR						1,111		1,274		1,402		1,612		1,854		2,132		2,132		2,132
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	362,4	380,52	1,111	399,55	1,274	405,54	1,402	411,62	1,612	417,79	1,854	424,06	2,132	424,06	2,132	2,132	2,132
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1,093		1,099		1,191		1,291		1,313		2,373		2,373		2,373
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					1,093		1,099		1,191		1,291		1,313		2,373		2,373		2,373
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan destinasi wisata unggulan	%	30	30	59	33	167	36	175	40	184	43	193	46	203	46	203	203	203
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	%	24,50	26,50	650	30	775	34	787	39	865	44	865	49	1,047	49	1,047	1,047	1,047
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase destinasi wisata yang memiliki Piodarwis	%	43	43	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	%	53	61	142	69	217	76	229	84	242	92	256	100	1,023	100	1,023	1,023	1,023
		Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	%	-	-	-	2	-	5	-	7	-	10	-	12	-	12	-	12	12
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					3,839		5,924		6,516		7,168		7,885		8,673		8,673		8,673
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					3,839		5,924		6,516		7,168		7,885		8,673		8,673		8,673
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas lahan pertanian yang terproduksi	ha	1,365	1,582	666	1,598	563	1,614	681	1,630	743	1,646	824	1,662	924	1,662	924	924	924
		Jumlah Populasi Ternak	ekor	2800000	2,823,400	1,952	2,851,000	2,647	2,879,000	2,950	2,905,400	3,203	2,993,000	3,523	2,960,000	3,875	2,960,000	3,875	3,875	3,875

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan	%	100	100	175	100	447	100	498	100	540	100	594	100	654	100	654
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	240	250	124	260	164	275	181	290	199	300	219	300	243	300	243
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Jumlah Pokitan yang naik/score	%	60,15	66	67		1,593	68	1,752	69	1,927	70	2,120	71	2,332	71	2,332
UPT. BALAI PEMBIRIHAN TERNAK PUSAT KESEHATAN						480		510		561		617		679		747		747
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Populasi Ternak	ekor	2800000	2823400	445	2850000	470	2879000	577	2905400	569	2993000	626	2960000	688	2960000	688
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	240	250	30	260	40	275	44	290	49	300	54	300	59	300	59
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						12.626		12.479		13.819		15.177		16.632		18.210		18.210
DINAS PERDAGANGAN						10.609		10.261		11.379		12.452		13.679		14.964		14.964
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	5,389	B	5,408	BB	5,949	BB	6,544	BB	7,398	A	7,918	A	7,998
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	652	100	1,459	100	1,685	100	1,813	100	1,954	100	2,090	100	2,090
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase Pelaku Usaha Yang Berizin	%	100	100	32	156	100	136	150	100	165	100	182	100	200	100	200
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	Pedagang	1000	600	4,086	720	2,643	864	2,907	1037	3,198	1244	3,518	1492	3,870	1492	3,870
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	N/A	10	10	142	10	275	10	310	10	345	10	381	10	419	10	419
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase alat UTPP metrologi legal terbit ulur	%	100	100	154	100	170	100	187	100	205	100	220	100	220	100	220
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	100	100	154	100	169	100	186	100	220	100	225	100	248	100	248
UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG						1.582		1.740		1.914		2.106		2.316		2.548		2.548
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Nilai	B	B	1,438	BB	1,582	BB	1,740	BB	1,914	A	2,106	A	2,317	A	2,317
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	%	20	900	144	1072	158	1072	174	1072	188	1072	210	1072	231	1072	231
UPTD PASAR ULIN BAYA						81		89		98		108		119		130		130
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	46	100	51	100	56	100	61	100	67	100	74	100	74
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	%	20	184	30	208	39	228	42	248	47	268	51	10	56	10	56
UPTD CUDANG TRANSITO						89		98		108		118		130		143		143
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Nilai	100	100	50	100	55	100	61	100	67	100	73	100	81	100	81
3.30.03	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	%	20	15	39	15	43	15	47	15	52	15	57	15	63	15	63
UPTD METROLOGI						265		292		321		353		388		427		427
X.XX.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Nilai	100	100	193	100	212	100	234	100	257	100	283	100	311	100	311
3.30.03	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaksanaan tera ulang alat UTPP Metrologi legal	%	100	100	72	100	79	100	87	100	96	100	105	100	116	100	116
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.154		1.269		1.396		1.536		1.689		1.858		1.858
DINAS PERDAGANGAN						1.154		1.269		1.396		1.536		1.689		1.858		1.858
3.31.02	Perencanaan dan Pengembangan Industri	Prosentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	12	12	960	12	1,056	12	1,162	12	1,278	12	1,406	12	1,546	12	1,546
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase legalitas IKM sesuai ketentuan	%	5	6	76	7	83	8	91	9	100	10	111	11	122	11	122
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase Industri kecil dan Menengah yang terupdate dalam aplikasi SINAS	%	5	8	118	10	130	12	143	14	157	14	173	14	190	14	190
3. UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						64.803		70.645		76.186		79.893		85.149		90.415		90.415
4.01 SEKRETARIAT DAERAH						11.350		11.917		12.761		13.302		13.924		14.332		14.332
SEKRETARIAT DAERAH						11.350		11.917		12.761		13.302		13.924		14.332		14.332
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	13,941	BB	14,638	BB	15,370	BB	16,138	BB	16,945	A	17,792	A	17,792
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	21	100	20	100	21	100	22	1	23	1	24	1	24
		Prosentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP/ RB yang selesai ditindak lanjut	%	100	100	497	100	522	100	548	100	576	100	605	100	635	100	635
		Prosentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindak lanjut	%	100	100	302	100	317	100	333	100	350	100	367	100	385	100	385
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPDP	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	929	Sangat Tinggi	975	Sangat Tinggi	1,024	Sangat Tinggi	1,075	Sangat Tinggi	1,120	Sangat Tinggi	1,165	Sangat Tinggi	1,182
		Prosentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjut	%	100	100	8,398	100	8,818	100	9,259	100	9,722	100	10,208	100	10,719	100	10,719
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Prosentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjut	%	100	100	148	100	156	100	164	100	172	100	180	100	189	100	189
		Prosentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjut	%	100	100	1,075	100	1,029	100	1,433	100	1,407	100	1,463	100	1,219	100	1,219
4.02 SEKRETARIAT DPRD						53.453		58.727		63.425		66.591		71.197		76.083		76.083
SEKRETARIAT DPRD						53.453		58.727		63.425		66.591		71.197		76.083		76.083

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)															
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	3,813	BB	4,356	BB	4,705	BB	4,940	A	5,285	A	5,605	A	5,605		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	25,998	100	28,455	100	30,732	100	32,264	100	34,469	100	36,785	100	36,785		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	%	100	100	23,682	100	25,996	100	27,989	100	29,387	100	31,443	100	33,643	100	33,643		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9,197		66,382		84,513		89,440		94,251		95,028		95,028		
5.01	PERENCANAAN					9,197		8,514		9,058		9,695		10,848		10,981		10,981		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					9,197		8,514		9,058		9,695		10,848		10,981		10,981		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	3,920	B	4,306	BB	4,731	BB	5,399	A	5,713	A	6,278	A	6,278		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,732	1	1,789	1	1,760	1	1,810	1	1,864	1	1,265	1	1,265		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	1,263	100	916	100	973	100	996	100	1,477	100	1,533	100	1,533		
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Rencana SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD	%	100	100	1,140	100	751	100	797	100	845	100	897	100	953	100	953		
		Tingkat Keselarasan RIKPD dengan APBD	%	100	100	1,140	100	751	100	797	100	845	100	897	100	953	100	953		
5.02	KEUANGAN					55,940		57,774		59,716		60,744		60,729		61,155		61,155		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					38,339		38,339		38,339		39,126		39,126		39,126		39,126		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB	17,303	BB	17,303	BB	17,303	BB	17,446	BB	17,446	BB	17,446	BB	17,446		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,756	100	1,756	100	1,756	100	1,791	100	1,791	100	1,791	100	1,791		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Waktu Penyelesaian Rancangan Perda APBD Dan Rancangan Perubahan APBD Yang Ditetapkan	%	100	100	14,516	100	14,516	100	14,516	100	14,806	100	14,806	100	14,806	100	14,806		
		Persentase Jumlah SP2D Yang Terbit Tepat Waktu	%	100	100	674	100	674	100	674	100	688	100	688	100	688	100	688		
		Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	1,213	100	1,213	100	1,213	100	1,237	100	1,237	100	1,237	100	1,237		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Nilai Neraca BMD Sama Dengan Nilai BMD Dalam Neraca Keuangan	%	100	100	3,096	100	3,096	100	3,096	100	3,158	100	3,158	100	3,158	100	3,158		
	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					17,097		18,629		19,958		20,803		20,772		21,181		21,181		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	10,010	BB	11,000	BB	11,880	BB	13,069	A	13,955	A	14,400	A	14,400		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	3,100	100	3,489	100	3,831	100	3,404	100	2,400	100	2,275	100	2,275		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (Milyar)	Rp	196,53	123,88	3,986	133,88	4,140	135,15	4,246	142,45	4,330	150,12	4,477	160,25	4,505	160,25	4,505		
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar)	Rp	5,71	11,06	-	12,17	-	10,50	-	11,85	-	12,90	-	14,00	-	14,00	-		
		Rasio PAD	Nilai	1,2507	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran APBD	%	91,56	97,6	-	116,48	-	102,38	-	103,87	-	103,34	-	110,08	-	110,08	-		
	UPT PBB - P2 dan BPHTB WILAYAH I					276		423		423		430		438		448		448		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	276	100	423	100	423	100	430	100	438	100	448	100	448		
	UPT PBB - P2 dan BPHTB WILAYAH II					208		363		377		385		392		401		401		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	208	100	363	100	377	100	385	100	392	100	401	100	401		
5.03	KEPEGAWAIAN					16,240		16,240		16,240		18,897		22,566		22,777		22,777		
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					11,259		14,568		16,240		18,897		22,566		22,777		22,777		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB	4,124	BB	4,412	BB	4,439	A	4,463	A	4,491	A	4,491	A	4,491		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1,602	100	2,999	100	4,294	100	6,327	100	9,286	100	9,286	100	9,286		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Index Sistem Merit	Indeks	274	292	5,532	300	7,188	300	7,507	305	8,307	335	8,780	350	9,001	350	9,001		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2,821		7,797		11,241		9,605		6,270		5,727		5,727		
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					2,821		53,43		7,797		11,241		9,605		6,270		5,727		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase SDM Aparatur Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	N/A	15,8	2,821	53,43	7,797	83,98	11,241	105,63	9,605	120,48	6,270	134,32	5,727	134,32	5,727		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					167		94		99		104		109		115		115		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					167		94		99		104		109		115		115		
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbangsan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	167	100	94	100	99	100	104	100	109	100	115	100	115		
		Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					11,362		12,469		13,742		13,990		14,309		14,555		14,555		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					11,362		12,469		13,742		13,990		14,309		14,555		14,555		
	INSPEKTORAT					11,362		12,469		13,742		13,990		14,309		14,555		14,555		

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)															
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	7.399	BB	8.139	BB	8.953	BB	9.132	A	9.315	A	9.501	A	9.501		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	948	100	1.014	100	1.142	100	1.137	100	1.199	100	1.183	100	1.183		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Matritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SDIP)	Level	Level 3	Level 3	2.137	Level 3	2.350	Level 3	2.585	Level 3	2.637	Level 3	2.690	Level 3	2.744	Level 3	2.744		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (ADIP)	Level	Level 3	Level 3	878	Level 3	966	Level 3	1.062	Level 3	1.083	Level 3	1.105	Level 3	1.127	Level 3	1.127		
7	UNSUR KEWILAYAHAN					40.360		59.274		63.608		66.815		69.904		73.408		77.240		
7.01	KECAMATAN					40.360		59.274		63.608		66.815		69.904		73.408		77.240		
	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN					7.070		10.914		11.616		12.328		13.026		13.847		15.847		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	5.459	BB	6.005	BB	6.305	BB	6.620	A	6.885	A	7.230	A	7.230		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	346	100	796	100	876	100	920	100	964	100	1.012	100	1.012		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	BB	BB	1.265	BB	2.638	BB	2.901	BB	3.192	BB	3.511	BB	3.863	BB	3.863		
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	BB	BB	-	BB	45	BB	50	BB	55	BB	60	BB	65	BB	65		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	4	210	4	231	4	254	4	280	4	307	4	307		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	0	120	0	132	0	145	0	160	0	176	0	176		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT mandiri	%	N/A	-	-	12	1.100	24	1.120	36	1.142	48	1.165	60	1.189	60	1.189		
	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN					310		1.114		1.111		1.167		1.225		1.286		1.286		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	310	100	554	100	495	100	520	100	546	100	573	100	573		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	3	560	3	616	3	647	3	679	3	713	3	713		
	KELURAHAN KEMUNING					300		1.245		1.111		1.167		1.225		1.286		1.286		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	300	100	685	100	495	100	520	100	546	100	573	100	573		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	3	560	3	616	3	647	3	679	3	713	3	713		
	KELURAHAN CUNTING PAIKAT					346		930		1.111		1.167		1.225		1.286		1.286		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	346	100	370	100	495	100	520	100	546	100	573	100	573		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	3	560	3	616	3	647	3	679	3	713	3	713		
	KELURAHAN SUNGAI BESAR					322		893		1.111		1.163		1.221		1.282		1.282		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	322	100	333	100	495	100	516	100	542	100	569	100	569		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	3	560	3	616	3	647	3	679	3	713	3	713		
	KECAMATAN BANJARBARU UTARA					6.141		6.755		7.093		7.381		7.640		7.903		7.903		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks	B	BB	5.842	BB	6.428	BB	6.753	BB	6.959	BB	7.147	BB	7.399	BB	7.799		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	299	100	327	100	342	100	422	100	493	100	504	100	504		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	BB	BB	997	BB	1.176	BB	1.207	BB	1.327	BB	1.367	BB	1.400	BB	1.400		
		Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	N/A	0	32	BB	130	BB	181	BB	203	BB	208	BB	215	BB	215		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	97	2	105	3	111	4	113	4	122	4	122		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	100	60	100	63	100	64	100	65	100	66	100	66		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT Mandiri	%	N/A	-	-	12	900	24	900	36	900	48	900	60	900	60	900		
	KELURAHAN LOKTABAT UTARA					0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	306	100	402	100	460	100	469	100	479	100	488	100	488		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	0	0	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500	4		
	KELURAHAN KOMET					329		812		915		924		932		941		941		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	329	100	311	100	415	100	423	100	431	100	440	100	440		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	0	0	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500	4		
	KELURAHAN MENTAOIS					335		435		992		1.002		1.012		1.023		1.023		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	334	100	435	100	492	100	502	100	512	100	522	100	522		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	0	0	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500	4		
	KELURAHAN SUNGAI ULIN					328		1.099		1.039		1.049		1.060		1.072		1.072		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	327	100	599	100	538	100	549	100	560	100	571	100	571		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	0	0	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500	4		
	KECAMATAN CEMPAKA					6.759		9.316		10.156		10.538		10.946		11.384		12.156		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB	5.245	BB	5.749	BB	6.323	BB	6.430	BB	6.598	BB	6.603	BB	6.603		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	341	100	433	100	472	100	504	100	554	100	600	100	600		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	BB	BB	1.173	BB	1.824	BB	2.007	BB	2.208	BB	2.428	BB	2.671	BB	2.671		
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	BB	BB	-	BB	200	BB	220	BB	242	BB	266	BB	288	BB	288		

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Jula)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	160	2	176	3	194	4	213	4	234	4	234
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	100	50	100	55	100	61	100	67	100	73	100	73
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT Mandiri	RT	N/A	-	-	12	900	24	900	36	900	48	900	60	900	60	900
KELURAHAN CEMPAKA					-	339	-	873	-	900	-	934	-	954	-	972	-	972
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	339	100	373	100	401	100	414	100	454	100	472	100	472
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500
KELURAHAN PALAM					-	324	-	854	-	873	-	896	-	905	-	916	-	916
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	324	100	354	100	373	100	396	100	405	100	416	100	416
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500
KELURAHAN BANGKAL					-	297	-	908	-	949	-	958	-	967	-	976	-	976
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	297	100	408	100	449	100	458	100	467	100	476	100	476
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500
KELURAHAN SUNGAI TIUNG					-	301	-	843	-	861	-	883	-	921	-	936	-	936
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	301	100	343	100	361	100	383	100	421	100	436	100	436
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	500	2	500	3	500	4	500	4	500	4	500
KECAMATAN LANDASAN ULIN					-	7.159	-	10.169	-	10.860	-	11.642	-	12.362	-	12.948	-	12.948
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	62(B)	5.477	63 (B)	6.402	64 (B)	7.062	65 (B)	7.776	66 (B)	8.238	67 (B)	8.698	67 (B)	8.698
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	430	100	614	100	656	100	713	100	676	100	701	100	701
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,5	87	1.312	87,5	1.994	87,8	2.073	88	2.078	88,5	2.368	90	2.404	90	2.404
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	N/A	81	68	81,5	93	82	102	82,5	112	83	118	83,5	124	83,5	124
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	47	2	49	3	52	4	58	4	59	4	59
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	-	-	100	18	100	20	100	22	100	24	100	26	100	26
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah RT mandiri	RT	N/A	-	-	12	1000	24	1000	36	1000	48	1000	60	1000	60	1000
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR					-	336	-	938	-	979	-	1.024	-	1.048	-	1.074	-	1.074
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	336	100	408	100	449	100	494	100	518	100	544	100	544
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	0	-	-	1	530	2	530	3	530	4	530	4	530	4	530
KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG					-	296	-	885	-	920	-	899	-	1.002	-	1.049	-	1.049
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	296	100	355	100	390	100	429	100	472	100	509	100	509
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	530	2	530	3	429	4	530	4	530	4	530
KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR					-	326	-	921	-	960	-	1.037	-	1.027	-	1.062	-	1.062
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	326	100	391	100	430	100	507	100	497	100	522	100	522
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	530	2	530	3	530	4	530	4	530	4	530
KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS					-	323	-	918	-	957	-	999	-	1.023	-	1.047	-	1.047
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	323	100	388	100	427	100	469	100	493	100	517	100	517
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Berkembang	Kel	N/A	-	-	1	530	2	530	3	530	4	530	4	530	4	530
KECAMATAN LIANG ANGGANG					-	7.562	-	8.074	-	8.623	-	9.213	-	9.844	-	10.479	-	11.530
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	100%	4.990	Baik	5.157	Baik	5.417	Baik	5.690	Baik	5.976	Baik	6.277	Baik	6.277
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	1.465	100	1.681	100	1.773	100	1.955	100	2.145	100	2.355	100	2.355
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	87	1.063	87,5	1.169	87,8	1.284	88	1.415	88,5	1.558	90	1.712	90	1.712
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	N/A	81	-	81,5	-	82	-	82,5	-	83	-	83,5	-	83,5	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya	Kel	N/A	3	46	3	51	3	56	4	61	4	62	5	64	5	64
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	N/A	100	32	100	36	100	36	100	37	100	38	100	39	100	39
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	100	45	100	50	100	51	100	60	100	66	100	73	100	73
KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH					-	306	-	337	-	370	-	407	-	448	-	493	-	493.013.712
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	306	100	337	100	370	100	407	100	448	100	493	100	493
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan secara swadaya	Kel	0	-	-	12	500	24	500	36	500	48	500	60	500	60	500
KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA					-	322	-	354	-	389	-	397	-	405	-	413	-	413
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	322	100	354	100	389	100	397	100	405	100	413	100	413
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya	Kel	N/A	-	-	12	500	24	500	36	500	48	500	60	500	60	500
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT					-	281	-	309	-	339	-	373	-	411	-	452	-	452

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	281	100	309	100	339	100	373	100	411	100	452	100	492
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan secara swadaya	kel	N/A	-	-	12	500	24	500	36	500	48	500	60	500	60	500
	KELURAHAN LANDASAN UJIN SELATAN					275		302		332		365		402		442		492
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	275	100	302	100	332	100	365	100	402	100	442	100	492
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya	kel	N/A	-	-	12	500	24	500	36	500	48	500	60	500	60	500
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				8.142		10.676		10.896		8.282		8.412		8.553		8.553	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.142		10.676		10.896		8.282		8.412		8.553		8.553	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.142		10.676		10.896		8.282		8.412		8.553		8.553	
XXX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	2,883	BB	3,034	BB	3,094	BB	3,156	A	3,219	A	3,284	A	3,344
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	596	100	891	100	997	100	758	100	776	100	798	100	799
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	%	100	100	2.730	100	3.072	100	3.083	100	604	100	617	100	629	100	629
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	70	100	1.289	100	2.055	100	2.064	100	2.073	100	2.082	100	2.092	100	2.092
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	%	100	80	41	85	72	90	75	95	79	100	80	100	98	100	98
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitas / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100	100	374	100	433	100	442	100	451	100	460	100	469	100	469
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik /potensi sosbud Hankam yang ditangani	%	100	100	230	100	1.020	100	1.040	100	1.061	100	1.082	100	1.104	100	1.104

BAB 8



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Banjarbaru diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Banjarbaru. Target pencapaian ini adalah indikator kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 8.1 dan tabel 8.2 berikut ini.



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,95	10,96	10,97	10,98	10,99	11,00	11,01
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,99	72,10	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60
3	Angka Prevalensi Stunting	Angka	14,19	14,05	14,00	13,95	13,90	13,85	13,80
4	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	92,80	92,85
5	Angka Inflasi	%	2,25	<3	<3	<3	<3	<3	<3
6	Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PAD Kota	%	-7,22	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
9	Pertumbuhan UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	%	-0,67	3,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
10	Peningkatan PAD (Milyar)	Rp	-	238,7	246,6	254,5	264,3	273,2	300,7
11	Peningkatan Investasi Daerah (Milyar)	Rp	-	137	142	147	152	158	163
12	Angka Kemiskinan	%	4,01	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50
13	Angka Pengangguran	%	5,54	5,39	5,24	5,09	4,94	4,79	4,64
14	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Skor	80,11	80,21	80,45	80,90	81,71	82,10	82,51
15	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,69	74,28	75,99	77,56	79,26	80,81	82,37
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	62,17	62,67	63,17	63,67	64,17	64,67
17	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A
18	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
21	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,67	73	76	79	82	85	88
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,62	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banjarbaru

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
APSEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
Pertumbuhan Ekonomi	-1,88	2 - 3	4	4 - 5	5	5 - 6	6,93	6,93
Laju Inflasi	2,25	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
KESEJAHTERAAN SOSIAL								
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,10	79,20	79,30	79,40	79,50	79,60	79,70	79,70
Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,95	10,96	10,97	10,98	10,99	11,00	11,01	11,01
Indeks Gini	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
APSEK PELAYANAN UMUM								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
PENDIDIKAN								
Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	65	66	70	75	80	85	90	90
Persentase pendidik yang bersertifikasi	38	40	42	45	47	49	51	51
KESEHATAN								
Angka Kematian Ibu	172	109	90	87	85	84	82	82
Angka Kematian Bayi	4,5	4,1	3,4	3	2	2	1,6	1,6
Angka Kesakitan	29	29	27	25	23	21	20	20
Prevalensi Gizi Kurang	10,02	9	8	7	6	5	4	4
Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	90	90	100	100	100	100	100	100
Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan	97	97	98	99	100	100	100	100
Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100	97	100	100	100	100	100	100
Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit	22	22	22	22	22	22	22	22
Status Akreditasi	Tingkat 4 (Utama)	Tingkat 4 (Utama)	Tingkat 4 (Utama)	Tingkat 5 (Paripurna)	Tingkat 5 (Paripurna)	Tingkat 5 (Paripurna)	Tingkat 5 (Paripurna)	Tingkat 5 (Paripurna)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Persentase peningkatan perlindungan banjir	18,83	24,34	35,24	44,17	53,19	61,89	70,07	70,07
Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,00	64,09	69,35	74,61	79,88	85,14	90,40	90,40
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	95,40	96,55	97,70	98,75	100	100	100	100
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	79,64	57,87	59,85	61,41	63,51	65,68	67,94	67,94
Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	100	100	100	100	100	100	100



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani	0,27	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki ijin	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	N/A	3,92	7,84	11,76	15,68	19,60	24	24
Persentase rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	0	0	100	100	100	100	100	100
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kertenraman Masyarakat	100	80	80	80	80	80	90	90
Cakupan Kesiagaan, Penanggulangan Kebakaran serta Time Respon	100	80	80	80	85	90	90	90
SOSIAL								
Persentase Pekerja Sosial ,tenaga kesejahteraan sosial tenaga sumber kesejahteraan sosial , kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Anak Terlantar yang dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
TENAGA KERJA								
Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga kerja 5 tahunan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	0,47	0,56	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	3,11	3,15	3,21	3,36	3,58	3,81	4,06	4,06
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan	3,91	4	4,2	5	10	14	17	17
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,63	70	70	70	73	73	73	73
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Sekolah inspirasi perempuan tekun (SI PURUN) di Kota Banjarbaru	N/A	1	2	3	4	5	6	6
Jumlah kelompok Industri Rumahan Perempuan yang terbentuk di Kota Banjarbaru	N/A	2	4	6	8	10	12	12
Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
PANGAN								
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90.1	90.2	90.25	90.30	90.35	90.40	90.45	90.45
Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota (%)	60	65	70	70	75	75	80	80
LINGKUNGAN HIDUP								
Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	56,56	57,17	57,67	58,17	58,67	59,17	59,67	59,67
Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	86,91	87,41	87,91	88,41	88,91	89,41	89,91	89,91
Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9	5,1	5,1



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	100	100	100	100	100	100	100	100
persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	92	93	94	95	96	97	98	98
persentase sekolah yang melaksanakan program adiwiyata/ berwawasan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100
persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
persentase pengelolaan persampahan	100	100	100	100	100	100	100	100
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Persentase data Kependudukan yang valid dan update	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase data pencatatan sipil yang valid dan update	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,5	83	84	85	86	87	87
Cakupan data profil Kependudukan yang sesuai ketentuan	NA	0	100	100	100	100	100	100
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Persentase perkawinan usia anak menurun	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase PUS yang ber KB	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R dalam pembangunan keluarga	100	14,19	14,17	14,14	14,10	14,05	14	14
PERHUBUNGAN								
Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	30	32	34	36	38	40	42	42
Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	42	45	47	50	53	55	57	57
Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	80	83	86	87	90	93	96	96
Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	NA	0	25	30	30	35	35	35
Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	NA	100	100	100	100	100	100	100
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Persentase informasi publik pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Aspek SPBE	2	2	2	2	2	2	2	2
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Persentase koperasi berkualitas	15,20	17,65	19,61	22,06	24,51	26,96	29,41	29,41
Jumlah koperasi yang sehat	NA	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya	18,00	19,00	19,5	20,00	21,00	23,00	25,00	25,00
Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n	NA	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	25,55	26,55	28,54	30,53	35,50	40,48	45,45	45,45
Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	NA	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Nilai realisasi investasi	88,716,480,000	92,265,139,200	95,955,744,768	99,793,974,559	103,785,733,541	107,937,162,883	112,254,649,398	112,254,649,398
Jumlah Investor Baru	18	20	22	24	26	28	30	30
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,61	87,75	88	88,25	88,5	88,75	89	89
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4	3,97	4,00	4,02	4,05	4,07	4,10	4,10
Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75	77	79	81	83	85	85
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35	35						
Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			10	15	20	30	40	40
Persentase partisipasi pemuda kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha)			2	4	6	8	10	10
Jumlah cabang olah raga yang dibina	45	14	0	0	0	0	0	14
STATISTIK								
Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	NA	70	70	75	80	85	90	90
PERSANDIAN								
Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	NA	30	30	35	40	45	50	50
KEBUDAYAAN								
Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	9	9	0	0	0	0	0	0
Persentase Pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni budaya	0	0	37	46	65	83	100	100
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	3	3	0	0	0	0	0	0
Persentase terlestarikannya cagar budaya	0	0	91,6	91,6	100	100	100	100
PERPUSTAKAAN								
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	24,5	51	52	53	54	55	56	56
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,10	13,25	13,50	13,60	13,70	13,75	14	14
Persentase naskah kuno yang ada di wilayah kota yang telah didigitalisasi (%)	N/A	-	-	-	33	33	-	-
KEARSIPAN								
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional sesuai UU Kearsipan (%)	28,25	36	46	51	56	61	71	71
Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	44,5	-	54,5	64,5	74,5	84,5	94	94
Persentase pengguna layanan arsip yang puas dengan pelayanan bidang kersipan (%)	N/A	-	-	-	80	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Jumlah produksi perikanan budidaya	362,4	380,52	399,55	405,54	411,62	417,79	424,06	424,06
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	31,8	33,39	35,05	35,75	36,46	37,18	37,92	37,92
Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	113,15	2	2	2	2	2	2	2
PARIWISATA								
Persentase Peningkatan destinasi wisata unggulan	30	30	33	36	40	43	46	46
Tingkat Hunian Akomodasi	24,50	26,50	30	34	39	44	49	49
Persentase destinasi wisata yang memiliki Pokdarwis	43	43	0	0	0	0	0	0
Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	53	61	69	76	84	92	100	100
Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	-	-	2	5	7	10	12	12



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PERTANIAN								
Luas lahan pertanian yang berproduksi	1,365	1,582	1,598	1,614	1,630	1,646	1,662	1,662
Jumlah Populasi Ternak	2,800,000	2,823,400	2,851,000	2,879,000	2,905,400	2,993,000	2,961,000	2,961,000
Prosentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah hewan yang tertangani	240	250	260	275	290	300	310	310
Prosentase Jumlah Poktan yang naik/score	60,15	66	67	68	69	70	71	71
PERDAGANGAN								
Persentase Pelaku Usaha Yang Berizin	10	10	156	10	10	10	10	10
Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	1000	600	720	864	1037	1244	1492	1492
Persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	10	10	10	10	10	10	10	10
Persentase alat UTP metrologi legal tertib ukur	10	10	10	10	10	10	10	10
Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	10	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	20	900	1072	1072	1072	1072	1072	1072
Jumlah pelaksanaan tera ulang alat UTP Metrologi legal	10	10	10	10	10	10	10	10
PERINDUSTRIAN								
Persentase legalitas IKM sesuai ketentuan	5	6	7	8	9	10	11	11
Persentase Industri Kecil dan Menengah yang terupdate dalam aplikasi SIINAS	5	8	10	12	14	14	14	14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DPRD								
Persentase Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								
Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	100	100	100	100	100	100	100	100
KEUANGAN								
Waktu Penyelesaian Rancangan Perda APBD Dan Rancangan Perubahan APBD Yang Ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah SP2D Yang Terbit Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Nilai Neraca BMD Sama Dengan Nilai BMD Dalam Neraca Keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (Milyar)	196,53	123,88	133,88	135,15	142,45	150,12	160,25	160,25
Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar)	5,71	11,06	12,17	10,50	11,85	12,90	14,00	14,00
Rasio PAD	1.2507	100	100	100	100	100	100	100
Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran APBD	91,56	97,6	116,48	102,38	103,87	103,34	110,08	110,08



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
KEPEGAWAIAN								
Indeks Sistem Merit	274	292	300	310	325	335	350	350
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
Persentase SDM Aparatur Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	N/A	15,8	53,43	83,98	105,63	120,48	134,32	134,32
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	86,5	87	87,5	88	88,5	88,5
Indeks Kepatuhan terhadap pelayanan publik	81	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
Jumlah Kelurahan berkembang	N/A	-	4	4	4	4	4	4
Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselenggarakan	N/A	-	0	0	0	0	0	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ormas yang aktif	100	80	85	90	95	100	100	100
Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
APSEK DAYA SAING DAERAH								
Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	84,06	85,56	87,06	88,56	90,06	91,56	93,06	93,06
Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat kemantapan jalan kota	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	85,13	81,21	81,32	81,33	81,42	81,60	81,87	81,87
Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	100	66,33	70,00	78,00	90,00	98,00	100	100
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,1	90,2	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45	90,45
Persentase kelurahan cepat berkembang	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	100	80	82,5	85	90	95	100	100
Nilai Aspek SPBE	2	2	2	2	2	2	2	2
Persentase koperasi berkualitas	15,2	17,65	19,61	22,06	24,51	26,96	29,41	29,41
Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75	77	79	81	83	85	85
Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	12	12	12	12	12	12	12	12



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase SDM Aparatur Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	N/A	15,8	53,43	83,98	105,63	120,48	134,32	134,32
Jumlah RT mandiri	N/A	-	12	24	36	48	60	60
Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB 9



PENUTUP

RPJMD KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2021-2024, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJM Nasional. Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah, serta karena penyesuaian Perangkat Daerah.

Dokumen RPJMD ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun pada masa transisi agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan Pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda).

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Banjarbaru, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2021

Penyusunan RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021, dan Perubahan RKPD 2021 disesuaikan dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

2. RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, dan Perubahan RKPD 2025 dan RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2030.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai Berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Banjarbaru yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda);
4. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
5. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
6. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banjarbaru serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota;
9. Penyusunan RKPD Kota Banjarbaru dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
10. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD Kota Banjarbaru merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH

